Digital Repository Universitas Jember

RATIFIKASI PAKET BALI OLEH INDIA DALAM KONFERENSI TINGKAT MENTERI *WORLD TRADE ORGANIZATION* (WTO) 2013

RATIFYING THE BALI PACKAGE BY INDIA AT WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) MINISTRIAL CONFERENCE IN 2013

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh
Citra Dyah Kumala Yogi
NIM 110910101024

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015

Digital Repository Universitas Jember

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta saya; Ibunda Sulistyawati dan Ayahanda Sunyata;
2. Kedua kakakku Citra Rizky Kusumawati dan Citra Kartika Septania, serta adikku Citra Dinda Florentina;
3. Guru-guru dan pengajar penulis sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
4. Almamater Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Digital Repository Universitas Jember

MOTTO

"Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana. Hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit".

*

"Success seems to be connected with action. Successful people keep moving. They make mistakes, but they don't quit".[*]

[*] Dikutip dari media sosial Line, pada tanggal 11 Mei 2015.
[**] *Ibid*.

Digital Repository Universitas Jember

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Citra Dyah Kumala Yogi

NIM : 110910101024

Menyatakan dengan ssungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "Alasan India Meratifikasi Paket Bali dalam Konferensi Tingkat Menteri *World Trade Organization* (WTO) 2013" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Mei 2015

Yang menyatakan

Citra Dyah Kumala Yogi

NIM. 110910101024

Digital Repository Universitas Jember

SKRIPSI

RATIFIKASI PAKET BALI OLEH INDIA DALAM KONFERENSI TINGKAT MENTERI *WORLD TRADE ORGANIZATION* (WTO) 2013

Oleh:

Citra Dyah Kumala Yogi

110910101024

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Doko Susilo, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Honest Dody Molasy, S.Sos, M.A

Digital Repository Universitas Jember

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **"Ratifikasi Paket Bali Oleh India Dalam Konferensi Tingkat Menteri *World Trade Organization* (WTO) 2013"** telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Kamis, 28 Mei 2015
waktu : 10.00 WIB
tempat : Ruang LKPK FISIP-UNEJ

Tim Penguji:
Ketua

Drs. M. Nur Hasan, M. Hum
NIP. 195904231987021001

Sekretaris I

Drs. Djoko Susilo, M. Si
NIP. 195908311989021001

Sekretaris II

Honest Dody Molasy, S. Sos, M.A
NIP. 197611122003121002

Anggota 1

Fuat Albayumi, S.IP, MA.
NIP. 197404242005011002

Mengesahkan
Dekan,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP. 195207271981031003

Digital Repository Universitas Jember

RINGKASAN

Ratifikasi Paket Bali Oleh India dalam Konferensi Tingkat Menteri *World Trade Organization* (WTO) 2013; Citra Dyah Kumala Yogi, 110910101024; 90 halaman; 112; Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember .

Pada Desember 2013, Konferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Organization (WTO) dilaksanakan di Bali, Indonesia. Dalam KTM tersebut, dilahirkan sebuah kesepakatan baru yang biasa disebut dengan Paket Bali (*Bali Package*) yang menghasilkan tiga kesepakatan, yaitu kesepakatan dalam bidang fasilitas perdagangan (*trade facility*), kesepakatan dalam bidang pertanian, dan kesepakatan dalam pembangunan negara-negara kurang berkembang (*Least Developed Countries*/LDCs). Di awal pertemuan tersebut, India menentang untuk meratifikasi Paket Bali tersebut, karena usulan India yang tidak disetujui oleh negara-negara maju untuk menaikkan subsidi pertanian dari 10% menjadi 15% dari total produksi nasional dan tanpa batasan waktu. Setelah terjadi lobi antara negara berkembang, terutama India dengan negara maju (seperti Amerika Serikat dan Kanada) bersedia menyetujui permintaan India untuk menaikkan subsidi dalam bidang pertanian sebesar 15%, namun hanya dalam kurun waktu 4 tahun.

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk meneliti alasan India bersedia meratifikasi Paket Bali. Metode tersebut menuntut penulis untuk dapat menganalisis data dengan sifat deduktif, dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Data-data yang ada di dapat dari data sekunder. Landasan konseptual yang digunakan penulis untuk penelitian adalah Pendekatan Keamanan Pangan (*food security approach*) dan Pendekatan Pembuatan Keputusan (*decision making approach*) menurut James N. Rosenau untuk menganalisis bersedianya India meratifikasi Paket Bali.

Digital Repository Universitas Jember

Penelitian menunjukkan bahwa alasan India bersedia meratifikasi Paket Bali ada dua alasan. Pertama, kondisi masyarakat India yang masih banyak berada di bawah garus kemiskinan, sehingga mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Terutama dalam bidang subsidi pertanian, karena sebagian besar matapencaharian masyarakat India adalah sektor pertanian. Kedua, jumlah masyarakat yang kelaparan di India masih cukup tinggi, dan sebagian besar kebutuhan pangan masyarakat India dipenuhi dari sektor pertanian. Oleh karena itu subsidi pertanain di India sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan India.

Digital Repository Universitas Jember

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Ratifikasi Paket Bali Oleh India dalam Konferensi Tingkat Menteri *World Trade Organization* (WTO) 2013".** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. Djoko Susilo, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Honest Dody Molasy, S. Sos, MA. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatian, dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
2. Drs. Muhammad Nur Hasan, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa;
3. Bapak dan Ibu dosen serta staf karyawan di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan;
4. Ibunda Sustyawati dan Ayahanda Sunyata yang tiada henti mendoakan penulis;
5. Sahabat-sahabat tercinta Gita, Naomi, Winda, Saqira, Riang, Icha, Akbar, Bima, Jantera, Christine, Rizal, Dheny, Dwiki yang telah menjadi *travel mate* penulis saat mengalami kebosanan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat dan kawan-kawan Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember Angkatan 2011 yang telah berbagi dan menorehkan mimpi, cinta, serta harapan selama penulis menempuh pendidikan;

Digital Repository Universitas Jember

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, Juni 2015

Penulis

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSEMBAHAN ii
HALAMAN MOTO iii
HALAMAN PERNYATAAN iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI v
HALAMAN PENGESAHAN vi
RINGKASAN vii
PRAKATA ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR SINGKATAN xv
BAB 1. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan 7
1.2.1 Batasan Materi 7
1.2.2 Batasan Waktu 8
1.3 Rumusan Masalah 8
1.4 Tujuan Penelitian 9
1.5 Kerangka Teori/Konseptual 9
1.5.1 *Decision Making Approach* 10
1.5.2 *Food Security Approach* 14
1.6 Argumen Utama 18
1.7 Metode Penelitian 18
1.7.1 Teknik Pengumpulan data 19
1.7.2 Teknik Analisisi Data 19

Digital Repository Universitas Jember

1.8 Sistematika Penulisan 20

BAB 2. GAMBARAN UMUM PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN INDIA 21

2.1 Gambaran Umum Pertanian India 21

2.2 Gambaran Umum Ketahanan Pangan India 30

2.3 Hubungan Antara Pertanian dengan Ketahanan Pangan 38

BAB 3. HUBUNGAN INDIA DAN WTO HINGGA PADA KONFERENSI TINGKAT MENTERI WTO DI BALI 41

3.1 Sejarah Hubungan Inida dan WTO 41

3.2 Proposal yang Diajukan India dalam KTM WTO ke-9 di Bali..... 50

3.3 KTM WTO Ke-9 dan Paket Bali..... 58

BAB 4. KEPUTUSAN PEMERINTAH INDIA DALAM MERATIFIKASI PAKET BALI 61

4.1 Kesediaan India Meratifikasi Paket Bali Terkait dengan Ketahanan Pangan India 61

4.1.1 Ketersediaan Pangan 64

4.1.2 Akses Fisik dan Ekonomi Terhadap Makanan 67

4.1.3 Kecukupan Nutrisi (*food utilization*) 70

4.2 Keputusan India Bersedia Meratifikasi Paket Bali..... 73

BAB V. KESIMPULAN 86

DAFTAR PUSTAKA 88

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR TABEL

1.1 Pre Teori dan teori Rosenau 12

1.2 Kriteria Ketahanan Pangan Menurut FAO……. 17

2.1 Pertumbuhan Tarif Produksi , Hasil Panen Padi, dan Minyak Sayur ... 33

4.1 Populasi India yang Berada di Bawah Garis Miskin 69

4.2 Struktur Pemerintah India……. 77

4.4 *Distribution of Total Subsidies&Gross Cropped Area in India*…… 82

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR GAMBAR

1.1 Grafik Komposisi Sektorl PDB India 25
3.1 Bagan Struktur WTO 44
4.1 Posisi India dalam Peta Dunia Terkait Ketahanan Pangan 63
4.2 Diagram Impor Sereal, Gandum, dan Beras India Th.2001-2013 66

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR SINGKATAN

AoA	= *Agreement on Agriculture*
CFA	= *Comprehensive Frameworks of Action*
CHS	= *Commission on human Security*
FAO	= *Food and Agriculturre Organzation*
FCI	= *Food Corporation of India*
FPSs	= *Fair Price Shops*
GATT	= *General Agreement on Tariffs and Trade*
HAM	= Hak Asasi Manusia
HDR	= *Human Development Report*
HLTF	= *High Level Task Force*
KTM	= Konferensi Tingkat Menteri
KTT	= Konferensi Tingkat Tinggi
LDGs	= *Least Developed Countries*
MDGs	= *Millennium Development Goal*
MFN	= *Most Favored Nation*
NABARD	= *National Bank for Agriculture and Rural Development*
PBB	= Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	= Produk Domestik Bruto
PDS	= *Public Distribution System*
PLN	= Politik Luar Negeri
UN	= *United Nation*
UNDP	= *United Nation Development Program*
WTO	= *World Trade Organization*

Digital Repository Universitas Jember

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisai Perdagangan Internasional *(World Trade Organization/* WTO*)* merupakan organisasi internasional yang menangani perdagangan internasional. Organisasi perdagangan internsional ini dibentuk pada tanggal 1 Januari 1995. WTO sendiri mempunyai beberapa fungsi, yaitu: (a) *Administering WTO trade agreements* (menyelenggarakan perjanjian perdagangan WTO), (b) *Forum for trade negotiations* (forum untuk negosiasi perdagangan), (c) *Handling trade disputes* (menangani sengketa perdagangan), (d) *Monitoring national trade policies* (memantau kebijakan perdagangan nasional), (e) *Technical assistance and training for developing countries* (bantuan teknis dan pelatihan bagi negara-negara berkembang), (f) *Cooperation with other international organizations* (kerjasama dengan organisasi internasional lainnya)[1]. Setiap dua tahun sekali, WTO mengadakan pertemuan yang biasa disebut dengan Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*). Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ini merupakan salah satu pertemuan yang menjadi pokok dalam setiap pengambilan keputusan WTO.[2]

Konferensi Tingkat Menteri WTO yang ke-9 diselenggarakan di Bali, Indonesia, diadakan pada tanggal 3-6 Desember 2013. Namun, karena sempat mengalami *deadlock* akhirnya Konferensi Tingkat Menteri WTO ini diperpanjang hingga tanggal 7 Desember 2013. Konferensi Tingkat Menteri WTO di Bali ini menghasilkan kesepakatan pada paket isu yang dirancang untuk memungkinkan negara-negara berkembang untuk mempunyai lebih banyak pilihan dalam menjamin keamanan pangannya, meningkatkan perdagangannya, serta membantu pembangunan

[1]Web resmi WTO. *What Is The WTO?*, diakses dari http://wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm pada tanggal 4 November 2014.
[2]Web resmi WTO. *"Ministerial Conference"*, diakses dari http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/minist_e.htm pada tanggal 4 November 2014.

Digital Repository Universitas Jember

negara kurang berkemang.[3] Ketiga poin tersebut tertuang dalam suatu perjanjian yang biasa disebut dengan Paket Bali (*Bali Package*). Namun, perjanjian tersebut tidak dengan mudah disepakati oleh peserta konferensi. India di awal berlangsungnya konferensi tidak menyetujui disahkannya Paket Bali tersebut. Dalam pertemuan tersebut India menginginkan durasi tidak terbatas untuk pemberlakuan penambahan subsidi pertanian dari 10% menjadi 15%.[4]

India merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Selatan dengan jumlah penduduk lebih dari 1,2 miliar. Selain menduduki peringkat kedua populasi terbanyak di dunia, India juga merupakan salah satu negara demokrasi dengan populasi terbesar di dunia.[5] Dalam bidang perekonomian India juga sedang merintis kemandirian ekonomi, salah satunya kemandirian produksi pertanian. Pertanian di India merupakan salah satu mata pencaharian terbesar masyarakatnya yang didukung dengan areal pertanian yang luas. Kondisi ini berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Peningkatan produksi pertanian akan mempengaruhi ketahanan pangan (*food security)*.[6] Jumlah penduduk India yang tidak sedikit tentu membuat pemerintah India harus melakukan kerja ekstra guna memenuhi ketahanan pangan penduduknya.

Salah satu komponen penting dari Paket Bali yang akan memutuskan hasil dari KTM WTO di Bali adalah usulan India tentang pasokan pangan (*food stockholding*) untuk tujuan ketahanan pangan (*food security*). Dengan mengatasnamakan G-33[7] India mengajukan proposal yang bertujuan untuk

---

[3] Web resmi WTO. *Days 3, 4 and 5: Round-the-clock Consultation Produce Bao Package*, diakses dari http://www.wto.org/english/news_e/news13_e/mc9sum_07dec13_e.htm pada tanggal 4 November 2014.

[4] Detikcom, 2013. *Isu Subsidi Pertanian di Pertemuan WTO Bali Masih Terganjal India*, diakses dari: http://finance.detik.com/read/2013/12/03/172527/2431486/4/isu-subsidi-pertanian-di-pertemuan-wto-bali-masih-terganjal-india pada tanggal 5 November 2014.

[5] Web Resmi Global Sherpa. *India- Country Profile, Facts, News, and Original Artikel*, diakses dari: http://www.globalsherpa.org/india pada tanggal 5 November 2014.

[6] Web Resmi Pemerintah India. *Agriculture*, diakses dari http://india.gov.in/topics/agriculture pada tanggal 5 November 2014.

[7] G-33 adalah koalisi dari negara-negara berkembang dengan populasi yang besar dan petani-petani kecil, termasuk India. Dikutip dari Anonim. 2013. *Food Security, G33 and The WTO: will food*

Digital Repository Universitas Jember

memperluas ruang kebijakan dengan mengubah Perjanjian Pertanian (*Agreement on Agriculture*-AoA) dalam rangka untuk memenuhi keamanan pangan India yang memiliki populasi besar. AoA adalah hasil akhir dari kesepakatan yang dicapai pada negosiasi perdagangan pertanian dalam Putaran Uruguay[8].[9] Dalam KTM WTO tersebut, petani miskin dan orang-orang kelaparan dianggap sebagai penghambat dari keberhasilan Paket Bali. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Kanada tidak siap untuk meratifikasi AoA. Negara-negara maju tersebut tidak ingin negara berkembang seperti India melanggar aturan subsidi minimum (*de-minimis*) 10% dari total nilai produksi pertanian nasional.[10]

Proposal India ini menyatakan kemajuan yang signifikan telah dicapai dalam perundingan Putaran Doha (*Doha Round*) yang mengakui adanya keprihatinan serius terhadap ketahanan pangan di negara-negara berkembang. Putaran Doha merupakan KTM WTO ke-4 yang diselenggarakan di Doha, Qatar. Pada Putaran Doha ini mencanangkan untuk memulai perundingan lebih lanjut mengenai beberapa bidang spesifik, yaitu pertanian. Perundingan tentang bidang pertanian sudah dimulai sejak bulan Maret tahun 2000. Sudah 126 anggota (85% dari 148 anggota) menyampaikan 45 proposal dan 4 dokumen teknis mengenai bagaimana perundingan seharusnya dijalankan.[11] Seperti yang kita ketahui, ketahanan pangan merupakan salah satu isu yang saat ini menjadi perhatian khusus dalam dunia global dan segera membutuhkan

---

security move WTO trade talks, diakses dari http://foodgovernance.com/2013/10/08/food-security-g33-and-the-wto-will-food-security-move-wto-trade-talks/ pada tanggal 8 November 2014.

[8] Putaran Uruguay adalah merupakan sebuah perundingan yang menjadi cikal bakal lahirnya WTO. Dalam Putaran Uruguay juga disepakati beberapa sistm penyelesaian sengketa yang lebih spesifik dan efektif. Diakses dari https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact5_e.htm pada tanggal 8 Juni 2015.

[9] The economic Times. 2003. *What's the agreement on agriculture*, diakses dari http://articles.economictimes.indiatimes.com/2003-09-08/news/27528002_1_amber-box-volume-of-export-subsidies-domestic-support pada tanggal 6 Januari 2015.

[10] Web Resmi Focus Web (LSM yang bergerak dalam Bidang Kemanusiaan). *India G-33 Proposal on Food Security: a wrong move can jeopardize India's food security forever*, diakses dari http://focusweb.org/content/india-g-33-proposal-food-security-wrong-move-can-jeopardize-india%E2%80%99s-food-security-forever pada tanggal 8 November 2014.

[11] Web resmi Kementrian Perdagangan Indonesia. *Putaran Doha*, diakses dari http://www.kemendag.go.id/id/faq#g-1 pada tanggal 7 Januari 2015.

Digital Repository Universitas Jember

tindakan. Hal ini juga termuat dalam proposal yang diajukan oleh India yang menginginkan perubahan dalam Revisi Draf Modalitas Untuk Teks Pertanian (TN/AG/W/4/Rev.4) tanggal 6 Desemeber 2008 yang berkaitan dengan keamanan pangan yang akan dibahas dalam pertemuan para menteri di Bali sesuai dengan ayat 47 dari Deklarasi Kementrian Doha (*Doha Ministrial Declaration*-DMD). India menginginkan penghapusan kalimat terakhir pada catatan kaki no.5 ayat 3 dari AoA lampiran 2 pada pasokan pangan umum untuk tujuan ketahanan pangan yang berbunyi:

> "*untuk kepentingan ayat 3 dari lampiran ini, program pasokan pangan dari pemerintah untuk tujuan keamanan pangan di negara-negara berkembang yang diharapkan berjalan dengan transparan dan dilakukan dengan kriteria resmi yang objektif atau pedoman harus dianggap sesuai dengan ketentuan ayat ini,termasuk program dimana bahan makanan untuk tujuan keamanan pangan yang diperoleh dari harga administrasi, asalkan selisih harga dari perolehan dengan harga referensi eksternal di catat dalam Aggregate Measurement of Support (AMS)*".[12]

Inilah sebabnya proposal yang diajukan oleh India yang mengatasnamakan G33 mengusulkan untuk menghapuskan: "*perbedaan antara harga perolehan dan harga referensi eksternal dicatat dalam AMS"* dan menggantinya dengan" *akuisisi saham bahan makanan dengan Anggota negara berkembang dengan tujuan mendukung produsen berpenghasilan rendah atau miskin sumber daya tersebut tidak akan diperlukan untuk diperhitungkan dalam AMS*." Usulan lebih lanjut G33 adalah adanya penambahan dalam catatan kaki no.6 ayat 4 dari lampiran 2 AoA untuk kepentingan ayat 3 dan 4, yaitu: "*akuisisi bahan makanan dengan harga bersubsidi saat diperoleh umumnya dari produsen berpenghasilan rendah atau miskin sumber daya di negara-negara berkembang dengan tujuan memerangi kelaparan dan kemiskinan di pedesaan*." Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan

[12]Focus Web. *India G-33 Proposal on Food Security: a wrong move can jeopardize India's food security forever*, diakses dari http://focusweb.org/content/india-g-33-proposal-food-security-wrong-move-can-jeopardize-india%E2%80%99s-food-security-forever pada tanggal 8 November 2014.

Digital Repository Universitas Jember

perkotaan dan pedesaan miskin di negara-negara berkembang secara teratur dengan harga yang wajar dan sesuai dengan ketentuan ayat di atas.[13]

KTM WTO ke-9 yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 3-6 Desember 2013, sempat diprediksikan akan mengalami kebuntuan. Sebelum KTM WTO di Bali tersebut, telah berlangsung *General Council of WTO* di Jenewa, Swiss. *General Council* di WTO merupakan tingkat tertinggi dalam pembuatan keputusan di WTO yang terbentuk di Jenewa, dan melakukan pertemuan secara teratur untuk pengambilan keputusan di WTO.[14] Pada pertemuan *General Council* tersebut, juga membahas 3 isu yang menjadi kesepakatan dan paling mendesak untuk segera mencapai kesepakatan. Tiga isu tersebut adalah fasilitas perdagangan (*trade facility*), sektor pertnaian, dan dan pembangunan negara-negara kurang berkembang (*Least Developed Countries/LDGs*). Namun, pada pertemuan tersebut juga belum mencapai kesepakatan seperti yang diinginkan oleh anggota WTO. Hal ini dikarenakan perundingan di Jenewa bersifat *single undertaking* yang artinya kesepakatan akan bisa dicapai apabila disetujui oleh semua anggota WTO tanpa terkecuali. Oleh karena itu, 3 isu tersebut dibahas lebih lanjut dalam KTM WTO ke-9 di Bali pada tanggal 3 Desember 2013.[15]

Menekankan bahwa ketahanan pangan adalah hak yang berdaulat, India berharap bahwa anggota WTO memahami posisi dan dalam KTM WTO di Bali memberikan solusi pada isu-isu tentang bahan makanan. Menteri Perdagangan dan Industri India Anand Sharma juga menyatakan bahwa India menginginkan WTO untuk mengatasi dan mendapatkan solusi permanen tentang saham bahan makanan.

---

[13] Web Resmi Focus Web. *ibid*

[14] Web resmi WTO. *The WTO General Council*, diakses dari http://www.wto.org/english/thewto_e/gcounc_e/gcounc_e.htm pada tanggal 8 January 2015.

[15] Web resmi Kementrian Perdagangan Indonesia. 2013. *KTM WTO ke-9: Menebar Optimisme di Bali*, diakses dari http://www.kemendag.go.id/id/news/2013/12/17/ktm-wto-ke-9-menebar-optimisme-di-bali pada tanggal 8 January 2015.

Digital Repository Universitas Jember

Hal ini dianggap penting untuk keamanan pangan nasional India.[16] Seperti yang kita ketahui bahwa keamanan pangan (*food security*) saat ini menjadi perhatian khusus dalam studi hubungan internasional. Studi hubungan internasional saat ini tidak hanya membahas isu-isu tradisional seperti keamanan negara, kawasan, hubungan antar bangsa, namun mengkaji isu-isu non-tradisional seperti pemberantasan terorisme, penanganan bencana alam, masalah *human trafficking*, keamanan energi, keamanan pangan, dan lain-lain. Isu-isu tersebut telah membuat pandangan negara-negara berbeda mengenai ketahanan negaranya. Negara-negara di dunia mulai berpikiran apabila keamanan dalam negaranya terjamin dan terpenuhi, maka secara otomatis keamanan negara tersebut juga akan terjamin.

Keamanan pangan berarti bahwa tidak hanya ketersediaan makanan untuk dikonsumsi secara langsung, tetapi juga memiliki implikasi lain juga. Ketersediaan bahan makanan akan memiliki sedikit relevansi jika orang tidak memiliki kekuatan untuk membeli makanan untuk mereka konsumsi. Hal ini menjadi tanggung jawab bagi pemerintah untuk menemukan cara-cara dan sarana yang benar, pertama, ketersediaan makanan dalam negeri, dan kedua, orang-orang memiliki kekuatan untuk membelinya.[17] Akses pangan terkait erat dengan persediaan makanan, sehingga ketahanan pangan tergantung pada sistem pangan yang sehat dan berkelanjutan. Sistem pangan yang dimaksud meliputi produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran, akuisisi, dan konsumsi makanan.[18] Berdasarkan pengertian di atas, menjadi suatu kewajaran bagi India bila menolak keputusan WTO untuk menghapuskan subsidi pertanian sebesar 10% dari total hasil produksi nasional. Keputusan tersebut memberatkan negara-negara berkembang seperti India. Terlebih lagi dengan jumlah

---

[16] The Economic Times. 2014. *India hopeful of solution on food security issue at WTO,* diakses dari http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-09-10/news/53770541_1_wto-tfa-trade-facilitation-agreement-current-wto-norms pada tanggal 8 Januari 2015.

[17] K.C.S. Acharya. 1983. *Food Security System of India: Evolution of the Buffer Stocking Policy and Its Evaluation*. Concept Publishing Company. Hal 2.

[18] Web resmi organisasi non-provit yang bergerak dalam bidang keamanan pangan. *What is Food Securitty?* diakses dari http://www.foodsecuritynews.com/What-is-food-security.htm pada tanggal 14 November 2014.

Digital Repository Universitas Jember

penduduk India lebih dari 1,2 miliar. Di mana sebagian besar dari penduduk India masih berada di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan penjelasan dan fakta-fakta di atas, penulis mencoba menuangkannya dalam penelitian skripsi yang berjudul: **"Alasan India Meratifikasi Paket Bali dalama Konferensi Tingkat Menteri *World Trade Organization* (WTO) 2013."**

1.2. Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam membahas suatu fenomena yang terarah dan sistematis, perlu adanya suatu pembatasan/ruang lingkup pembahasan yang jelas supaya pembahasan tidak meluas dan keluar dari konteks tema yang diangkat. Pembahasan perlu diarahkan agar sesuai dengan pokok permasalahan yang dimaksud serta mempermudah di dalam pengumpulan dan pemilahan data atau informasi. Untuk itu, penulis menggunakan dua batasan, yaitu batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1. Batasan Materi

Batasan materi diperlukan guna menunjuk fokus atau materi yang dijadikan bahasan utama dalam sebuah karya ilmiah. Batasan materi berguna untuk menunjukkan ruang pembahasan sebuah peristiwa atau objek yang dianalisis, yaitu cakupan kawasan atau studinya. Supaya karya ilmiah ini sesuai dengan tema utama, maka penulis lebih fokus pada analisis mengenai alasan India bersedia meratifikasi Paket Bali dalam KTM WTO 2013. Di mana India pada awal pertemuan tersebut tidak bersedia meratifikasi Paket Bali. Namun demikian, dalam pembahasan selanjutnya tidak menutup kemungkinan untuk membahas masalah-masalah lain yang relevan terhadap objek yang dikaji. Hal ini untuk mendukung pokok permasalahan agar karya ilmiah ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan analisis yang kuat serta memiliki kedalaman yang proposional agar dapat lebih mendekati kesempurnaan.

Digital Repository Universitas Jember

1.2.2. Batasan Waktu

Batasan waktu betujuan untuk menunjukkan rentang wantu terjadinya peristiwa yang akan dianalisis. Dalam penulisan karya ilmiah, batasan waktu akan memperjelas kapan masalah yang dikaji terjadi. Dalam hal ini, penulis menentukan batasan waktu pada tahun 2001, yaitu pada KTM WTO ke-4 di Doha yang merupakan pertemuan para menteri anggota WTO yang menghasilkan dokumen utama yang biasa disebut dengan Deklarasi Doha, di mana dalam KTM WTO di Doha tersebut menghasilkan isu-isu yang harus segera diselesaikan, salah satunya adalah isu tentang ketahanan pangan dan pertanian. Oleh karena itu, tahun 2001 menjadi batasan waktu dalam skripsi ini karena pada tahun tersebut, ketahanan pangan dan pertanian menjadi isu yang paling mendapat perhatian. Kemudian tahun 2013 menjadi batas akhir penulisan karena ditahun tersebut dihasilkan Paket Bali yang merupakan hasil perundingan yang selama ini ditunggu-tunggu oleh para anggota WTO. Pada tahun 2013 juga, India telah bersedia meratifikasi Paket Bali yang awalnya tidak bersedia meratifikasi Paket Bali tersebut. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan penulis juga mengambil materi kurang atau lebih dari batasan waktu yang sudah ditentukan untuk melengkapi data dan informasi agar karya ilmiah ini bisa menjadi lebih sempurna.

1.3. Rumusan Masalah

Suatu penelitian berawal dari suatu peristiwa/fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar maupun lingkungan internasional. Dari peristiwa/fenomena tersebut muncul suatu permasalahan yang akan dijadikan objek penelitian oleh penulis. Rumusan masalah menjadi hal yang sangat penting dalam suatu karya ilmiah/penelitian, karena dari rumusan masalah peneliti akan mencari jawaban dari peristiwa/fenomena tersebut. Selanjutnya, dari rumusan masalah akan dapat diketahui tujuan yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Dalam hal ini, diharapkan akan ditemukan suatu jawaban dari permasalahan yang dikaji sehingga tidak semua kajian bisa disebut sebagai masalah. Dalam kaitannya dengan materi yang akan dianalisis,

Digital Repository Universitas Jember

maka penulis merumuskan permasalahan yang nantinya akan dijawab dalam skripsi ini, yaitu: "**Mengapa India meratifikasi Paket Bali dalam Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (WTO) 2013?**"

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan tersebut, maka tujuan dari karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui alasan India meratifikasi Paket Bali dalam KTM WTO di Bali pada tahun 2013.

1.5. Kerangka Teori/Konseptual

Dalam suatu penulisan karya ilmiah, perlu ditetapkan suatu kerangka dasar pemikiran. Kerangka dasar pemikiran bisa berupa konsep-konsep atau teori yang disusun secara sistematis untuk membantu dalam penulisan dan pemahaman analisis yang dilakukan. Teori diartikan sebagai bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan mengapa; artinya berteori adalah upaya memberi makna pada fenomena yang terjadi.[19] Adapun konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat suatu objek, atau suatu fenomena tertentu. Konsep adalah sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan, bukan sesuatu yang asing, dan digunakan seharai-hari untuk menyederhanakan kenyataan yang kompleks dengan mengkategorikan hal-hal yang kita temui berdasar ciri-cirinya yang relevan bagi kita.[20]

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan dua kerangka konsep yang akan digunakan untuk membantu penulis menganalisa peristiwa/fenomena yang diangkat, yaitu *Decision Making Approach* yang dikemukakan oleh James N. Rosenau dan *Food Security Approach* yang dikemukakan oleh *United Nation*. *Decision making approach* yang dikemukakan oleh Rosenau ini lebih memfokuskan pada satu aspek yang mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah, di mana

---

[19]Mohtar Mas'oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3aaes. hal. 219.
[20] *Ibid*. Hal. 109

Digital Repository Universitas Jember

dalam skripsi ini penulis menggunakan aspek masyarakat. Sedangkan pendekatan *Food security* merupakan salah satu variabel dari Human Security. *Human security* yang dikemukakan oleh *United Nation* mempunyai 7 variabel, yaitu ekonomi, kesehatan, pribadi, politik, pangan, lingkungan, komunitas. Dalam penulisan kayra ilmiah ini, penulis memilih *Food Security Approach* karena dianggap paling sesuai untuk membantu penulis menganalisa fenomena yang diangkat dalam skripsi ini.

1.5.1. Decision Making Approach

Negara sebagai salah satu aktor dalam hubungan internasional, dalam setiap tindakannya pasti akan mempengaruhi keadaan domestik suatu negara. Terutama dalam setiap pengambilan keputusan yang diambil oleh suatu negara. Menurut Hudson, analisis politik luar negeri yang berkembang sejak 1950-an mempunyai tiga tema utama. *Pertama*, analisis memfokuskan pada pembuatan keputusan politik luar negeri (PLN) yang diinspirasikan oleh Snyder, Bruck dan Sapin pada tahun 1950-an, kemudian dipengaruhi oleh tulisan politik birokrasi dan organisasi pada tahun 1960-1970 yang dapat kita temui pada tulisan-tulisan Allison dan Halperin. *Kedua*, analisis yang memfokuskan pada dimensi psikologis analisis PLN yang dipengaruhi oleh tulisan Kenneth Boulding, dan Harold dan Margaret Sprout pada tahun 1960-an, kemudian dilanjutkan oleh Alexander George dan Michael Brecher pada 1960-an dan Irving Janis pada 1970-an. *Ketiga*, ada perkembangan PLN perbandingan yang dipengaruhi oleh tulisan James Rosenau pada tahun 1960-an. Rosenau mempelopori upaya untuk membangun teori level menengah (*middle-range theory*), yaitu teori yang tidak berupaya menjelaskan semua PLN secara umum, tetapi hanya beberapa jenis negara atau PLN dalam situasi khusus seperti semasa krisis.[21]

Dari beberapa teori pembuatan keputusan, disini penulis mengambil salah satu teori pengambilan keputusan yang dianggap paling tepat guna membantu penulis

[21] Abubakar Eby Hara. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri Dari Realisme sampai Konstruktivisme*, Bandung: Nuansa Cendekia. hal. 79.

Digital Repository Universitas Jember

menganalisa fenomena yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu Teori Politik Luar Negeri yang dikemukakan oleh James N. Rosenau atau biasa yang disebut dengan *Decision Making Approach*. Berbeda dengan Snyder, Bruck, dan Sapin yang mencoba mengkombinasikan banyak faktor internal dan eksternal yang bertanggungjawab pada pembuatan keputusan, Rosenau mencoba lebih disiplin dengan membagi proses pembuatan keputusan dalam tingkat-tingkat analisis dan para analis dikehendaki untuk memfokuskan saja pada satu tingkat analisis yang dianggap paling mempengaruhi politik luar negeri. Menurut Rosenau, secara umum terdapat lima variabel dalam berbagai kajian politik luar negeri, yaitu indiosinkrasi (*indiosyncratic*), peranan, pemerintahan, masyarakat, dan sistemik.[22]

[22] *Ibid*. 89.

Digital Repository Universitas Jember

Tabel 1.1 Pre-teori dan Teori Rosenau

Geography phisical source	Large country				Small country			
State of the economy	developed		underdeveloped		developed		underdeveloped	
State of the polity	Open	closed	Open	closed	open	closed	open	closed
Ranking of the variabel	Role Societal Governmental Systemic Indiosyncratic	Role Indiosyncratic Governmental Systemic Societal	Indiosyncratic role Societal Systemic Governmental	Indiosyncratic Role Governmental Systemic Societal	Role Systemic Societal Governmental Indiosyncratic	Role Systemic Indiosyncratic Governmental Societal	Indiosyncratic Systemic Role Societal Governmental	Indiosyncratic Systemic Role Governmental Societal
Illustrative example	US	Soviet union	India	China	Holland	Czecho-slovakia	kenya	Ghana

Sumber: Abubakar Eby Hara. 2011. "*Analisis Politik Luar Negeri Dari Realisme sampai Konstruktivisme*", Bandung: Nuansa Cendekia. hal.

Digital Repository Universitas Jember

Seperti yang dijelaskan di atas, bahwa Rosenau mencoba lebih disiplin dalam menganalisa politik luar negeri. Dalam menganalisa politik luar negeri India dalam meratifikasi Paket Bali, penulis menentukan satu variabel yang dianggap paling mempengaruhi keputusan India untuk meratifikasi Paket Bali, yaitu variabel masyarakat. Rosenau tidak menjelaskan secara spesifik pengertian dari variabel masyarakat, namun Rosenau memberikan contoh aspek dalam variabel masyarakat, antara lain nilai dominan di masyarakat, tingkat kesatuan nasional, dan tingkat industrialisasi dan sistem ekonomi yang sedikit banyak menyumbang pada isi dari aspirasi dan kebijakan luar negeri suatu negara.[23]

Variabel masyarakat dipilih karena pemerintah mempertimbangkan kondisi penduduk India yang masih banyak berada pada garis kemiskinan. India memiliki penduduk yang sangat besar, lebih dari 1,2 miliar. Kondisi ini menjadi menjadi tantangan bagi Pemerintah India untuk menjamin kebutuhan pangan dan kesejahteraan penduduknya. India merupakan negara berkembang yang memiliki berbagai permasalahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Masyarakat merupakan elemen yang paling penting dalam suatu negara, karena masyarakat yang nantinya akan menerima semua keputusan yang diambil oleh pemerintah. Masyarakat India yang sebagian besar bekerja dalam bidang pertanian tentu membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, terutama dalam bidang subsidi pertanian. Dalam KTM WTO di Bali tahun 2013, India bersikeras untuk tetap menaikkan subsidi pertanian dari 10% menjadi 15% dari total pendapatan nasional. Dalam pertemuan tersebut, India mengajukan proposal yang biasa disebut dengan proposal G33, yang didukung oleh negara-negara berkembang yang tergabung dalam G33. Namun, permintaan India ini mendapat reaksi penolakan dari bebrapa negara maju, terutama Amerika Serikat. Hal ini dilakukan pemerintah India dengan alasan penduduk India yang banyak dan masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan masih sangat membutuhkan subsidi. Tanpa subsidi yang memadai,

[23] *Ibid.* hal.90.

Digital Repository Universitas Jember

pemerintah India tidak akan mampu mencukupi kebutuhan pangan bagi penduduk lebih dari 1,2 miliar.

Subsidi pertanian merupakan dukungan keuangan pemerintah yang dibayarkan kepada petani dan argribisnis untuk menambah penghasilan mereka, mengelola pasokan komoditas pertanian, dan mempengaruhi biaya dan pasokan komoditas tersebut. Aturan WTO untuk subsidi pertanian mulai berlaku tahun 1995 pada akhir perundingan Putaran Uruguay. Anggota WTO sangat mendukung batas subsidi perdagangan karena pasar global telah dikuasai oleh persaingan subsidi oleh negara-negara kaya, diantaranya adalah negara Eropa dan Amerika Serikat. Petani di negara non-subsidi menderita dengan harga rendah. Perjanjian tentang pertanian menangani masalah tersebut dengan menempatkan batasan subsidi perdagangan.[24]

India mengusulkan kepada WTO untuk mengembalikan kedudukan dan mendukung peningkatan pengubahan subsidi pertanian, karena India mempunyai peran yang besar dalam pertanian global. India tidak hanya sebagai negara dengan populasi terbanyak kedua di dunia, tetapi India juga memiliki lahan pertanian yang subur terbesar kedua di dunia. Dalam upaya untuk mengamankan sumber makanan bagi penduduk miskin dan untuk memerangi kelaparan di India, Pemerintah India mengajak negara-negara berkembang lainnya untuk mendorong perubahan aturan WTO yang tergabung dalam kelompok G33. Kondisi masyarakat India tersebut pula yang mendorong India untuk tetap meminta WTO menaikkan subsidi dalam bidang pertanian.

1.5.2. Food Security Approach

Konsep *food security* merupakan salah satu bagain dari *human security* yang terdiri dari 6 variabel lainnya, yaitu ekonomi, kesehatan, pribadi, politik, lingkungan, dan komunitas. Konsep *human security* sendiri secara teori terkait dengan pemikiran dalam hubungan internasional dan studi keamanan yang berfokus pada individu

[24]Dan Pearson. 2014. *India's Dangerous Food Subsidies*, diakses dari: http://thediplomat.com/2014/08/indias-dangerous-food-subsidies/ pada tanggal 18 November 2014.

Digital Repository Universitas Jember

sebagai subjek dari keamanan. Perhatian terhadap individu ini merupakan bagian dari pengamatan John Burton dalam keamanan internasional sejak 1970an dan telah dianggap sebagai "*conflict research*" berbeda dengan realis sebagai "*strategic studies*" dan strukturalis sebagai "*peace research*".[25] Keamanan manusia merupakan kerangka kebijakan yang dinamis dan praktis untuk mengatasi ancaman yang luas dan lintas sektoral yang dihadapi pemerintah dan rakyat. Ancaman terhadap keamanan manusia bervariasi di setiap negara, penerapan keamanan manusia juga membutuhkan penilaian ketidakamanan manusia yang berpusat pada rakyat, konteks yang spesifik, dan preventif. Pendekatan ini membantu fokus perhatian pada ancaman saat ini serta muncul untuk keamanan dan kesejahteraan individu dan masyarakat.[26]

Pendekatan keamanan manusia memperluas lingkup analisis keamanan dan kebijakan bagi keamanan manusia. Pada tahun 1994, *Human Development Report* (HDR) menyorot dua komponen utama keamanan manusia, yaitu: kebebasan dari rasa takut (*freedom from fear*) dan kebebasan dari keinginan (*freedom from want*). Kebebasan tersebut merupakan Pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, adalah bagian dari empat kebebasan manusia yang terkenal dalam pidato Franklin D. Roosevelt pada tahun 1941. Selanjutnya HDR pada tahun 1994 mendaftar tujuh dimensi paling penting bagi keamanan manusia, yaitu: ekonomi, kesehatan, pribadi, politik, pangan, lingkungan, dan komunitas.[27]

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis di sini menggunakan salah satu aspek yang digunakan untuk membantu penulis menganalisa fenomena yang diangkat dalam skripsi ini, yaitu *food security*. Kerawanan pangan dapat menyebabkan kemampuan kognitif yang lebih rendah, berkurang prestasi kerja, dan subtansial

---

[25] Eric Remacle. 2008. *Approaches to Human Security: Japan, Canada, and Europe in Comparative Perspective*. An off print of The Journal of Social Science No.66.

[26] Web resmi UNTFHS. *Human Security Approach*, diakses dari http://www.unocha.org/humansecurity/human-security-unit/human-security-approach pada tanggal 18 Novembe 2014.

[27] Oscar A Gomez and Des Gasper. *A Thematic Guidance Note for Regional and National Human Development Report Teams*, diakses dari http://hdr.undp.org/sites/default/files/human_security_guidance_note_r-nhdrs.pdf pada tanggal 18 November 2014.

Digital Repository Universitas Jember

kerugian produktivitas. Semua ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional.

Ketahanan pangan (*food security*) merupakan konsep multi segi dengan beragam definisi dan interpretasi. Di satu sisi spektrum keamanan pangan menyiratkan ketersediaan pasokan pangan yang memadai di tingkat global dan nasional, di sisi lain ada kekhawatiran tentang gizi yang cukup dan kesejahteraan.[28] Pada *World Food Summit* tahun 1966 ditetapkan sebagai target untuk mengurangi separuh dari jumlah penduduk kekurangan gizi pada tahun 2015. Selain pada *World Food Summit* perhatian terhadap keamanan pangan juga dibahas dalam pertemuan internasional lainnya, diantaranya adalah pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT-*Millennium Summit*) pada tahun 2000, dan pada Konferensi Roma tahun 2002.[29]

Perhatian terhadap ketahanan pangan juga menjadi perhatian khusus pada KTM WTO di Doha pada bulan November 2001, di mana dalam pertemuan tersebut meluncurkan putaran baru tentang perdagangan multilateral. Secara khusus yang berkaitan dengan pertanian. Para menteri sepakat bahwa perlakuan khusus untuk negara berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi dan diwujudkan dalam komitmen serta dalam aturan yang akan dinegosiasikan. Sehingga memungkinkan negara berkembang untuk memperhitungkan kebutuhan pembangunan mereka, termasuk keamanan pangan.[30]

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (*Food and Agriculture Organization*/FAO), menyebutkan ada 3 kriteria yang dapat diidentifikasi, yaitu:[31]

---

[28]Web resmi FAO *Chapter 1 Food Security and Trade: an overview*, diakses dari http://www.fao.org/docrep/005/y4671e/y4671e05.htm pada tanggal 3 Desember 2014.

[29]Web resmi FAO. *Part 1. Conceptual Approaches to Food Security and Trade*, diakses dari http://www.fao.org/docrep/005/y4671e/y4671e04.htm pada tanggal 3 Desember 2014.

[30] *Ibid*.

[31]FAO. 2008. *An Introduction to The Basic Concept of Food Security*. EC - FAO Food Security Programme. Hal 1.

Digital Repository Universitas Jember

Tabel 1.2: Kriteria Ketahanan Pangan menurut FAO

Ketersediaan pangan	Ketersediaan pangan dengan tujuan "pasokan pangan" ditentukan dari tingkat produksi pangan, tingkat persediaan pangan, dan jumlah perdagangan bersih.
Akses fisik dan ekonomi terhadap makanan	Pasokan pangan yang cukup di tingkat nasional dan internasional tidak menjamin ketahanan pangan ditingkat rumah tangga. Kekhawatiran tentang akses pangan yang tidak cukup telah mengakibatkan fokus kebijakan lebih besar pada pendapatan, pengeluaran, pasar, dan harga dalam mencapai tujuan ketahanan pangan.
Kecukupan nutrisi (*food utilization*)	Pemanfaatan umumnya dipahami sebagai cara tubuh mengolah makanan menjadi energi. Energi dan asupan nutrisi yang cukup adalah hasil dari perawatan yang baik, persiapan makanan yang baik, dan distribusi makanan yang baik.

Sumber: FAO. 2008. "*An Introduction to The Basic Concept of Food Security*". EC - FAO Food Security Programme.

India menempati posisi kedua diseluruh dunia pada bidang pertanian. Sektor pertanian seperti kehutanan, penebangan, dan perikanan menyumbang 18,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2005 dan mempekerjakan 60% dari total angkatan kerja. Namun, masalah kelaparan kronis dan kekurangan gizi masih dalam skala yang besar. Penduduk India saat ini memiliki jumlah terbesar penduduk yang kekurangan gizi, yaitu 212 juta penduduk. Jumlah penduduk kekurangan gizi tersebut meningkat dari tahun 1990-1992 dengan jumlah 172.400.000 yang naik menjadi 237.700.000 di tahun 2005-2007, peningkatan tersebut hampir 38% jumlah orang kekurangan gizi. Hal ini terutama disebabkan oleh belum baiknya produktivitas pertanian karena tidak memadai sumber daya dan pasar yang dibutuhkan untuk

Digital Repository Universitas Jember

memperoleh stabilitas pertanian. Kurangnya pendidikan dan kesempatan kerja di daerah pedesaan menjadi salah satu faktornya. Perubahan iklim juga berdampak pada produktivitas pertanian, yang mempengaruhi ktersediaan makanan yang akan mempengaruhi ketahanan pangan. [32]

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, keamanan manusia merupakan hal yan sangat penting yang harus dijamin oleh pemerintah. Apabila kebutuhan pangan penduduk India tidak terpenuhi maka hal tersebut akan menimbulkan kekacauan baik domestik maupun internasional.

1.6. Argumen Utama

Dengan mengacu pada landasan konsep yang sudah dipilih, maka penulis merumuskan argumen utama mengenai alasan India meratifikasi Paket Bali, yaitu:
Alasan India bersedia meratifikasi Paket Bali ada dua alasan. Pertama terkait dengan susidi pertanian yang meningkat dari 10% menjadi 15% dari total produksi. Hal ini karena masyarakat India masih sangat membutuhkan subsidi bidang pertanian. Kebutuhan masyarakat inilah yang membuat Pemerintah India bersedia meratifikasi Paket Bali. Kedua, berkaitan dengan ketahanan pangan India, karena kebutuhan pangan masyarakat India sebagian besar dipenuhi dari hasil pertanian. Oleh karena itu, Pemerintah India bersedia meratifikasi Paket Bali merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjamin ketahanan pangan masyarakatnya.

1.7. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian karya ilmiah, metode mrupakan sebuah syarat untuk melakukan penelitian. Metode bermanfaat untuk mendapatkan kerangka berpikir dan sejumlah data yang dibutuhkan bertujuan agar suatu karya ilmiah menjadi ilmiah, sistematis, dan kronologis. Dengan adanya metode penelitian, sebuah karya tulis

[32] R Prakash Upadhay dan C Palanivel. 2011. *Challenges in Achieving Food Security in India*. Iranian J Publ Health, Vol. 40, No.4, pp. 31-36.

Digital Repository Universitas Jember

ilmiah akan menjadi lebih sistematis. Tahap penelitian dibagi menjadi dua, yaitu pengumpulan data dan metode analisis data.

1.7.1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data yang diperlukan, penulis menggunakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data yang diperoleh bersifat sekunder karena penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian tidak langsung. Dalam melakukan studi literatur atau studi pustaka, penulis mengumpulkan data melalui bahan-bahan tertulis dengan tidak hanya mengandalkan buku-buku saja, tetapi dari artikel, majalah, surat kabar, serta berbagai data dan informasi baik cetak maupun elektronik yang menunjang proses penulisan. Adapun berbagai sumber dan media yang digunakan penulis dalam pengumpulan data antara lain:

1) Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2) Perpustakaan FISIP Universitas Jember
3) Buku-buku koleksi pribadi
4) Jurnal ilmiah, artikel, majalah, dan media cetak lainnya
5) Media internet

1.7.2. Teknik Analisis Data

Dalam karya ilmiah ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu bertujuan untuk mendiskripsikan, menggambarkan, menjelaskan suatu fenomena yang menjadi focus penelitian dalam suatu karya ilmiah dan kualitatif yaitu karena penelitian ini tidak menggunakan data yang dapat diukur secara statistik-matematis. Metode analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, akurat atas data dan fakta yang telah terkumpul untuk diteliti dengan dilakukan pemilihan data pengkajian dan interpretasi terlebih dahulu. Kemudian untuk menganalisis data dan permasalahan yang ada penulis menggunakan

Digital Repository Universitas Jember

teknik berpikir deduktif. Deduktif merupakan teknik berpikir dari hal-hal yang bersifat umum berupa data dan fakta yang telah terkumpul kemudian didapatkan hasil yang bersifat khusus berupa kesimpulan.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk mempemudah penulisan dengan gambaran umumnya, skripsi ini dibagi ke dalam lima bab, dan setiap bab terdiri dari sub bab yang saling berhubungan.

Adapun kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

- **BAB 1: Pendahuluan**

  Bab ini berisi tentang latar belakang, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori/konseptual, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- **BAB 2: Gambaran Umum Pertanian dan Ketahanan Pangan India**

  Bab ini akan menjelaskan gambaran umum tentang India, mulai dari letak geografis, hingga pertanian di India yang akan diakitkan dengan ketahanan pangan di India.

- **BAB 3: Hubungan India dan WTO Hingga Pada Konferensi Tingkat Menteri WTO di Bali**

  Bab ini akan membahas tentang hubungan India dan WTO hingga KTM WTO di Bali pada tahun 2013.

- **BAB 4: Keputusan Pemerintah India Dalam Meratifikasi Paket Bali**

  Bab ini akan membahas alasan pemerintah India bersedia meratifikasi Paket Bali.

- **BAB 5: Kesimpulan**

  Bab ini merupakan kesimpulan atas apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya secara ringkas, sebagai bagian penutup penulisan skripsi untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Digital Repository Universitas Jember

BAB 2. GAMBARAN UMUM PERTANIAN DAN KEAMANAN PANGAN INDIA

2.1. Gambaran Umum Pertanian India

India merupakan negara terbesar yang berada di kawasan Asia Selatan. Dengan luas wilayah 3,3 juta km², pada tahun 2010 India dihuni oleh 1.210.193.422 (623.700.000 laki-laki dan 586.400.000 perempuan).[33] Kondisi geografis dan demografis India sangat beragam, yang terbagi dalam ribuan bahasa, agama, budaya, pedesaan dan perkotaan, dan perbedaan yang ekstrim antara kemiskinan dan kekayaan masyarakatnya. India merupakan salah satu pusat peradaban tertua di dunia dengan berbagai warisan budaya dan perubahan yang cepat. India juga telah mencapai kemajuan sosial-ekonomi sejak kemerdekaannya 67 tahun lalu. Dengan kondisi lahan pertanian yang sangat luas, sejak kemerdekaannya India telah berkembang menjadi negara mandiri terutama di sektor produksi pertanian.[34] Pertanian merupakan mata pencaharian terbesar masyarakat India, terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan. Industri pertanian di India berkontribusi sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Bersama-sama dengan sector kehutanan, pertanian berkontribusi 16,6 % PDB Nasional. Selain itu, sektor pertanian juga menyedot 52% dari total tenaga kerja di India.[35]

Industri pertanian di India bertumpu pada delapan kawasan pertanian penting, meliputi: Punjab, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Haryana, Bihar, Andhra Pradesh, Maharashtra, West Bengal. Semua daerah tersebut memegang peran penting dalam perkembangan pertanian India. Total wilayah pertanian di India adalah 1.269.219km²,

---

[33] Sensus pada tahun 2011, diakses dari http://india.gov.in/india-glance/profile pada tanggal 16 Januari 2015.

[34] Web resmi pemerintah India.*Profile*, diakses dari http://india.gov.in/india-glance/profile pada tanggal 16 January 2015.

[35] Maps of India. *Scenario of Agriculture in India*, diakses dari http://www.mapsofindia.com/indiaagriculture/ pada tanggal 16 January 2015.

Digital Repository Universitas Jember

yang mewakili sekitar 56,78% dari total tanah di seluruh India. India juga menempati urutan pertama di dunia dalam memproduksi hasil pertanian, seperti buah segar, kacang polong, ketumbar dan bumbu masak. Sekitar 10% dari buah yang diproduksi dunia dihasilkan oleh India. India adalah produsen terbesar di dunia dalam produksi papaya, mangga, sawo, dan pisang. India juga produsen terbesar goni, susu, dan kacang-kacangan, serta memegang peringkat kedua dalam produksi sutra dan merupakan konsumen terbesar dari sutra di dunia. Pada tahun 2005, India menghasilkan 77 juta ton sutra.[36]

Sejarah pertanian India paska kemerdekaan dapat dikelompokkan menjadi empat periode, yaitu[37]:

1. Tahap pertama tahun 1947-1964

   Sejarah pertanian India pada tahap pertama diawali pada era Jawaharlal Nehru, dimana penekanan utama adalah pada pengembangan infrasruktur pertanian berbasis teknologi. Langkah-langkah awal yang diambil adalah pembangunan pabrik pupuk dan pestisida. Pembangunan proyek irigasi, organisasi pengembangan masyarakat dan program-program ekstensi nasional. Mulai dari perguruan tinggi pertanian, diawali dengan pembentukan Universitas Pant Nagar yang didirikan pada tahun 1958, serta pembangunan lembaga pertanian, seperti *Central Research Institute*[38], *Central Potato Research*[39]. Selama periode ini, populasi penduduk meningkat lebih dari 3% per tahun oleh karenanya diambil langkah untuk memperkuat sistem layanan kesehatan masyarakat dan kemajuan dalam pengobatan preventif. Pertumbuhan produksi pangan tidak bisa memenuhi kebutuhan penduduk yang terus tumbuh, dan impor pangan sangat

---

[36]Maps of India. *Ibid*.

[37]Vandana Tyagi. 2012. *India's Agriculture: Challenges For Growth & Development In Present Scenario*. IJPSS.Vol. 2.

[38] Didirikan oleh David Sample pada 3 Mei 1905, lembaga yang bergerak dalam bidang pengembangan vaksin. Diakses dari http://www.nti.org/facilities/145/ , pada tanggal 24 Januari 2015.

[39] Lembaga yang bergerak dalam penelitian tentang kentang (potato), karena di India kentang merupakan makanan yang banyak dikonsumsi oleh penduduk India. Diakses dari http://cpri.ernet.in/?q=node/223 pada tanggal 24 Januari 2015.

Digital Repository Universitas Jember

dibutuhkan pada saat itu. Impor makanan sebagaian besar di bawah program PL-480 Amerika Serikat yang menyentuh puncaknya 10 juta ton impor makanan pada tahun 1966.

2. Tahap kedua tahun 1965-1985

Periode ini bertepatan pada kepemimpinan Lal Bahadur Shastri dan Indira Gandhi, dengan Moraji Desai dan Charan Singh Menjabat sebagai perdana menteri selama 1977-1979. Pada tahap ini, pembangunan sector pertanian dilakukan dengan memaksimalkan manfaat dari infrastruktrur yang dibuat pada tahap 1 (1947-1964) khususnya dalam bidang irigasi dan transfer teknologi. Kesenjangan utama dalam strategi yang diterapkan pada tahap pertama dipenuhi, seperti misalnya sosialisasi bibit unggul gandum dan beras kepada masyarakat. Bibit nggul ini dapat memanfaatkan sinar matahari, air, dan nutrisi lebih efisien. Dalam periode ini juga dilakukan reorganisasi dan penguatan penelitian pertanian, pendidikan dan penyuluhan, dan penciptaan lembaga untuk memberikan petani peluang pemasaran yang terjamin dan harga yang menguntungkan bagi produk mereka. Bank Nasional untuk Pertanian dan Pembangunan Pedesaan (*National Bank for Agriculture and Rural Development/NABARD*) didirikan. Semua langkah-langkah ini menyebabkan lonjakan kuantum dalam produktivitas dan produksi tanaman, seperti gandum dan beras, dan hal tersebut dianggap sebagai ketetapan Revolusi Hijau (*Green Revolution*). C. Subramaniam (1964-1967) dan jagjivan Ram memberikan bimbingan dan dukungan kebijakan publik yang diperlukan.

3. Tahap ketiga tahun 1985-2000

Era ini berada dalam era kepemimpinan Rajiv Gandhi, P.V. Narashima, dan Atal Bihari Vajpayee, dan beberapa menteri yang membantu program pangan melayani dalam jangka pendek. Fase ini ditandai dengan penekanan yang lebih besar pada produksi kacang-kacangan, minyak sayur, sayuran, buah-buahan dan susu. Rajiv Gandhi memperkenalkan inovasi organisasi seperti MisiTeknologi (*Technology Mission*) yang memberikan dampak baik pada peningkatan pesat

Digital Repository Universitas Jember

dalam produksi biji-bijan untuk minyak goreng. Pendekatan Misi ini melibatkan perhatian yang bersamaan dengan konservasi, budidaya, konsumsi, dan perdagangan.Daerah tadah hujan dan lahan terlantar mendapat perhatian khusus dan Dewan Pengembangan Westland (*Westland Development Board*) didirikan.Periode ini berakhir dengan cadangan biji-bijian dalam jumlah yang besar dan media yang menyoroti eksistensi jutaan kelaparan.Periode ini juga melihat penurunan bertahap dalam investasi publik dalam irigasi dan infrastruktur penting untuk kemajuan pertanian serta runtuhnya sistem kredit koperasi secara bertahap.

4. Tahap keempat tahun 2001 sampai sekarang

   Upaya Perdana Menteri Atal Bihari Vajpayee dan Manmohan Singh dalam meningkatkan produksi pertanian dalam fase ini sangat lemah dalam hal kebijakan. Akibatnya perluasan teknologi dan produksi juga melemah. Dalam fase ini 40% petani menginginkan untuk keluar dari pertanian jika ada alternatif pekerjaan yang lain.

Pertanian merupakan sektor penting di India, meskipun kontribusinya terhadap keseluruhan PDB India telah jatuh dari sekitar 30% pada tahun 1990-1991 menjadi kurang dari 15% pada tahun 2011-2012. Padahal sektor pertanian merupakan bidang yang sangat diharapkan kontribusinya terhadap PDB India, namun kenyataannya pertanian di India belum bisa berkontribusi banyak terhadap pembangunan di India. Pemerintah India rata-rata menghabiskan setengah dari total belanja India pada makanan, sementara setengah tenaga kerja India masih bergerak di bidang pertanian untuk mata pencaharian mereka. India merupakan negara dengan kemiskinan dan kurang gizi yang tinggi, oleh karena itu pertanian merupakan prioritas pemerintah India dalam rangak mengurangi kemiskinan dan kekurangan gizi serta pertumbuhan yang inklusif. Pertumbuhan PDB secara keseluruhan mungkin tidak bisa memberikan banyak pengaruh terhadap pengurangan kemiskinan kecuali mempercepat pertumbuhan pertanian. Pada saat yang bersamaan, pertumbuhan

Digital Repository Universitas Jember

dengan tingkat hasil yang tinggi dapat dicapai ketika pertumbuhan pertanian dipercepat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertanain harus menjadi agenda reformasi untuk membuat perubahan yang signifikan terhadap kemiskinan dan kekurangan gizi serta untuk menjamin keamanan pangan jangka panjang bagi masyarakat.[40]

Sektor pertanian di India mengalami perubahan struktural yang signifikan dalam bentuk penurunan PDB, dari 30% pada tahun 1990-1991 menjadi 14,5% pada tahun 2010-2011. Hal tersebut menunjukkan pergeseran dari ekonomi tradisional menjadi perekonomian yang dominan pada servis (jasa). Seperti yang terlihat pada grafik berikut:

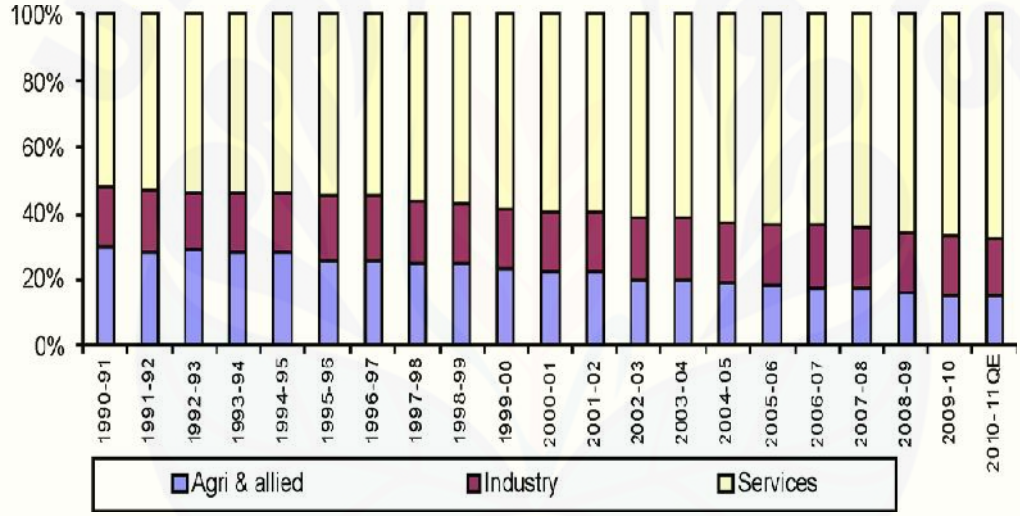

Gambar 1.1: Grafik Komposisi Sektoral PDB

Sumber: *Info Gateway to the Department of Agreeculture & Cooperation, Ministry of Agriculture India*

Penurunan kontribusi pertanian terhadap PDB belum disertai dengan penurunan tenaga kerja dalam bidang pertanian. Sekitar 52% dari total tenaga kerja masih bergerak pada bidang pertanian untuk mata pencaharian masyarakat India.[41]

---

[40]Info Gateway to the Department of Agreeculture & Cooperation, Ministry of Agreeculture India . 2012. *State of Indian Agricultur 2011-12*. Diakses dari http://agricoop.nic.in/docs.htm pada tanggal 16 Januari 2015.

[41]*Ibid*.

Digital Repository Universitas Jember

Menurunnya kontribusi pertanian terhadap PDB juga diikuti dengan terus meningkatnya populasi pada pertanian dan fragmentasi meningkatnya kepemilikan tanah yang mengarah pada penurunan ketersediaan lahan pertanian.Sektor pertanian sendiri tidak bisa berada dalam posisi untuk menciptakan lapangan kerja tambahan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga pedesaan.Kondisi tersebut membuat kesempatan tambahan lapangan kerja di bidang non-pertanian dan sektor manufaktur, terutama pada industri agro pedesaan yang memiliki area keunggulan komparatif dalam hal dukungan dan pengembangan sumber daya.Hal ini tentu membutuhkan keterampilan yang sesuai perkembangan masyarajat sehingga memberi pekerjaan kepada masyarakat dibidang non-pertanian.[42]

Setelah kemerdekaan India, bidang pertanian memang mengalami penurunan kontribusi terhadap PDB India, namun disisi lain pertanian tetap menjadi bidang utama matapencaharian bagi masyarakat India. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian tetap menjadi sektor yang dominan dalam perekonomian India. Pertanian India yang laju pertumbuhannya sekitar 1% per tahun selama lima puluh tahun sebelum kemerdekaan, telah meningkat sekitar 2,6% per tahun diera pasca-kemerdekaan. Perluasan wilayah merupakan sumber utama pertumbuhan pada periode 1950an-1960an. Aspek penting dari kemajuan dalam bidang pertanian adalah keberhasilannya dalam mengurangi ketergantungan dalam impor bahan makanan.Pertanian India tidak hanya berkembang dalam hasilnya, namun juga perubahan struktural juga telah memberikan kontribusinya.Semua perkembangan tersebut tidak lepas dari langkah-langkah yang diabil oleh pemerintah India.Peresmian Komisi Harga Pertanian dengan tujuan untuk memastikan harga dan memberi keuntungan bagi produsen investasi dalam penyuluhan dan penelitian, pemberian fasilitas kredit, dan meningkatkan infrastruktur pedesaan adalah beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah.[43]

---

[42]Final report SIA-Press. *Loc. Cit.*

[43]Amarnath Tripathi & A.R. Prassad. 2009. "*Agriculture Development in India since Independence: A Study on Progress, Performance, and Determinance*". Journal of Emerging Knowledge on Emerging Markets.Vol. 1.Issue 1.

Digital Repository Universitas Jember

Meskipun mengalami kemajuan, namun situasi tersebut berubah pada periode pasca-WTO (1990-an) dan perubahan tersebut mencakup semua sektor pertanian. Tingkat pertumbuhan hasil dari semua tanaman melambat dari 2,93% menjadi 1,57%. Ternak menurun dari 4,21% menjadi 3,40%. Perikanan menurun dari 7,48% menjadi 3,25%. Hanya saja, dalam bidang kehutanan mengalami peningkatan yang sangat tajam, yaitu dari 0,09% menjadi 1,82%. Oleh karena itu, untuk pengembangan pertanian di India, banyak perubahan infrastruktur dan kelembagaan yang dilakukan pasca kemerdekaan. Secara umum, kebijakan dalam bidang pertanian selama periode tersebut (1990-an) bisa dibedakan menjadi empat tahap, yaitu:[44]

1. Tahap pertama dari kebijakan pertanian adalah membuat reformasi pertanian secara besar-besaran, perubahan kelembagaan, pembangunan proyek irigasi dan memperkuat institusi koperasi kredit. Kontribusi penting dari reformasi tanah adalah penghapusan perantara dan memberikan sertifikat tanah kepada petani yang sebenarnya. Reformasi tanah merupakan langkah yang penting dalam fase ini dan bisa meningkatkan produksi pertanian. Komunitas Program Pengembangan (*The Community Development Programe*), perencanaan terdesentralisasi, Program Pembangunan di Area Intensif (*Intensive Area Development Programmes*) dimulai untuk regenerasi pertanian India yang mengalami stagnansi selama periode Inggris.
2. Tahap kedua dalam pertanian India adalah dengan penerapan strategi pertanian baru. Strategi pertanain baru bergantung pada varietas tanaman unggul, tumpangsari, praktek pertanian modern dan penyebaran fasilitas irigasi. Prestasi besar dalam strategi ini adalah pencapaian swasembada panganan pokok.
3. Tahapan berikutnya adalah periode yang mulai menyaksikan proses diversifikasi yang mengakibatkan pertumbuhan yang cepat dalam produksi

[44]*Ibid*.

Digital Repository Universitas Jember

susu, perikanan, unggas, sayuran, dan buah-buahan. Hal tersebut juga telah meningkatkan kontribusi pertanian pada PDB India.

4. Tahap keempat kebijakan pertanian dimulai setelah proses reformasi ekonomi pada tahun 1991. Reformasi tersebut adalah reformasi dalam hal berkurangnya pertisipasi pemerintah dalam kegiatan ekonomi dan liberalisasi. Meskipun tidak ada reformasi secara langsung dalam bidang pertanian, tetapi sektor ini dipengaruhi secara tidak langsung oleh devaluasi nilai tukar dan liberalisasi perdagangan eksternal. Selama periode ini, pembukaan pasar domestik akibat dari kesepakatan internasional yang baru dan WTO adalah perubahan lain dan menyebabkan dampak pada pertanian. Hal ini membuat tantangan tersendiri dikalangan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, Kebijakan Pertanian Baru (*New Agriculture Policy*) dibuat oleh Pemerintahan India pada bulan Juli 2000. Hal ini bertujuan untuk mencapai tingkat pertumbuhan 4% per tahun pada sektor pertanian yang didasarkan pada penggunaan sumber daya yang efisien.

Pertanian adalah cara hidup, tradisi yang selama berabad-abad telah membentuk pikiran, pandangan, budaya, dan kehidupan ekonomi masyarakat India. Oleh karena itu, pertanian akan terus menjadi pusat untuk semua strategi pembangunan sosial-ekonomi India. Pertumbuhan yang cepat dari sektor pertanian sangat penting tidak hanya untuk mencapai kemandirian di tingkat nasional, tetapi juga untuk ketahanan pangan dan keadilan dalam distribusi pendapatan. Pemerintah India setelah kemerdekaannya membuat langkah-langkah yang cepat di bidang pertanian dengan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencapai swasembada pangan dan menghindari kekurangan pangan. Lebih dari 200 juta petani India dan buruh tani menjadi tulang punggung pertanian di India. Namun pemerintah India mengalami kesulitan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan. Pembentukan ekonomi pertanian yang menjamin pangan dan gizi untuk lebih dari satu miliar orang India dan sistem penghargaan yang adil dan merata bagi masyarakat

Digital Repository Universitas Jember

pertanian menjadi bahasan utama dalam reformasi pertanian. Kebijakan Pertanian Nasional berupaya untuk mengaktualisasikan potensi pertumbuhan yang belum dimanfaatkan dalam pertanian India, memperkuat infrastruktur pedesaan untuk mendukung pembangunan pertanian yang cepat, meningkatkan nilai tambah, mempercepat pertumbuhan bisnis agro, menciptakan lapangan kerja di daerah pedesaan, mensejahterakan petani dan keluarganya, mencegah migrasi ke daerah perkotaan, dan menghadapi tantangan yang ditimbulkan akibat liberalisasi dan globalisasi ekonomi. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan:[45]

1. Tingkat pertumbuhan sebesar 4% ditujukan untuk dua dekade ke depan.
2. Partisipasi sektor swasta yang lebih besar melalui kontrak pertanian.
3. Perlindungan harga bagi petani.
4. Skema asuransi pertanian nasional.
5. Membongkar pembatasan pergerakan komoditas pertanian di seluruh negeri.
6. Pemanfaatan secara rasional sumber daya air untuk potensi penggunaan optimal bagi irigasi.
7. Prioritas tinggi terhadap pembangunan pertanian, unggas, dan susu.
8. Pemasukan modal dan jaminan pasar untuk hasil produksi pertanian.
9. Pembebasan dari pembayaran pajak pada akuisisi lahan pertanian.
10. Meminimalkan fluktuasi harga komoditas.
11. Memantau terus harga internasional.
12. Perlindungan varietas tanaman melalui undang-undang.
13. Kualitas persediaan yang cukup dan tepat waktu untuk petani.
14. Prioritas yang tinggi untuk listrik pedesaan.
15. Menyiapkan unit pengolahan hasil pertanian dan penciptaan lapangan kerja di luar sektor pertanian di daerah pedesaan.

---

[45] Research Reference and Training Division, Ministry of Information dan Broadcasting, Government of India. *New Agriculture Policy*, diakses dari http://rrtd.nic.in/agriculture.html pada tanggal 26 Januari 2015.

Digital Repository Universitas Jember

Kebijakan ini berusaha untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan dengan cara yang ekonomis, tidak merusak lingkungan, dan diterima secara sosial. Tindakan tersebut diambil untuk mengontrol lahan pertanian yang digunakan sembarangan untuk kegiatan non-pertanian. Daerah kritis yang tidak digunakan akan digunakan untuk pertanian dan penghijauan. Perhatian khusus juga akan diberikan untuk meningkatkan intensitas tanam melalui beberapa cara pemanenan dan tumpangsari. Kebijakan-kebijakan tersebut dibuat untuk pertanian India yang lebih baik dan untuk kelanjutan keamanan pangan India.[46]

2.2. Gambaran Umum Ketahanan Pangan India

Ketahanan pangan pada dasarnya berarti bahwa semua orang memiliki akses setiap waktu ke makanan yang aman dan bergizi untuk menjaga kesehatan dan memiliki kehidupan yang layak.[47] Kebutuhan akan ketahanan pangan muncul karena fluktuasi produksi makanan dan berkurangnya ketersediaan pangan dalam negeri. Munculnya kekurangan pangan juga diakibatkan dari terus meningkatnya populasi manusia dan masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Keamanan pangan merupakan bagian dari *human security* yang terdiri atas 6 variabel lainnya, yaitu ekonomi, kesehatan, pribadi, politik, lingkungan, dan komunitas.

Ketersediaan pangan merupakan kondisi yang diperlukan untuk ketahanan pangan. Memastikan ketersediaan pangan juga menjadi tugas negara terlebih bagi India dengan jumlah populasi yang mencapai lebih dari 1,2 miliar. Banyak permasalahan yang timbul dalam hal ketahanan pangan di India pada tahun 1980an-2000an, yaitu:

---

[46] *Ibid*.
[47] Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (*Food and Agriculture Oeganization*/FAO).

Digital Repository Universitas Jember

1. Liberalisasi ekonomi pada 1990-an dan dampaknya pada pertanian dan ketahanan pangan, di mana penciptaan sistem liberalisasi ekonomi ini dipercaya bahwa sistem perdagangan yang lebih terbuka akan menguntungkan antar pihak. Namun India belum bisa menyesuaikan dengan sistem baru tersebut, sementara India yang tergabung dalam WTO harus mengikuti peraturan yang ada.

2. Pembentukan Perjanjian Pertanian (AoA). AoA merupakan perjanjian dalam bidang pertanian antar anggota yang tergabung dalam WTO yang berisi tentang tujuan untuk mereformasi kebijakan dalam bidang pertanian yang adil dan berorientasi pasar. AoA ditujukan untuk mengurangi subsidi domestik, subsidi ekspor dan meningkatkan akses pasar. Namun dalam hal ini India belum siap untuk mengurangi subsidi domestik dalam bidang pertanian, karena petani India belum bisa memenuhi kebutuhan pertaniannya jika subsidinya dikurangi. Secara tidak langsung hal tersebut juga akan mempengaruhi ketahanan pangan India.

3. Tantangan adanya perubahan iklim, harga pangan, harga bahan bakar, dan krisis keuangan. Adanya pemanasan global membuat perubahan iklim semakin tidak menentu yang berpengaruh terhadap produksi pertanian. Adanya bencana alam membuat produksi pertanian berkurang, harga pangan menjadi tinggi, sedangkan masyarakat tidak mempunyai pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka.

4. Fenomena kelaparan dan tingkat kemiskinan yang tinggi. India merupakan negara dengan jumlah populasi lebih dari 1,2 miliar dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Kemiskinan yang terjadi di India tentu saja membuat masyarakatnya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka, terutama kebutuhan pangan dan menyebabkan fenomena kelaparan juga semakin meluas.

5. Kurangnya Pengenalan Sistem Distribusi Publik (*Public Distribution System*). Sistem Distribusi Publik ini berkembang sebagai sistem yang menangani kelangkaan

Digital Repository Universitas Jember

bahan pangan dan distribusi pangan dengan harga yang murah.[48] Namun, dengan fakta masih tingginya angka kelaparan di India membuktikan bahwa pendistribusian pangan belum merata ke seluruh penduduk India.

6. Kurangnya pengawasan target yang berada di bawah *Tenth and Eleventh Five Year Plans* yang hampir sama dengan program MDGs dalam rangka menangani kemiskinan, perempuan, dan gizi anak. Menurut laporan *Tenth and Eleventh Five Year Plans* jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, penduduk yang kelaparan masih dalam jumlah yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap *Tenth and Eleventh Five Year Plans.* Permasalahan yang timbul dalam dua dekade tersebut telah memberikan peluang dan tantangan terhadap ketahanan pangan dan gizi di India.[49]

Tingkat pertumbuhan produksi dan hasil panen India mengalami penurunan dari periode 1996-2008 dibandingkan dengan periode sebelumnya 1986-1997. Tingkat pertumbuhan produksi padi mengalami penurunan dari 2,93% menjadi 0,93% pada periode yang sama. Tingkat pertumbuhan produksi pertanian jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan populasi India. Demikian pula tingkat pertumbuhan dari butir padi menurun dari 3,21% menjadi 1,04%. Penurunan juga terjadi pada produksi sereal, kacang-kacangan, minyak sayur, beras, dan gandum, seperti yang terlihat pada tabel berikut:[50]

---

[48] Web resmi Department of Food & Public Distribution India. *Targeted Public Distribution System*, diakses dari http://dfpd.nic.in/?q=node/101 pada tanggal 13 Februari 2015.
[49] S. Mahendra Dev & Alakh N. Sharma. 2010. *Food Security in India: Performance, Challanges, and Policies*. Oxfam India. Hal 1.
[50] *Ibid*.

Digital Repository Universitas Jember

Tabel 2.1: Pertumbuhan Tarif Produksi, Hasil Panen Padi, dan Minyak Sayur (% per tahun)

Crop groups/crops	***Production***		***Yields***	
	1986-87 to 1996-97	**1996-97 to 2007-08**	**1986-87 to 1996-97**	**1996-97 to 2007-08**
Foodgrains	2.93	0.93	3.21	1.04
Cereals	3.06	0.97	3.36	1.19
Coarse cereals	1.19	1.53	3.66	2.25
Pulses	1.32	0.36	1.49	-0.02
Oilseeds	6.72	1.99	3.32	1.49
Rice	3.06	1.02	2.37	1.22
Wheat	4.09	0.65	2.93	0.34

Sumber: CACP, Ministry of Agriculture, India (2009)

Kinerja sektor pertanian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya mempunyai tanggung jawab atas penurunan produksi pangan. Dapat dicatat bahwa padi, kacang-kacangan, minyak sayur, gula, buah-buahan, sayuran, unggas, susu, daging, ikan, dan lain-lain merupakan hasil dari sektor pertanian. Kinerja dalam sektor pertanian dianggap penting untuk ketersediaan makanan, karena lebih dari 55% penduduk India bergantung pada sektor pertanian. Populasi di India tumbuh sekitar 1,9% per tahun, sedangkan pertumbuhan produksi pangan hanya 1,5% per tahun. Meskipun sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap PDB India, namun tingkat pertumbuhan produksi makanan terus menurun dari 494,1 gram per hari pada

Digital Repository Universitas Jember

tahun 2002 menjadi 442,8 gram per hari pada tahun 2007. Sekitar 230 juta penduduk India di daerah pedesaan kekurangan gizi, 40% dari anak-anak di bawah usia 3 tahun kekurangan berat badan dan 45% terhambat dalam pertumbuhan, dan 79% anak-anak di bawah usia 5 tahun mengalami anemia.[51]

India menempati urutan ke 94 dari 119 negara di dunia pada *Hunger Index Global*. Studi yang dilakukan oleh Mushir Ali[52] di India, pada tahun 2012sekitar 200 juta orang kekurangan makan dan 50 juta orang lainnya mengalami kelaparan yang mengakibatkan kematian. Situasi ini menurut Mushir Ali akibat dari lemahnya kebijakan pemerintah India di bidang pertanian dan pelaksanaannya di lapangan. Penduduk pedesaan rata-rata per harinya hanya mengkonsumsi kurang dari 2.400 kalori di banyak negara , yang dikarenakan oleh pendapatan mereka juga tidak cukup untuk membeli makanan.

Menurut Program Pangan Dunia (*World Food Programme*)[53], rata-rata 44% rumah tangga di dunia kekurangan asupan kalori dan kekurangan gizi, yang mayoritas terjadi pada perempuan dan anak-anak. Naiknya harga pangan dunia menjadi salah satu penyebab semakin meningkatnya kelaparan. Harga pangan secara umum naik 87%, sementara harga padi naik 46%. Kondisi ini mengancam 100 juta orang di setiap benua dan mengakibatkan kelaparan.[54]

Ketersediaan pangan per kapita di India diperkirakan meningkat hanya 10% selama 56 tahun pada periode 1951-2007. Ketersediaan makanan juga menurun pada periode 1960 dari 469 gram per hari menjadi 443 gram per hari. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi pangan belum bisa mengimbangi pertumbuhan

---

[51] R.T. Gahukar. 2011. *Food Security in India: The challenge of Food Production and Distribution*. *Journal of Agricultural & Food Information*, 12:270–286.

[52] Mushir Ali, Hifzur Rehman, S. Murshid Husain. 2012. *Status Of Food Insecurity at Household Level In Rural India: A Case Study of Uttar Pradesh*. International Journal of Physical and Social Sciences. Vol.2 Issue.8.

[53] *World Food Programme* dalam *ibid.*

[54] *ibid*

Digital Repository Universitas Jember

populasi India. Ketersediaan sereal juga mengalami penurunan dari 468,5 gram per hari pada tahun 1991 menjadi 407,4 gram per hari pada tahun 2007.[55]

India sendiri tidak pernah menyebut negaranya sebagai negara yang bebas dari kerawanan pangan. Dengan perkembangan tekonologi, Pemerintah India telah mampu meningkatkan persediaan pangan sejak tahun 1992. Namun, India tetap dianggap sebagai negara yang rawan pangan. Karena dengan terjaminnya ketahanan pangan yang efektif, hal tersebut merupakan pencapaian kedua akses fisik dan ekonomi terhadap makanan. Dibandingkan dengan negara-negara lain, India menjadi salah satu negara dengan kerawanan pangan yang tinggi meskipun pertumbuhan perekonomiannya meningkat dengan cepat.[56] Dalam laporan FAO dalam *State of Food Insecurity* pada tahun 2006, dijelaskan bahwa tidak ada negara di dunia yang memiliki jumlah penduduk yang kelaparan sebanyak India.[57] Meskipun setelah kemerdekaan ada beberapa kemajuan dalam menanggulangi keamanan pangan India, namun pemerintah India belum bisa menangani permasalahan yang ada. Melihat kondisi ini, Laurent Gardner pesimis India bisa mengurangi separuh dari total jumlah penduduk yang kelaparan sebagaimana tertuang dalam *Millennium Development Goal* (MDGs)[58] pada tahun 2015.[59]

Pemerintah India percaya kunci untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan adalah dengan perbaikan kebijakan dalam negeri. Pemerintah juga mendukung organisasi non-pemerintah meskipun tidak dalam jangka panjang. Beberapa kebijakan yang perlu di reformasi adalah undang-undang ketenagakerjaan, pendidikan, *outsourcing*, pertumbuhan penduduk, tanggap bencana, dan keluarga berencana.

---

[55]Anil Chandy Ittyerah. 2013. *Food Security In India: Issues and Suggestions For Effectiveness*. Indian Institute of Public Administration.
[56]Lauren Gardner. 2012. *India's Presistens Food Insecurity*. University Honors. Hal. 4.
[57]FAO dalam *ibid*
[58]Program MDGs sendiri terdiri dari 8 program, yaitu mengurangi kemiskinan dan kelapran, meningkatkan pendidikan, mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi HIV/AIDS malaria dan penyakit lainnya, memastikan kelestarian lingkungan, kemitraan global untuk pembangunan global. Diakses dari http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/about_us.html pada tanggal 29 Januari 2015.
[59]Lauren Gardner. *Loc. Cit*.

Digital Repository Universitas Jember

Meskipun India memiliki potensi untuk menjadi produsen makanan dan memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, ada banyak faktor yang menyebabkan India tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, yaitu karena adanya bencana alam dan kekeringan. Keberhasilan atau kegagalan pertanian tergantung pada iklim dan cuaca. Tsunami yang terjadi pada tahun 2004 menyebabkan banyak masalah, terutama bagi penduduk yang tinggal di daerah pantai. Tidak hanya kekurangan pangan dan air dalam jangka pendek, tetapi juga bisa menimbulkan efek jangka panjang. Perahu, perlengkapan nelayan, rumah, hingga bisnis mereka hancur akibat tsunami tersebut. Lebih parah lagi para nelayan tersebut tidak mempunyai cara untuk membangun kembali barang-barang mereka yang rusak yang diakibatkan oleh bencana alam tersebut. Meskipun mereka mendapat bantuan dari organisai-organisasi internasional, namun hal tersebut juga belum bisa menggantikan kehancuran yang disebabkan oleh tsunami. Tsunami yang terjadi pada tahun 2004 tersebut mengakibatkan banyaknya pasir pantai yang terangkut ke lahan pertanian, sehingga membuat lahan pertanian menjadi lahan yang tidak subur. Hal ini tentu mempengaruhi produksi pertanian di India yang dalam jangka pendek atau jangka panjang juga bisa mengakibatkan kekurangan pangan di India.[60]

Adanya bencana alam membuat pemerintah India untuk bekerja lebih ekstra dalam menangani permasalahan tersebut. Ada kebutuhan mendesak untuk mengoperasionalkan konsep keamanan gizi yang berimplikasi pada akses ekonomi, air minum yang bersih, lingkungan yang aman, dan perawatan kesehatan. Menjamin keamanan pangan bisa membatu mengurangi rasa lapar, tetapi belum tentu bisa menghilangkan status kekurangan gizi di India. Kebijakan pemerintah perlu mengadopsi kerangka kebijakan yang terintegrasi untuk memfasilitasi peningkatan penggunaan irigasi dan teknik pertanian baru. Langkah-langkah pemerintah harus fokus pada distribusi yang rasional dari lahan yang bisa diolah, meningkatkan

---

[60]Jamie Kaczor. 2006. *Food Security in India*. Diakses dari https://www.worldfoodprize.org/documents/filelibrary/images/youth_programs/research_papers/2006_papers/AnthonyWayneHS_8D92027302975.pdf pada tanggal 30 Januari 2015.

Digital Repository Universitas Jember

peternakan, dan memberikan jaminan kepada petani yang menyewa lahan dengan peningkatan teknologi untuk budidaya dan peningkatan sarana irigasi, menyediakan bibit unggul, pupuk, dan kredit dengan suku bungan yang rendah. Pemerintah bisa mengadopsi startegi penyimpanan makanan yang telah dilaksanakan di banyak negara. Seperti China, yang memiliki sistem yang baik dalam penelitian dan penyimpanan biji-bijian. Negara ini telah berinvestasi dalam membangun fasilitas penyimpanan yang canggih dengan peralatan yang modern. [61]

Kebutuhan manusia akan pangan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Kekurangan pangan akan menyebabkan ketidakstabilan negara. Seperti yang dikatakan oleh FAO, bahwa setiap orang mempunyai hak asasi terhadap akses makanan (termasuk membeli) dan tidak memiliki ketergantungan terhadap pihak manapun. Namun di India, masyarakatnya masih banyak yang mengalami krisis pangan, yang bisa menyebabkan kematian. Kondisi ini dikarenakan ketidakseimbangan distribusi makanan dan kurangnya ketersediaan pangan di India yang belum bisa memenuhi kebutuhan pangan penduduknya yang berjumlah lebih dari 1,2 miliar. Meskipun Pertanian India mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap PDB India, namun hal tersebut belum bisa mengatasi kekurangan pangan di India. Tentu hal ini membuat pemerintah bekerja lebih keras untuk terus berusaha memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya.

[61]R. Prakash Upadhyay & C. Palnivel. 2011. *Challanges in Achieving Food Security in India*, diakses dari http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3481742/ pada tanggal 30 januari 2015.

Digital Repository Universitas Jember

2.3. Hubungan Antara Pertanian Dengan Ketahanan Pangan di India

Dalam sub-bab ini akan dijelaskan lebih mendalam tentang hubungan antara pertanian dengan ketahanan pangan di India. Sub-bab ini berbeda dengan sub-bab sebelumnya yang menjelaskan tentang pertanian dan ketahanan pangan India, karena akan akan lebih difokuskan pada pola hubungan dan keterkaitan antara pertanian dan ketahanan pangan.

Saat ini, isu keamanan pangan mengemuka dan menjadi salah satu agenda global yang mendapat perhatian khusus dunia internasional. Hal ini sebagai akibat dari meningkatnya pertumbuhan penduduk dunia yang tinggi, meningkatnya harga bahan pangan, penggunaan lahan sebagai sumber energi baru, penurunan produksi pertanian akibat perubahan iklim, serta menurunnya kesejahteraan masyarakat dunia, terutama di negara-negara berkembang. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melakukan langkah strategis dengan menyusun *Comprehensive Framework of Action* (CFA) oleh *High Level Task Force* (HLTF) on *Food Security* yang berada di bawah kendali langsung Sekjen PBB. Langkah ini diikuti oleh beberapa inisiatif kerjasama ketahanan pangan pada pertemuan-pertemuan tingkat tinggi, seperi G-20 dan ASEAN. Puncaknya adalah penyelenggaraan *World Summit on Food Security* pada bulan November 2009. Pertemuan tersebut menyepakati *Declaration of The World Summit on Food Security* yang secara garis besar menetapkan komitmen dan kesepakatan aksi bersama masyarakat global. Deklarasi tersebut juga menempatkan *Commite on World Food Security* (CFS) FAO sebagai landasan internasional yang inklusif untuk menghadapi isu ketahanan pangan dan nutrisi global, serta sebagai komponen utama dari proses menuju kemitraan global untuk pertanian, ketahanan pangan dan nutrisi. [62]

Dunia internasional secara keseluruhan telah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyaraat, namun masih ada sekitar 850 juta orang mengalami rawan pangan. Untuk mencapai ketahan pangan membutuhkan ketersediaan pangan yang memadai

[62]Web resmi Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. *Ketahanan Pangan*, diakses dari http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=9&l=id pada tanggal 31 Januari 2015.

Digital Repository Universitas Jember

dan akses yang mudah. Pertanian juga memainkan peran yang penting dalam hal memenuhi kebutuhan pangan, pertanian merupakan sumber ketersediaan pangan secara global (banyak negara yang berbasis pertanian), pertanian merupakan sumber penting pendapatan untuk membeli makanan, untuk mendapatkan makanan dengan status gizi yang tinggi.[63]

Food insecurity merupakan keadaan dimana manusia tidak memiliki ketersediaan makanan untuk dikonsumsi secara berkesinambungan. Makanan musiman hanya bisa dikonsumsi saat musim makanan tersebut sedang berlangsung. Sementara *food insecurity* bergantung pada ekonomi atau bencana alam yang memiliki dampak jangka panjang. Investasi dibidang pertanian penting untuk meningkatkan ketahanan pangan. Peningkatan produktivitas pertanian bisa meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan dan menurunkan harga pangan membuat makanan lebih mudah diakses oleh masyarakat miskin. Keuntungan produktivitas adalah kunci keamanan pangan di negara-negara yang kekurangan devisa atau infrastruktur terbatas untuk mengimpor pangan. Kontribusi pertanian membuat kebutuhan keamanan pangan harus dilengkapi dengan program jangka menengah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.[64]

Kebutuhan pangan ini bergantung pada ketersediaan pangan yang cukup dan stabil, akses ke makanan yang memadai dan sesuai serta memastikan konsumen mendapat gizi yang tepat. Kenaikan harga pada krisis pangan dunia pada pertengahan 1970-an diperburuk dengan cadangan devisa yang rendah dan pembatasan impor pangan. Kenaikan harga mendorong beberapa negara untuk introspeksi diri serta mendorong negara untuk melakukan swasembada pangan dalam negeri. Munculnya pasar internasional akan membentuk harga riil barang dan jasa yang lebih rendah, kondisi ini akan menstabilkan ketersediaan pangan dan harga pangan untuk sebagian besar negara. Meskipun demikian, kondisi ini belum bisa mengurangi kekurangan

---

[63] The World Bank. *What are the links between agricultural production and food security*, diakses dari http://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/477365-1327599046334/8394679-1327606607122/WDR08_07_Focus_C.pdf pada tanggal 1 Februari 2015.
[64] *Ibid*.

Digital Repository Universitas Jember

pangan di beberapa negara. Ketersediaan pangan masih menjadi perhatian di beberapa negara yang berbasis pertanian. Banyak negara yang menurun produksi pertaniannya untuk dikonsumsi. Menurunnya produksi di sektor pertanian ini disebabkan oleh perubahan iklim yang mempunyai peranan penting dalam produksi pertanian. [65]

Negara-negara yang mempunyai lahan pertanian yang besar menggantungkan ketahanan pangannya terhadap sektor pertaniannya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki peranan yang penting dalam menjaga kestabilan negaranya. Seperti sektor pertanian di India misalnya, mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap PDB India, namun kontribusi sektor pertanian tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat India.

Hal ini dibuktikan dengan setelah dimulainya Revolusi Hijau (*Green Revolution*) di India pada tahun 1960-an, produksi biji-bijian seperti beras dan gandum memang meningkat di India. Namun, jumlah populasi yang kelaparan dan kekurangan gizi masih cukup tinggi di India yang dikarenakan oleh meningkatnya populasi India yang juga mengalami peningkatan.[66] Hal ini tentu membuat pemerintah untuk memperjuangkan hak masyarakatnya, yaitu hak untuk mendapatkan akses pangan yang mudah, termasuk memperjuangkannya di dunia internasional.

---

[65] *Ibid*.
[66] NBR. 2014. *Feeding A Billion: Agriculture and food security in India*, diakses dari http://nbr.org/research/activity.aspx?id=402 pada tanggal 22 Juni 2015.

Digital Repository Universitas Jember

BAB 3. HUBUNGAN INDIA DAN WTO HINGGA PADA KONFERENSI TINGKAT MENTERI WTO KE-9 DI BALI

Dalam bab ini akan dijelaskan hubungan antara India dengan WTO mulai dari bergabungnya India pada tahun 1995 hingga pada Konferensi Tingkat Menteri di Bali pada tanggal 3-6 Desember 2013. Dalam bab ini juga akan dijelaskan tentang proposal yang diajukan India pada KTM di Bali yang berkaitan dengan pertanian dan ketahanan pangan India.

3.1. Sejarah Hubungan India dan WTO

Organisasi Perdagangan Internasional (*World Trade Organization*/WTO) berdiri sejak tahun 1995 dan menjadi organisasi internasional yang termuda usianya. WTO merupakan kelanjutan dari Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariffs and Trade*/GATT) yang didirikan setelah perang dunia ke-2, yaitu pada tahun 1948 di Jenewa, Swiss. Berdirinya GATT ini juga merupakan awal berlakunya sistem perdagangan multilateral antar negara. GATT dan WTO telah membantu menciptakan sistem perdagangan yang kuat dan makmur dan memberikan kontribusi terhadap perdagangan internasional. Sistem yang dikembangkan oleh GATT adalah sistem negosiasi perdagangan, atau pertemuan yang diadakan di bawah naungan GATT. Pertemuan terakhir yang dilakukan oleh GATT adalah Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) yang dilaksanakan pada tahun 1986 dan berakhir pada tahun 1994. Setelah berakhirnya Putaran Uruguay yang juga berakhirnya organisasi GATT, kemudian dibentuklah WTO yang merupakan kelanjutan dari GATT.[67]

WTO adalah organisasi untuk membuka perdagangan antar negara. WTO juga merupakan forum bagi pemerintah yang menjadi anggota WTO untuk bernegosiasi tentang perdagangan. Pada intinya WTO merupakan organisasi yang mencoba

[67] WTO. 2014. *The World Trade Organization*. Diakses dari https://www.wto.org/ENGLISH/res_e/doload_e/inbr_e.pdf pada tanggal 26 Februari 2015.

Digital Repository Universitas Jember

menyelesaikan permasalahan perdagangan yang dihadapi oleh anggota WTO. Sebagian besar pekerjaan yang dilakukan oleh WTO saat ini merupakan permasalahan yang dibahas pada saat Putaran Uruguay yang dilakukan oleh GATT. Tahun 2001 anggota WTO mengadakan pertemuan yang biasa disebut dengan Agenda Pembangunan Doha (*Doha Development Agenda*). Pada saat dilaksanakannya Agenda Doha tersebut, negara di dunia banyak yang mengalami permasalahan yang berhubungan dengan perdagangan dunia. Adanya permasalahan tersebut membuat WTO melahirkan perjanjian-perjanjian internasional yang disetujui oleh negara anggota yang berisi tentang dasar hukum untuk perdagangan internasional. Pada dasarnya perjanjian tersebut bisa dikatakan sebagai kontrak yang mengikat pemerintah untuk menjaga kebijakan perdagangan mereka sesuai dengan batas yang sudah disepakati.[68]

Tujuan utama dari WTO adalah untuk memperlancar arus perdagangan yang bebas, adil, dan terencana. Hal itu dilakukan dengan cara:[69]

1. Mengelola perjanjian perdagangan
2. Bertindak sebagai forum untuk negosiasi perdagangan
3. Menyelesaikan perselisihan perdagangan
4. Meninjau kebijakan perdagangan nasional
5. Membantu negara berkembang dalam masalah kebijakan melalui bantuak teknis dan program pelatihan
6. Bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya.

Struktur tertinggi WTO adalah Konferensi Tingkat Menteri (KTM) (*Ministerial Conference*), dimana pertemuan KTM diadakan dua tahun sekali dan dihadiri oleh seluruh anggota WTO. Tingkat kedua dalam struktur WTO adalah Dewan Umum (*The General Council*) yang pengambilan keputusannya selalu dilaksanakan pada pertengahan pertemuan KTM. Tingkat ketiga dalam struktur WTO

---

[68] WTO. *Understanding WTO: Who We Are*, diakses dari http://wto.org/english/thewto_e/whatis_e/who_we_are_e.htm pada tanggal 17 Frebruari 2015.
[69] WTO. Loc. Cit.

Digital Repository Universitas Jember

adalah Dewan Perdagangan (*The Trade Council*) yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan internasional. Tingkat terakhir dalam struktur WTO adalah *Subsidiary Bodies* adalah anak perusahaan di bawah berbagai dewan yang berhubungan dengan subjek tertentu, seperti pertanian, subsidi, dan akses pasar.[70] Selengkapnya seperti yang terlihat dalam bagan organisasi WTO berikut:

[70] Web Trade Chakra. WTO, diakses dari http://www.tradechakra.com/indian-economy/india-wto.html pada tanggal 19 Februari 2015.

Digital Repository Universitas Jember

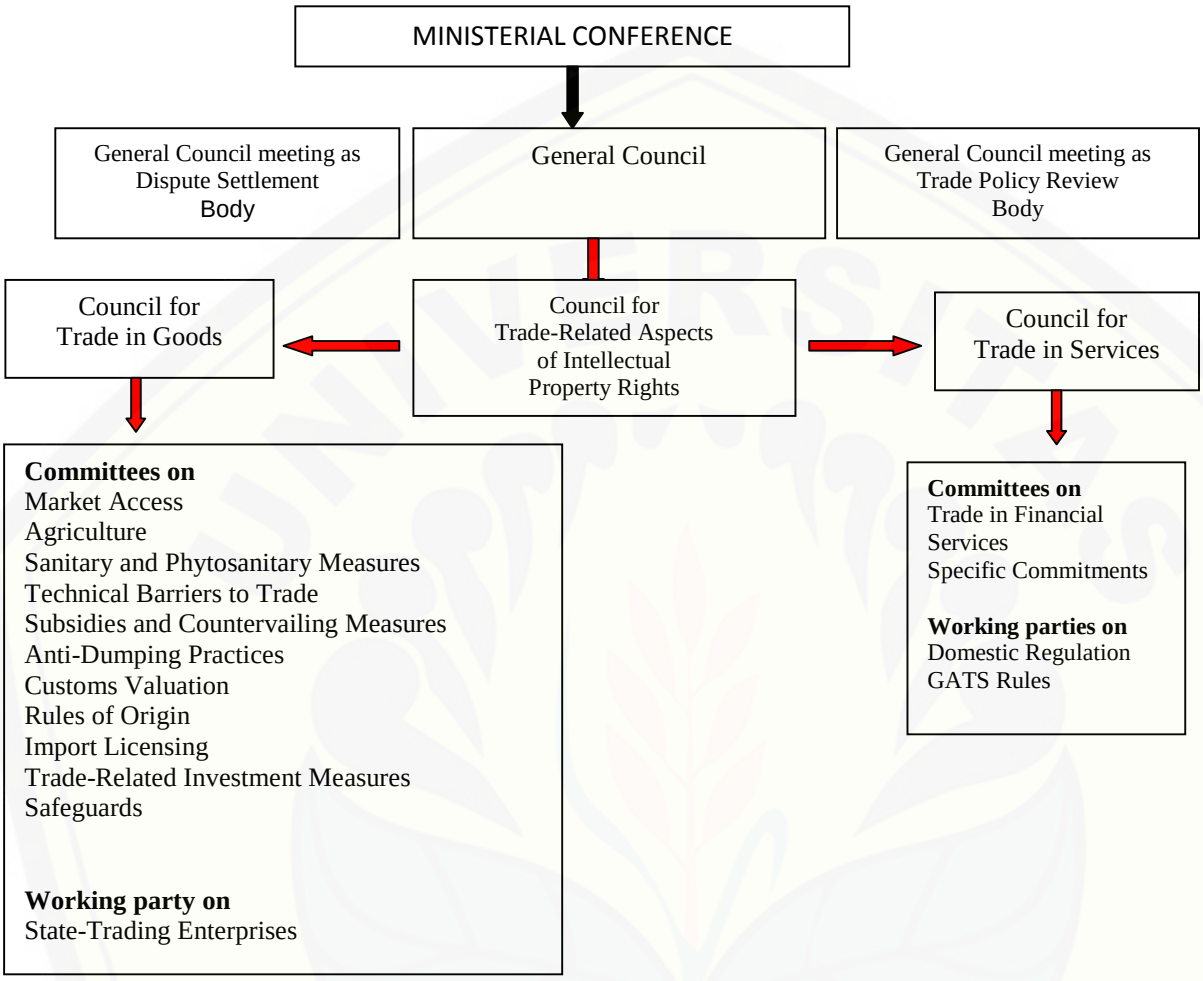

Gambar 3.1 Bagan Struktur WTO

Sumber: Web resmi WTO[71]

Keterangan:

Memberikan laporan kepada Dewan Umum (*General Council*)/ *Subsidiary*

[71] WTO. *Understanding The WTO: WTO Organization Chart*, diakses dari https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org2_e.htm pada tanggal 26 Februari 2015.

Digital Repository Universitas Jember

WTO menetapkan prinsip untuk kebijakan perdagangan, yang terdiri dari:[72]

1. Non-diskriminasi (*non discrimination*) yang terdiri dua komponen utama, yaitu *Most-Favored-Nation* (MFN) dan *National Treatment Principal*. Keduanya tertuang dalam aturan utama WTO dalam bidang barang, jasa, intelektual, properti. Aturan MNF adalah kebijakan yang tidak membedakan antara pemasok asing, importir, dan konsumen akan memiliki dorongan menggunakan barang luar negeri dengan harga rendah. Aturan MFN juga meyakinkan negara berkembang bahwa negara-negara maju tidak akan mengeksplotasi kekuatan pasar mereka dengan menaikkan tarif . Sedangkan *National Treatment* memastikan bahwa komitmen liberalisasi dijalankan dengan tidak melakukan pembedaan pajak dalam negeri. Aturan ini berlaku untuk pajak dan kebijakan lainnya yang harus diterapkan secara non-diskriminasi baik untuk produk dalam negeri dan produk luar negeri.
2. Timbal-balik (*reciprocity*) adalah elemen fundamental dari proses negosiasi. Hal ini dilakukan untuk membatasi ruang lingkup *free-riding* yang mungkin timbul karena aturan MFN dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari liberalisasi perdagangan dalam bentuk akses yang lebih baik ke pasar luar negeri.
3. Komitmen yang mengikat dan dapat dilaksanakan (*Binding and Enforceable Commitments*), jika keputusan suatu negara mempengaruhi komitmen negosiasi atau aturan WTO lainnya dapat membuat situasi ini mendapat perhatian dari pemerintah yang terlibat dan bisa meminta kebijakan untuk dirubah. Jika keputusan yang dihasilkan tidak memuaskan, negara dapat menyelesaikan permasalahan tersebut melalui prosedur WTO.
4. Transparansi (*Transparency*) adalah pilar dasar dari WTO. WTO diwajibkan untuk mempublikasikan peraturan perdagangan mereka, untuk membangun

[72]Bernard Hoekman, AadityaMattoo, and Philip English. 2002. *Development, Trade, and The WTO: A Handbook*. The World Bank.Wshington DC. Hal 42-44.

Digital Repository Universitas Jember

dan memelihara lembaga. Hal ini dilakukan untuk melihat kembali keputusan administratif yang mempengaruhi perdagangan, untuk menanggapi permintaan informasi oleh anggota lain, dan untuk memberitahukan perubahan kebijakan perdagangan WTO. Persyaratan transparansi internal dilengkapi dengan pengawasan kebijakan perdagangan multilateral oleh anggota WTO, difasilitas dengan laporan khusus oleh negara secara berkelanjutan yang disiapkan sekertariat WTO yang nantinya akan dibahas dalam Dewan Umum WTO (WTO *General Council*). Pengawasan eksternal juga mendorong adanya transparansi, baik untuk warga negara yang bersangkutan dan mitra perdagangan.

5. *Safety Valves* merupakan prinsip akhir yang diwujudkan dalam WTO, yang berarti bahwa dalam keadaan tertentu pemerintah harus membatasi perdagangan. Ada tiga jenis ketentuan dalam hal ini, yaitu: (a) artikel yang memungkinkan untuk penggunaan langkah-langkah perdagangan untuk mencapai tujuan non-ekonomi. Maksudknya adalah ketentuan tersebut memungkinkan kebijakan untuk melindungi kesehatan masyarakat atau keamanan nasional, dan untuk melindungi industri yang terkena dampak dari persaingan impor. (b) artikel yang bertujuan untuk memastikan kompetisi yang adil mencakup hak untuk menentukan tugas *countervailing* impor yang telah disubsidi dan tugas antidumping terhadap barang impor (dijual dengan harga di bawah dari harga dalam negeri). Ketentuan terakhir dalam *safety valves* adalah (c) ketentuan yang memungkinkan intervensi dalam perdagangan untuk alasan ekonomi, yaitu ketentuan yang memungkinkan tindakan yang akan diambil dalam kasus kesulitan pembayaran.

Anggota yang tergabung dalam WTO harus mematuhi prinsip-prinsip yang tertuang dalam WTO. Negara-negara yang bergabung dalam WTO terhitung pada bulan Juni 2014 berjumlah 160 anggota, salah satunya adalah India. India tergabung dalam WTO sejak 1 Januari 1995, di mana sebelumnya India tergabung dengan organisasi GATT pada 8 Juli 1948. India merupakan salah satu anggota pendiri WO

Digital Repository Universitas Jember

bersama 134 negara lainnya. Partisipasi India dalam sistem yang berbasis aturan ini telah membuat pemerintah India harus mematuhi peraturan tersebut dengan harapan tercapainya bangsa yang lebih baik dan makmur. Berbagai sengketa yang dihadapi India dengan negara-negara lainnya juga diselesaikan oleh WTO sesuai dengan aturan yang ada. India juga mempunyai peran penting dalam perumusan keputusan yang efektif dalam bidang perdagangan. Dengan menjadi anggota WTO, telah membuat India bekerjasama dengan negara-negara lainnya yang memberikan dorongan kepada India dalam hal produksi, tenaga kerja, standar hidup, dan kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya secara maksimal.[73]

Pemerintah India menjelaskan bahwa India mendapatkan manfaat dari bergabungnya India dengan WTO. Menurut laporan resmi pemerintah India, ekspor India meningkat dua kali lipat dari tahun 1995-2003. Bergabungnya India dengan WTO juga membuat India harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah disetujui oleh semua anggota WTO. Selain mendapat keuntungan bagi India bergabung dengan WTO, India juga mengalami beberapa masalah dalam hal Perjanjian Perdagangan Multilateral. Diantaranya adalah:[74]

1. Dominasi negara-negara maju dalam negosiasi dan memanfaatkan negara-negara berkembang.
2. Keterbatasan sumber daya dan kemampuan negara berkembang seperti India untuk memahami dan bernegosiasi di bawah berbagai aturan yang dibuat oleh WTO.
3. Ketidakseimbangan sumber daya antara negara maju dan negara berkembang sehingga menyebabkan distorsi dalam melaksanakan berbagai keputusan.
4. Keefektifan yang dipertanyakan dalam pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat.
5. Hambatan non-tarif yang dibuat oleh negara maju.

---

[73]Web Trade Chakra. *Op. Cit*.

[74]R.K. Gupta. 2005. *WTO and implication for Indian Economy-A Review*, diakses dari http://www.indianmba.com/Faculty_Column/FC218/fc218.html pada tanggal 26 Februari 2015.

Digital Repository Universitas Jember

6. Ketidaktepatan implementasi Agenda Pembangunan Doha (*Doha Development Agenda*).
7. Pertanian merupakan sektor yang diperebutkan banyak negara, seperti Perancis, Jepang, dan beberapa negara lainnya yang tidak mengalah dalam hal bantuan domestik untuk petani dan ekspor produk pertanian.

India merupakan negara paling awal yang bergabung dengan WTO dan mengikuti segala perkembangan yang terjadi di WTO. Selain India mendapat keuntungan saat bergabung dengan WTO, India juga mendapat banyak tantangan dalam hal implementasi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh WTO dan telah disepakati oleh anggota WTO. Kebijakan yang dibuat oleh WTO dirasa kurang menguntungkan bagi negara berkembang, termasuk India. Kebijakan tersebut salah satunya adalah kebijakan yang berkaitan dengan pertanain, atau yang biasa disebut dengan Perjanjian dalam Pertanian (*Agreement on Agriculture*/AoA).

AoA merupakan produk terakhir dari Putaran Uruguay dalam Negosiasi Perdagangan Multilateral (*Multilateral Trade Negotiations*) yang ditandatangani oleh negara-negara anggota WTO pada bulan April 1994 di Marakesh, Maroko. Perjanjian tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Perjanjian ini merupakan titik terpenting dalam perkembangan perdagangan internasional dibidang pertanian. Perjanjian yang dihasilkan dalam Putaran Uruguay berusaha untuk menertibkan sistem perdagangan internasional dan menciptakan persaingan yang adil di sektor pertanian dengan sistem yang adil dan berorientasi pasar.

Salah satu dampak dari AoA terhadap pertanian India adalah bahwa India telah mempertahankan pembatasan kuantitaif (*Quantitative Restriction*/QRs) pada produk impor pertanian. Sementara itu, berdasarkan ketentuan akses pasar, QRs harus dihilangkan terakhir pada tanggal 1 April 2001. Peraturan tersebut membuat para petani terpaksa untuk menjual lahan pertanian mereka untuk perusahaan multinasional dengan harga yang sangat rendah dan menyebabkan para petani di India kehilangan lapangan pekerjaan dan tidak mampu membeli produk impor pertanian yang dikarenakan oleh berkurangnya pendapatan mereka. Hal ini semakin

Digital Repository Universitas Jember

mendistorsi pertanian domestik dan perekonomian pedesaan yang sebagian besar bergantung pada pertanian untuk kelangsungan hidup masyarakat India. Hal ini jelas menunjukkan bahwa AoA lebih bermanfaat untuk negara-ngara maju, yaitu peluang untuk membuka pasar baru bagi negara maju dan mengeskploitasi produk pertanian dengan harga murah. Selain itu, ada aturan AoA yang membatasi negara-negara berkembang untuk memberikan subsidi kepada petani mereka. Di mana dalam aturan AoA dituliskan bahwa subsidi untuk pertanian hanya boleh diberikan sebesar 10% dari total produksi. Dengan adanya pembatasan tersebut, petani tidak akan bisa memenuhi kebutuhan mereka dalam bidang pertanian, seperti untuk membeli pupuk, pengadaan bibit unggul, serta pelatihan dalam bidang pertanian.[75]

Akar penyebab utama terjadinya distorsi perdagangan internasional dalam bidang pertanian adalah subsidi domestik secara berlebihan di sektor pertanian yang diberikan negara-negara industri selama bertahun-tahun. Hal ini menyebabkan produksi berlebihan dan praktik dumping di pasar internasional. Oleh karena itu, untuk mewujudkan perdagangan internasional di bidang pertanian secara adil, maka diperlukan pengurangan subsidi produksi pertanian di negara-negara industri, dan penurunan jumlah ekspor bersubsidi.[76]

Lebih dari setengah dari populasi India masih bergantung pada pertanian, untuk itu pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan industrialisasi dan juga meningkatkan teknologi pertanian. Oleh karena itu, pertanian tetap menjadi sektor penting untuk kelangsungan hidup masyarakat India dan juga merupakan sektor yang menyumbang terhadap prekonomian India. Adanya kemandirian dalam bidang pertanian akan memiliki dampak positif terhadap peningkatan PDB India. Oleh karena itu, penting bagi India untuk memberikan subsidi domestik untuk bidang pertanian dan dalam jangka panjang akan menjamin ketahanan pangan India. Selain

---

[75] UK Essay. *Agreement on Agriculture and It's Impact On India Economics*, diakses dari http://www.ukessays.com/essays/economics/agreement-on-agriculture-and-its-impact-on-india-economics-essay.php pada tanggal 23 Juni 2015.

[76] Ministry of Commerce, Govt. of India. 1999. "*WTO Agreement on Agriculture and Its Implication*". Focus On Agriculture. Vol.1 No. 5.

Digital Repository Universitas Jember

untuk menjamin ketahanan pangan, adanya subsidi domestik juga akan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat India dibidang pertanian. Oleh karena itu Pemerintah India dalam KTM WTO ke-9 di Bali meminta supaya subsidi dalam bidang pertanian dinaikkan dari 10% menjadi 15% dari total subsidi. India mengajukan permintaan tersebut, supaya India tidak melanggar peraturan yang sudah ada.

India dalam proposalnya, yang biasa disebut dengan Proposal G33 meminta supaya WTO menaikkan subsidi untuk pertanian dari 10% menjadi 15% dari total produksi nasional dan tanpa batasan waktu atau dijadikan peraturan yang permanen. Argumen utama dalam Proposal G33 adalah peraturan WTO tidak memberikan ruang kebijakan yang cukup bagi negara berkembang utnuk memenuhi kebutuhan pangan negara-negara berkembang, sedangkan negara maju bisa menggunakan distorsi kebijakan perdagangan dengan tanpa ada keterbatasan. India berpendapat bahwa usaha pengadaan stok pangan dari petani yang berpendapatan rendah dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, merupakan bagian penting dari upaya mereka untuk memastikan keamanan pangan dapat dicapai.[77]

3.2. Proposal yang Diajukan India Dalam KTM WTO ke-9 di Bali

Dalam sub-bab ini akan dijelaskan tentang proposal yang diajukan India dalam KTM WTO ke-9 di Bali pada tanggal 3-6 Desember 2013, namun karena sempat terjadi *deadlock* di hari terakhir pertemuan tersebut, maka KTM tersebut diperpanjang hingga tanggal 7 Desember 2013. *Deadlock* tersebut terjadi karena belum ditemukannya kesepakatan antara negara berkembang dan negara maju.

---

[77] FAO. *FAO Trade Policy Briefs: on issues related to the WTO negosiation on agriculture*, diakses dari http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CEMQFjAEahUKEwiSt5fh5pXGAhXYtrwKHYuxAPE&url=http%3A%2F%2Fwww.fao.org%2Fdocrep%2F019%2Fi3658e%2Fi3658e.pdf&ei=reuAVdKsFdjt8gWL44KIDw&usg=AFQjCNESBv79CgRLFXZ3vl4F9B6Np2Eiwg&sig2=i3lPsSRVnYOsZgN2pTUtyg&bvm=bv.96041959,d.dGc pada tanggal 17 Juni 2015.

Digital Repository Universitas Jember

Berikut akan dijelaskan hal-hal yang menyebabkan *deadlock* pada KTM WTO ke-9 di Bali tahun 2013.

Konferensi Tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) merupakan tingkat paling tinggi dalam pengambilan keputusan di WTO dan KTM biasanya diadakan setiap dua tahun sekali. Dalam KTM tersebut, semua anggota negara hadir dalam KTM WTO. KTM WTO juga merupakan pengambilan keputusan paling tinggi dalam semua permasalahan di bawah perjanjian perdagangan multilateral. KTM WTO yang terakhir adalah KTM yang diadakan di Bali, Indonesia pada tanggal 3-7 Desember 2013. Sebelum diadakan di Bali, KTM WTO diadakan di Singapore pada tanggal 9-13 Desember 1996, Geneva pada tanggal 18-20 Mei 1998, Seattle pada tanggal 30 November-3 Desember 1999, Doha pada tangal 9-13 November 2001, Cancun(Mexico) pada tangal 10-14 September 2003, Hong Kong pada tanggal 13-18 Desember 2005, Geneva pada tanggal 30 November-2 Desember 2009, Geneva pada tanggal 15-17 Desember 2011, Bali pada tanggal 3-7 Desember 2013, dan yang akan datang dilaksanakan pada tanggal 15-18 Desember 2015 di Nairobi.[78]

Sebelum pelaksanaan KTM WTO ke-9 di Bali, Indonesia, KTM yang dilaksanakan di Uruguay, dan Doha merupakan KTM yang dianggap paling berpengaruh dalam perdagangan internasional. Dalam KTM WTO di Uruguay dihasilkan beberapa sektor yang harus mendapat perhatian lebih dari WTO, yaitu pertanian, pelayanan (*service*), *intellectual property*, tekstil, dan investasi. Dalam Putaran Uruguay, pertanian merupakan sektor yang paling banyak mendapat perhatian. Meskipun sektor pertanian hanya mendapatkan porsi 13% saja dari total perdagangan internasional, namun pertanian tetap harus mendapat perhatian khusus dan dilindungi. Di sektor pertanian disepakati bahwa subsidi ekspor harus dikurangi selama 6 tahun sebesar 36% dalam periode 1986-1990, dan jumlah subsidi ekspor harus dipotong sebesar 21%. Dukungan untuk pertanian dalam negeri akan berkurang

[78]WTO. *Ministerial Conference*, diakses dari https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/minist_e.htm pada tanggal 5 Maret 2015.

Digital Repository Universitas Jember

sebesar 20% di negara-negara maju dan 13,3% di negara berkembang.[79] Hal ini tentu akan memberatkan negara-negara berkembang, karena pemerintah tidak bisa membantu petani berpenghasilan rendah. Sedangkan, apabila petani domestik tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, tentu hal tersebut akan berdampak pada ketahanan pangan negara berkembang.

Putaran Doha merupakan KTM WTO ke-4 yang diadakan pada bulan November 2001 di Doha, Qatar. Tujuan dari Putaran Doha ini adalah untuk mereformasi sistem perdagangan internasional melalui pengenalan hambatan perdagangan dan aturan-aturan perdagangan internasional. Program kerja yang dibahas dalam Putaran Doha mencakup 20 bidang perdagangan, termasuk pertanian dan jasa.[80] Pertanian merupakan landasan dari Putaran Doha, karena tingkat keterlibatan negara terhadap sektor pertanian tersebut cukup besar. Negosiasi pertanian mencakup tiga pilar, yaitu: dukungan domestik (subsidi), akses pasar (rezim impor, termasuk tarif), dan persaingan ekspor (restitusi ekspor, kredit ekspor, dan bantuan pangan).

Suara India dalam negosiasi perdagangan internasional sering kali yang paling lantang, terlebih lagi dibidang pertanian. Seperti yang kita ketahui bahwa India sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah di bidang pertanian. Alasan pemerintah India memberikan perhatian khusus terhadap bidang pertanian ini adalah karena penduduk India yang berjumlah lebih dari 1,2 miliar membutuhkan kepastian tentang terpenuhinya kebutuhan pangan mereka. Pemerintah India berusaha memenuhi kebutuhan penduduknya tersebut dengan cara melakukan negosiasi di dunia internasional, terlebih lagi di organisasi internasional yang menyangkut tentang perdagangan internasional yang mempunyai dampak terhadap ketahanan pangan India. Oleh karena itu, India yang mengajukan proposal G33 dalam KTM WTO ke-9 di Bali, Indonesia pada tahun 2013.

---

[79]Wayne Sandiford. *GATT and The Uruguay Round*, diakses dari http://www.eccb-centralbank.org/Rsch_Papers/Rpmar94.pdf pada tanggal 23 Maret 2015.

[80]Kamal Saggi. 2010. *India at The WTO: From Uruguay to Doha and Beyond*. Stanford University. Working Paper no. 425.

Digital Repository Universitas Jember

Dari seluruh pelaksanaan KTM tersebut, KTM yang dilaksanakan di Bali merupakan KTM yang berhasil melahirkan sebuah kesepakatan, di mana setelah pelaksanaan KTM WTO di Doha, KTM selanjutnya tidak melahirkan suatu kesepakatan/perjanjian yang pasti tentang isu yang sudah diagendakan dalam KTM Doha. Dalam KTM Doha tersebut telah dibuat perjanjian-perjanjian baru dalam dunia perdagangan, namun dalam pelaksanaannya selama 12 tahun (2001-2013) belum terlihat hasil yang signifikan. Oleh karena itu, dalam KTM WTO di Bali pada tahun 2013 banyak negara anggota WTO yang mengharapkan hasil dari pertemuan di Bali tersebut. Akhirnya setelah perundingan yang cukup alot dihasilkan sebuah perjanjian baru yang biasa disebut dengan Paket Bali (*Bali Package*). Namun,sebelum dihasilkannya perjanjian baru tersebut, India tidak menyetujui isi dari Paket Bali tersebut dan membuat pertemuan KTM diperpanjang hingga tanggal 7 Desember 2013.

Dalam KTM tersebut, India yang diwakili oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian, Anand Sharma, meminta WTO untuk merevisi kembali isi dari perjanjian Paket Bali. Anand Sharma mengharapkan WTO untuk mewujudkan perdagangan global dengan sistem multilateral yang sudah diagendakan sejak Putaran Doha. Namun menurut Anand, Paket Bali tersebut hanya akan menguntungkan negara-negara maju. Meskipun anggota lainnya sudah menyepakati Paket Bali tersebut seperti negara-negara Afrika dan negara-negara maju lainnya, namun India tetap bersikeras untuk memperjuangkan aspirasinya yang dituangkan dalam sebuah proposal yang biasa disebut dengan Proposal G33. Alasan India menolak perjanjian Paket Bali adalah, yang pertama India menginginkan tidak ada batasan waktu untuk subsidi pertanian domestik dari 10% menjadi 15%, dan yang kedua adalah India mendesak agar besaran harga ditentukan bukan berdasarkan harga ketika Putaran Uruguay 1986, tetapi disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran.[81]

---

[81]Indopos. 2013. *India Paling Keras Menolak Paket Bali,* diakses dari http://www.indopos.co.id/2013/12/india-paling-keras-menolak-paket-bali.html pada tanggal 9 Maret 2015.

Digital Repository Universitas Jember

Seperti yang kita ketahui, bahwa India merupakan negara dengan jumlah populasi terbesar kedua di dunia. India sebagai negara berkembang sedang berusaha membuat penduduknya mendapatkan standar hidup yang lebih baik. Pemerintah menyadari bahwa banyak masyarakatnya masih berada di bawah garis miskin, oleh karena itu Pemerintah India fokus terhadap subsidi pertanian dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian India. Namun, subsidi yang diberikan oleh pemerintah India terhadap sektor pertanian masih terganjal dengan peraturan yang dibuat oleh WTO. Peraturan yang diberlakukan oleh WTO adalah pemerintah boleh memberikan subsidi sebesar 10% terhadap sektor pertanian. Namun, subsidi sebesar 10% belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat India. Oleh karena itu Pemerintah India menginginkan peningkatan subsidi di sektor pertanian dari 10% menjadi 15% dan tanpa batasan waktu. Sementara negara-negara maju yang tergabung dalam anggota WTO menginginkan supaya subsidi tersebut dihapuskan.

Ada dua alasan mengapa India tetap memberikan subsidi terhadap sektor pertanian. Pertama, subsidi pertanian di negara-negara maju bukan menjadi bahasan utama dalam setiap pertemuan WTO, jadi tidak ada alasan bagi negara maju untuk membatasi negara-negara berkembang dari subsidi. India menyerukan keadilan dan perlakuan yang sama di bawah perjanjian yang dibuat oleh WTO, serta hak-hak asasi manusia yang sama di dunia. Kedua, subsidi pertanian akan meningkatkan ketahanan pangan negara. Seperti yang kita ketahui bahwa India memiliki jumlah populasi yang banyak, namun tidak memiliki cukup persedaiaan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya.[82] Jika subsidi untuk pertanian diberhentikan atau dihapuskan, maka pemerintah India khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya.

Sebelum KTM WTO ke-9 di Bali, anggota WTO yang terdiri dari negara-negara berkembang mengadakan pertemuan singkat untuk mencari fleksibilitas

[82]Web Global EDGE. 2013. *India's Farm Subsidies Effect on International Trade*, diakses dari http://globaledge.msu.edu/blog/post/1613/india%E2%80%99s-farm-subsidies-effect-on-international-trade pada tanggal 10 Maret 2015.

Digital Repository Universitas Jember

tambahan dalam perdagangan global di sektor pertanian. Negara-negara berkembang yang mengadakan pertemuan tersebut biasa disebut dengan kelompok G33 melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan dalam KTM WTO ke-9 di Bali pada tanggal 3-6 Desember 2013. Negara-negara berkembang tersebut berasumsi bahwa isu-isu perdagangan di sektor pertanian perlu dibahas untuk keseimbangan dalam fasilitas perdagangan (*trade facilitation*) yang menyangkut hal pengurangan pembatasan dan birokrasi di bea cukai untuk memudahkan pergerakan barang dan jasa di pasar internasional. Usulan dari G33 ini semuanya berhubungan dengan pertanian. Perubahan-perubahan yang diusulkan diharapkan akan mempermudah persyaratan untuk bantuan pangan dalam negeri dan program pasokan makanan dangan harga yang murah dan bisa diakses kapanpun. [83]

Pasokan pangan memegang peranan penting di negara berkembang, sedangkan harga pasokan pangan mahal, sehingga harus ada solusi untuk mengatasi hal tersebut. Namun, karena adanya aturan dari WTO yang menginginkan menghapuskan subsidi untuk pertanian di negara berkembang, banyak negara berkembang khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya, termasuk India. Oleh karena itu, India mengajukan proposal kepada WTO dengan mengatasnamakan G33. Latar belakang pengajuan proposal G33 adalah adanya perjanjian AoA yang membatasi negara berkembang untuk memberikan dukungan kepada para petani miskin. Selain itu, harga pangan dunia masih ditentukan dari referensi harga pasar dunia pada tahun 1986-1988. Jadi inti dari proposal G33 ini adalah pembelian pemerintah terhadap pasokan pangan dengan tujuan untuk ketahanan pangan dan membantu produsen berpenghasilan rendah, dan tidak masuk dalam perhitungan *Aggregat Measurement of Support*/AMS. Ada beberapa perubahan yang diajukan oleh India, yaitu:

---

[83]FAO. 2013. G33 Proposal: *Early Agreement on Elements of The Draft Doha Accord To Address Food Security*, diakses dari http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/PUBLICATIONS/g33-proposal-early-agreement-on-elements-of-the-draft-doha-accord-to-address-food-security_1_.pdf. Pada tanggal 11 Maret 2015.

Digital Repository Universitas Jember

Perubahan pertama yang diajukan oleh G33 adalah menyertakan sebuah kategori tambahan untuk mengembangkan program pembayaran yang ada di bawah kotak hijau (*green box*[84]). Kategori ini digunakan oleh pemerintah untuk melaporkan tindakan distorsi di bidang penelitian, pengendalian hama dan penyakit, penyuluhan dan konsultasi, dan beberapa jenis pembayaran infrastruktur. G33 mengusulkan kategori tambahan yaitu:

> *"Policies and services related to farmer settlement, land reform programmes, rural development and rural livelihood security in developing country members, such as provision of infrastructural services, land rehabilitation, soil conservation and resource management, drought management and flood control, rural employment programmes, nutritional food security, issuance of property titles and settlement programmes, to promote rural development and poverty alleviation*."[85]

Maksud dari usulan tersebut adalah G33 menginginkan adanya kategori tambahan untuk mengembangkan program-program yang terdapat di dalam kotak hijau, seperti kebijakan dan layanan yang terkait dengan penyelesaian pemukiman petani, pembangunan pedesaan dan keamanan mata pencaharian pedesaan di negara-negara berkembang. Adapun program tersebut adalah penyediaan layanan infrastruktur, rehabilitasi lahan, konservasi pengelolaan daya, pengendalian kekeringan dan banjir, program kerja pdesaan, pemenuhan gizi untuk ketahanan pangan. Hal tersebut dilakukan untuk mengembangkan pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan.

Perubahan kedua yang diajukan oleh G33 adalah pasokan pangan untuk negara-negara berkembang untuk kepentingan ketahanan pangan, yang juga bertujuan

---

[84] Dalam terminologi subsidi dalam WTO secara umum diidentifikasikan dengan "kotak/*box*". Terdapat beberapa warna kotak seperti warna kuning yang berkaitan dengan tingkat produksi, warna biru untuk program pembatasan produksi yang menghambat perdagangan, dan warna hijau yaitu berkaitan dengan subsidi yang tidak mengganggu perdagangan, subsidi dari kotak hijau diperbolehkan tanpa batas asalkan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Diakses dari https://www.wto.org/english/tratop_e/agric_e/negs_bkgrnd07_domestic_e.htm pada tanggal 18 Maret 2015.

[85] FAO. Op. Cit.

Digital Repository Universitas Jember

untuk merubah kebutuhan dalam pembelian makanan bersubsidi . anggota WTO yang bersangkutan tidak harus menyetujui usulan G33, jika pembelian tersebut dilakukan untuk produsen yang berpenghasilan rendah. Seperti yang tertulis berikut:

> "*For the purposes of paragraph 3 of this Annex, governmental stockholding programmes for food security purposes in developing countries whose operation is transparent and conducted in accordance with officially published objective criteria or guidelines shall be considered to be in conformity with the provisions of this paragraph, including programmes under which stocks of foodstuffs for food security purposes are acquired and released at administered prices, provided that the difference between the acquisition price and the external reference price is accounted for in the AMS. However, acquisition of stocks of foodstuffs by developing country Members with the objective of supporting low-income or resource-poor producers shall not be required to be accounted for in the AMS*."[86]

Perubahan yang diajukan oleh G33 seperti yang tertulis di atas adalah terkait dengan program pasokan pangan untuk negara-negara berkembang yang tertulis dalam AMS (*Agregate Measure of Suport*). G33 menginginkan perubahan dalam ayat 3 dalam lampiran tersebut, yaitu tentang program pasokan pangan negara berkembang untuk tujuan ketahanan pangan yang harus dilaksanakan dengan transparan dan dilakukan sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat.

Perubahan ketiga yang diajukan oleh G33 adalah berhubungan dengan catatan kaki untuk persyaratan pasokan pangan dan bantuan pangan dalam negeri, yaitu:

> "*For the purposes of paragraphs 3 and 4 of this Annex,* ***the acquisition of foodstuffs at subsidised prices when procured generally from low-income or resource-poor producers in developing countries with the objective of fighting hunger and rural poverty, as well as*** *the provision of foodstuffs at subsidised prices with the objective of meeting food requirements of urban and rural poor in developing countries on a regular basis at reasonable prices shall be considered to be in conformity with the provisions of this paragraph.* ***This is understood to mean, inter alia, that where such programmes referred to in this footnote***

[86] *Ibid*.

Digital Repository Universitas Jember

> ***and paragraph 4 above, including those in relation to lowering prices to more reasonable levels, involve also the arrangements referred to in footnote 5 to paragraph 3, there is no requirement for the difference between the acquisition price and the external reference price to be accounted for in the AMS***."[87]

Usulan terakhir yang diusulkan oleh G33 adalah tentang perolehan bahan makanan yang diperoleh dari produsen berpendapatan rendah dengan tujuan memerangi kelaparan dan kemiskinan. Selain itu juga terkait dengan persediaan makanan dengan harga subsidi yang bisa diakses oleh masyarakat dengan tujuan ketahanan pangan di perkotaan dan pedesaan di negara berkembang.

Usulan G33 ini harus dilihat secara luas, dimana negara-negara berkembang berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan perdagangan pertanian baru, serta kegagalan reformasi untuk mencapai kemajuan dalam sistem perdagangan multilateral sejak akhir Putaran Uruguay. Hal ini juga dilihat sebagai indikasi komitmen negara berkembang untuk memastikan bahwa aturan perdagangan dan kebijakan perdagangan berkontribusi terhadap kemajuan negara berkembang, terutama dalam bidang ketahanan pangan.

3.3. KTM WTO Ke-9 dan Paket Bali

Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO yang ke-9 diadakan di Bali pada tanggal 3-7 Desmber 2013.. Dalam KTM tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan yang berisi tiga isu, yaitu tentang fasilitas perdagangan (*trade facility*), pengadaan pasokan pangan (*food stockholding*) untuk ngara berkembang, dan membantu pembangungan negara kurang berkembang (*Least Developed Countries*/LDCs). Sebelumnya dalam KTM yang dilaksanakan oleh WTO tidak pernah mencapai suatu kesepatan, terutama paska Perundingan Doha pada tahun 2001, akhirnya pada KTM

---

[87] *Ibid.*

Digital Repository Universitas Jember

WTO ke-9 yang dilaksanakan di Bali berhasil mencapai sebuah kesepakatan yang biasa disebut dengan Paket Bali.[88]

Hasil dari kesepakatan yang pertama berkaitan dengan fasilitas perdagangan (*trade facility*). Fasilitas perdagangan ini merupakan perjanjian multilateral pertama yang dihasilkan WTO sejak WTO berdiri. Melalui perjanjian ini, negara anggota berkomitmen untuk melakukan penyederhanaan dan peningkatan transparansi berbagai ketentuan yang mengatur ekspor, impor, dan barang dalam proses transit. Sehingga perdagangan dunia menjadi lebih efektif dan efisien. WTO selalu berkaitan dengan isu-isu fasilitas perdagangan dan aturan WTO yang mencakup berbagai ketentuan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan menetapkan standar prosedural minimum. Diantaranya adalah pasal 5 berkaitan dengan kebebasan transit, pasal 8 berkaitan dengan biaya yang menyangkut impor dan ekspor, dan pasal 10 berkaitan dengan publikasi dan administrasi peraturan perdagangan, yang bertujuan untuk mempercepat perpindahan barang, termasuk dalam barang yang transit.[89]

Kesepakatan kedua dari Paket Bali, yaitu pasokan pangan untuk tujuan ketahanan pangan. Pada KTM WTO yang dilaksanakan di Bali proposal tentang pasokan pangan dengan tujuan ketahanan pangan di negara berkembang menjadi fokus dalam KTM tersebut. Usulan tentang pasokan pangan merupakan salah satu usulan dari isu pertanian yang dipilih dari agenda negosiasi Putaran Doha yang tertunda.[90] Kesepakatan untuk pasokan pangan ini adalah WTO memutuskan untuk menyetujui permintaan negara berkembang untuk tetap memberikan subsidi dibidang pertanian. Namun, solusi ini hanya solusi sementara selama solusi permanen masih dalam pembahasan dan akan ditentukan dalam 4 tahun setelah KTM WTO di Bali tahun 2013, yaitu pada tahun 2017.

---

[88] Web resmi WTO. *Bali Package and November 2014 Decision*, diakses dari https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/balipackage_e.htm pada tanggal 17 Juni 2015.
[89] Web resmi WTO. *Briefing note: trade facilitation – cutting "red cepe" at the border*, diakses dari https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/brief_tradfa_e.htm pada tanggal 17 Juni 2015.
[90] Web resmi WTO. *Publick Stockholding For Food Security Purposes*, diakses dari https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/desci38_e.htm pada tanggal 17 Juni 2015.

Digital Repository Universitas Jember

Kesepakatan yang ketiga dari Paket Bali adalah pembangunan negara-negara kurang berkembang (*Least Developed Countries*/LDCs). Dalam KTM WTO ke-9, menghasilkan kesepakatan untuk pembangunan negara kurang berkembang, yaitu: (a) operasionalisasi yang cepat dan efektif untuk pelayanan LDCs dan memberikan akses istimewa untuk LDCs untuk layanan LDCs, (b) meningkatkan bantuan teknis dan keuangan untuk memperkuat kapasitas jasa domestik, (c) mengadakan konferensi tingkat tinggi secepat mungkin di tahun 2014 untuk mengatasi masalah playanan.[91] Untuk LDCs, kesepakatan yang dihasilkan dalam KTM WTO ke-9 tersebut lebih disukai karena memberikan LDCs platform kebijakan berbasis aturan untuk bernegosiasi secara fleksibel, ringan dan adanya perlakuan khusus untuk LDCs. Kesepakatan yang dihasilkan dalam KTM WTO ke-9 dianggap sebagai kamjuan yang signifikan, terutama dalam bidang pengadaan pasokan pangan yang bertujuan untuk ketahanan pangan.

[91] Mustafizur Rahman. 2014. *What Does The Bali Package Mean For The LDCs?*, diakses dari http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges-africa/news/what-does-the-bali-package-mean-for-the-ldcs pada tanggal 22 Juni 2015.

Digital Repository Universitas Jember

BAB 4. KEBIJAKAN PEMERINTAH INDIA DALAM MERATIFIKASI PAKET BALI

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang alasan Pemerintah India yang bersedia meratifikasi Paket Bali. Sedangkan di awal pertemuan KTM, India yang diwakili oleh Menteri Perdagangan dan Perindustrian, Anand Sharma, tidak bersedia meratifikasi isi dari Paket Bali tersebut. Sesuai dengan kerangka teori dan kerangka konsep yang penulis gunakan untuk membantu menjawab rumusan masalah, di sini penulis akan menjabarkan jawaban dari rumusan masalah menggunakan kerangka teori dan konsep yang sudah dipilih oleh penulis, yaitu teori *Decision Making Approach* yang dikemukakan oleh James N. Rosenau dan konsep *food security*.

4.1. Kesediaan India Meratifikasi Paket Bali Terkait dengan Ketahanan Pangan India

Keamanan merupakan hal yang paling penting bagi suatu negara. Suatu negara dapat dikatakan aman apabila bebas dari rasa takut, bebas dari bahaya, serta suatu negara mempunyai kemampuan untuk tetap menjaga keamanan negaranya.[92] Dalam karya ilmiah ini penulis akan membahas lebih dalam lagi salah satu variabel dari keamanan manusia, yaitu keamanan pangan (*food security*). Hal ini terkait dengan alasan pemerintah India bersedia meratifikasi Paket Bali dalam KTM WTO ke-9 di Bali, Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa India menolak untuk meratifikasi isi dari Paket Bali. Hal itu dilakukan karena isi dari Paket Bali dianggap hanya akan menguntungkan negara-negara maju, di mana negara-negara maju menginginkan subsidi pertanian dihapuskan. Sedangkan negara berkembang termasuk India justru meminta sebaliknya, yaitu menginginkan subsidi

[92] Barry Buzan and Lene Hansen. 2009. "*The Evolition of International Security Studies*". Cambridge University Press. Hal. 8.

Digital Repository Universitas Jember

mendapat tambahan dan tanpa batasan waktu. Pemerintah tetap ingin memberikan subsidi di sektor pertanian dengan alasan keamanan pangan. Apabila subsidi tersebut dihentikan, maka bukan tidak mungkin hal tersebut akan berdampak langusng terhadap ketahanan pangan masyarakat India. Pemerintah India menyadari bahwa dengan jumlah penduduk yang banyak, yaitu lebih dari 1,2 miliar, pemerintah India harus bekerja lebih ekstra untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Termasuk dengan cara menyampaikan aspirasi mereka di dunia internasional. Berikut gambar yang menunjukkan bahwa India berada dalam daerah yang rawan akan ketahanan pangan:

Digital Repository Universitas Jember

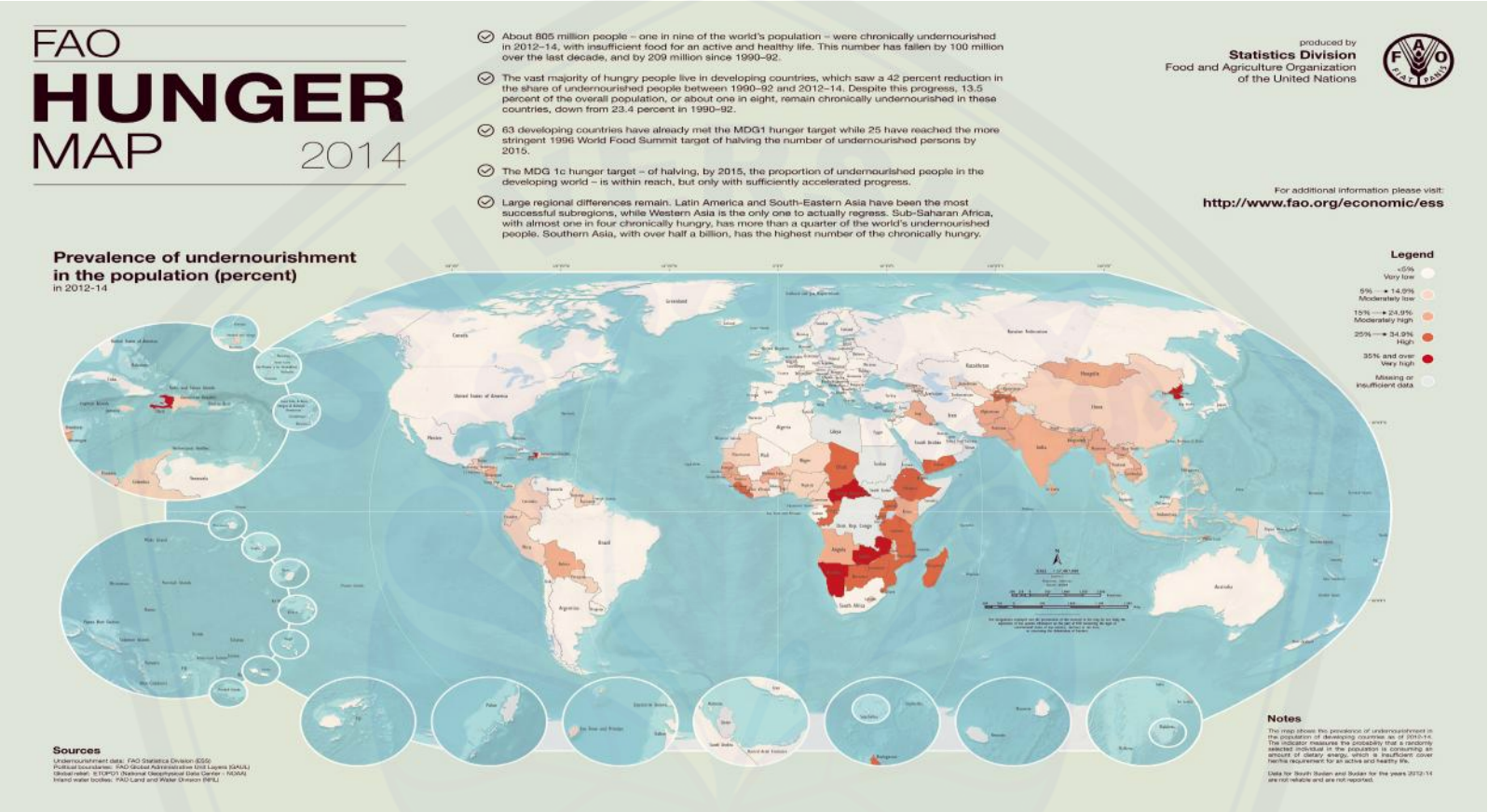

Gambar 4.1. Posisi India dalam Peta Dunia terkait ketahanan pangan

Sumber: Web resmi FAO, diakses dari http://www.fao.org/fileadmin/templates/ess/foodsecurity/poster_web_001_WFS.jpg.

Digital Repository Universitas Jember

Dalam peta tersebut digambarkan bahwa jumlah penduduk kelaparan di India berada dalam posisi yang cukup tinggi (*moderately high*). Pada tahun 2014 saja, jumlah penduduk kelaparan di dunia berjumlah 805 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk kelaparan di India cukup tinggi, yaitu sekitar 24% dari jumlah populasi. Oleh karena itu, wajar apabila pemerintah India memperjuangkan kepentingan mereka untuk terus memberikan subsidi pertanian.

Ketahanan pangan (*food security*) merupakan hal yang sangat penting dan fundamental bagi kelangsungan hidup manusia. Kerawanan pangan dapat menyebabkan kemampuan kognitif yang lebih rendah, berkurang prestasi kerja, dan subtansial kerugian produktivitas. Semua ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi nasional. Oleh karena itu, manusia sebagai individu juga memerlukan kepastian akan tersedianya pangan di daerah tempat mereka tinggal. Seperti yang telah disampaikan oleh FAO, bahwa ada tiga kriteria ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses fisik dan ekonomi terhadap pangan, dan kecukupan nutrisi (*food utilization*).

Berdasarkan kriteria tersebut, penulis mempunyai landasan yang cukup kuat untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan, yaitu “Mengapa India Meratifikasi Paket Bali dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO 2013?”. Ada dua alasan mengapa Pemerintah India bersedia meratifikasi Paket Bali. Pertama terkait dengan ketahanan pangan India, dan yang kedua adalah keputusan Pemerintah India dalam meratifikasi Paket Bali adalah terkait dengan kondisi masyarakat di India. Alasan pertama yang akan dibahas adalah alasan ketahanan pangan.

4.1.1. Ketersediaan Pangan

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa ketersediaan pangan dengan tujuan untuk pasokan pangan ditentukan tingkat produksi pangan, dan tingkat persediaan pangan. Ketersediaan pangan mengacu pada ketersediaan fisik atas pasokan pangan dalam jumlah yang diinginkan. Menggunakan biji-bijian sebagai

Digital Repository Universitas Jember

makanan (karena sebagian besar makanan berasal dari biji-bijian), ketersediaan biji-bijian pangan diberikan dari produksi bersih negara. Ketersediaan pangan secara fisik disuatu negara tergantung pada penyimpanan makanan dan integrasi pasar dalam wilayah nasional.[93] Menurut Swaminathan MS[94], mengingat bahwa jumlah penduduk India lebih dari 1,2 miliar dan akan mencapai 1,5 miliar pada tahun 2030, tantangan yang dihadapi oleh negara adalah bagaimana cara menghasilkan sumber pangan yang lebih banyak.[95]

Ketersediaan pangan sangat erat kaitannya dengan produksi pangan dan distribusi pangan. Sedangkan produksi pangan ditentukan dari beberapa faktor, mulai dari pemilihan tanah dan penggunaannya, pengolahan tanah, pemilihan tanaman, dan menejemen pertanian. Selain itu, produksi pangan juga dipengaruhi oleh faktor perubahan iklim. Namun, tidak semua ketersediaan pangan ditentukan dari tersedianya sumber daya alam. Tidak semua negara memiliki cukup sumber daya alam dan lahan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Seperti contohnya yang dialami oleh negara Jepang dan Singapura. Kedua negara tersebut tidak memiliki cukup lahan dan sumber daya alam untuk menjadi sumber ketersediaan pangan mereka.[96]

Selain terkait dengan produksi pangan, ketersediaan pangan juga terkait dengan distribusi pangan. Distribusi pangan ini melibatkan penyimpanan, pengolahan, transportasi, dan pemasaran pangan. Infrastruktur transportasi yang buruk akan meningkatkan harga penyediaan air dan pupuk serta harga akan terus bergerak meningkat menuju pasar nasional dan global.

---

[93] M.S, Swaminathan dan R.V. Bhavani. 2013. "*Food Production and availability-Essential Prerequisites fo Sustainable Food Security*". Indian J Med Res. 138(3): 383–391.

[94] M.S. Swaminathan adalah genetika India dan administrator internasional yang terkenal dengan "Revolusi Hijau/*Green Revolution*", yaitu sebuah program yang membuat varietas bibit unggul untuk bibit gandum dan padi yang ditanam oleh para Petani di India.

[95] M.S. Swaminathan. Loc. Cit.

[96] The Japan Times. "*Food Self-sufficiency rate fell below 40% in 2010*", diakses dari http://www.japantimes.co.jp/news/2011/08/12/news/food-self-sufficiency-rate-fell-below-40-in-2010/#.VSp1IfCElH0 pada tanggal 12 April 2015.

Digital Repository Universitas Jember

Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya, Pemerintah India juga melakukan impor makanan, khusunya impor makanan pokok masyarakat India. Seperti impor sereal, gandum, dan beras, serta impor lainnya gula, kacang-kacangan, dan minyak sayur. Impor makanan pokok India dari tahun ke tahun mengalami ketidakstabilan, seperti yang terlihat pada diagram berikut:

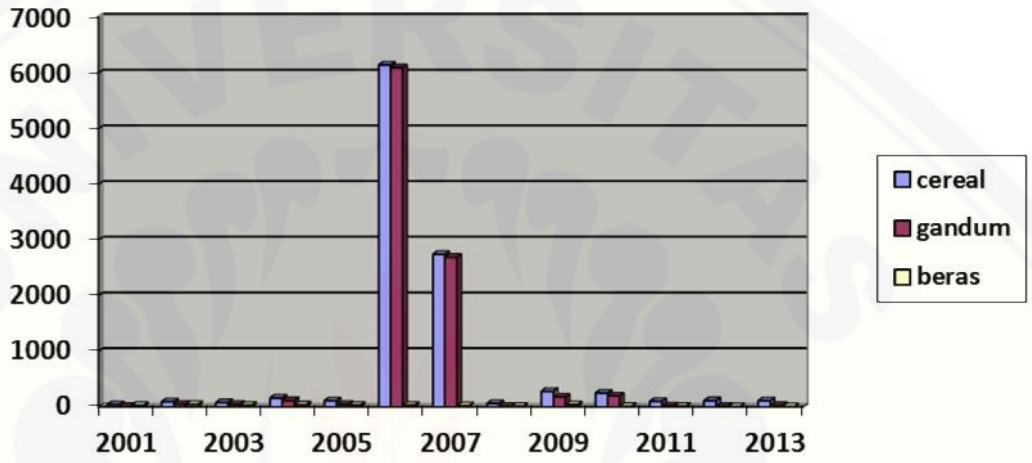

Gambar 4.2. Diagram impor sereal, gandum, dan beras di India dari tahun 2001-2013 (dalam 1000 metrik ton)
Sumber: Web resmi FAO, diakses dari http://faostat3.fao.org/download/FB/FBS/E.

Dilihat dari diagram tersebut, impor dari sereal, gandum, dan beras mengalami ketidakstabilan. Terlihat pada diagram tersebut untuk impor seral dan gandum mengalami peningkatan pada tahun 2006 dan 2007, untuk impor sereal saja pada tahun 2006 mencapai angka 6142 metrik ton dan mencapai angka 6093 untuk impor gandum (dala satuan sriu etrik ton). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, India tidak bisa memenuhi kebutuhan akan sereal dan gandum dari masyarakatnya. Padahal gandum dan sereal merupakan makanan pokok masyarakat India. Meskipun pada tahun-tahun berikutnya impor makanan pokok India mengalami penurunan, namun hal tersebut juga belum bisa menjamin ketahanan pangan India karena terjadi ketidakstabilan produksi dalam negeri. Oleh karena itu wajar apabila pemerintah India menginginkan subsidi untuk pertanian tetap diberikan

Digital Repository Universitas Jember

dengan tujuan untuk menciptakan kestabilan produksi dalam negeri dan menjamin ketahanan pangan masyarakat India.

Selain dipengaruhi oleh produksi pertanian, ketersediaan pangan juga dipengaruhi oleh distribusi pangan. India sendiri memiliki sistem distribusi sendiri, yang biasa disebut dengan Sistem Distribusi Umum (*Public Distribution System*/PDS). PDS berkembang sebagai sistem manajemen kelangkaan dan distribusi bahan pangan dengan harga terjangkau. PDS juga telah menjadi bagian penting dari Pemerintah India untuk pengelolaan ekonomi pangan dalam negeri. PDS ini bekerja dan diawasi langsung oleh Pusat dan Pemerintah Negara. Pemerintah pusat melalui *Food Corporation of India* (FCI), telah mengambil tanggung jawab untuk pengadaan, penyimpanan, dan alokasi sebagain besar bahan pangan kepada pemerintah negara. Tanggung jawab operasional termasuk alokasi dalam negara, mengidentifikasi keluarga yang memenuhi syarat, dan pengawasan fungsi *Fair Price Shops* (FPSs). Komoditas yang berada di bawah pengawasan PDS saat ini adalah gandum, beras, gula, dan minyak tanah.[97] Keberadaan PDS ini tentu diharapkan mampu mengatasi permasalahan distribusi pangan. Karena apabila distribusi pangan terpenuhi, ketahanan pangan India juga akan terjamin.

4.1.2. Akses Fisik dan Ekonomi Terhadap Makanan

Akses pangan mengacu pada pasokan pangan yang cukup di tingkat nasional dan internasional tidak menjamin ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Selain itu, akses pangan juga mengacu pada kemampuan untuk membeli pangan dan besarnya alokasi pangan. PBB juga mengatakan bahwa seringnya terjadi kelaparan dan malnutrisi bukan karena kelangkaan pangan, tetapi justru karena ketidakmampuan mengakses pangan karena kemiskinan. Oleh karena itu, kemiskinan mengakibatkan individu kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk

[97] Dept. of Food & Public Distribution of India. "*Targeted Public Distribution System*", diakses dari http://dfpd.nic.in/?q=node/101 pada tanggal 12 April 2015.

Digital Repository Universitas Jember

kebutuhan pangan, karena kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi kelangsungan hidup manusia.

Akses pangan sangat ditentukan dari faktor pendapatan, harga makanan, dan kemampuan rumah tangga/individu untuk mendapatkan akses secara fisik maupun ekonomi terhadap pangan. Menurut hukum Engel, "*the share of food expenditure in disposable income is expected to decline as income levels rise*" menyatakan bahwa pengeluaran untuk makanan merupakan pengeluaran yang paling besar dari pendapatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga dengan pendapatan rendah menghabiskan porsi yang relatif tinggi pendapatan mereka untuk membeli makanan, yang mengakibatkan mereka rentan terhadap kenaikan harga pangan.[98]

India telah berhasil mengurangi jumlah kemiskinan sebesar 54,9% dari total populasi pada tahun 1973 menjadi 30% pada tahun 2009, namun lebih dari 350 juta orang tetap berada di bawah garis kemiskinan. Laporan dari *Planning Commission's Eleventh Five Year Plan*[99] menyatakan bahwa jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan adalah 301.700.000 pada tahun 2004. Jumlah tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2009-2010 sebesar 354 juta orang berada di bawah garis kemiskinan.[100] Jumlah penduduk miskin di India tersebut menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat India masih berada di bawah rata-rata. Berikut tabel data masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

---

[98] FAO. 2013. "*FAO Statistical Year Book 2013*". Roma. Food and Agriculture Organization of The united Nation. Hal. 78.

[99] Komisi Perencanaan Pemerintah India dalam berbagai bidang, mulai dari pertanian, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain. Komisi tersebut bekerja pada tahun 2007 hingga 2012. Diakses dari http://planningcommission.nic.in/plans/planrel/11thf.htm pada tanggal 16 April 2015.

[100] National Council of Applied Economic Research. "*India's Food Securty Conundrum*". Parisila Bhawan. 11, I.P Estate. New Delhi

Digital Repository Universitas Jember

Tabel 4.1. Populasi India yang berada di bawah garis miskin

Periode	% penduduk di bawah garis miskin		
	Pedesaan	**perkotaan**	**Total**
1973-74	56.4	49.0	54.9
1983-84	45.7	40.8	44.5
1993-94	37.3	32.3	36.0
1993-94	50.1	31.8	45.3
2004-05	28.3	25.7	27.5
2004-05	41.8	25.7	37.2
2009-10	33.8	20.9	29.8
2011	69	31	21,9

Sumber: Source: Eleventh Five Year Plan Document, Planning Commission

Dari data di atas dapat dilihat bahwa masyarakat miskin yang berada di daerah pedesaan pada tahun 2011 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu pada periode 2009-2010. Hal ini dikarenakan kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan di daerah pedesaan. Kurangnya lapangan pekerjaan juga mengakibatkan jumlah penduduk miskin akan semakin meningkat jika tidak ada penanganan serius dari pemerintah. Kemiskinan yang meningkat tentu saja akan mempengaruhi masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka, terutama untuk kebutuhan pangan. Oleh karena itu, wajar apabila Pemerintah India meminta WTO untuk menaikkan subsidi untuk bidang pertanian dari 10% menjadi 15%. Karena sebagian besar penduduk India bekerja dibidang pertanian.

India merupakan rumah bagi sepertiga penduduk miskin di dunia. bahkan saat ini India menempati peringkat 63 di *Global Hunger Index*, bahkan dibawah negara

Digital Repository Universitas Jember

tetangganya, Pakistan yang berada diperingkat 57.[101] Oleh karena itu, isu ketahanan pangan di India menjadi isu hangat yang diperbincangkan di dunia internasional. Hal tersebut diperburuk dengan banyaknya perantara yang membuat distribusi pangan tidak efisien. Faktor yang mempengaruhi kerawanan pangan adalah rendahnya infrastruktur yang akan menambah biaya akhir untuk harga pangan..

Pendapatan mempunyai peran yang sangat penting terhadap kestabilan ketahanan pangan. Apabila rumah tangga atau individu memiliki pendapatan yang cukup untuk membeli makanan, maka kebutuhan pangan rumah tangga/individu secara otomatis akan terpenuhi. Namun, tidak jarang seperti yang terjadi di India, masyarakatnya masih banyak yang berada di bawah garis miskin dan membuat mereka kesulitan mendapatkan bahan pangan. Meskipun sebagian besar penduduk India bekerja dibidang pertanian, namun hal tersebut tidak bisa menjamin kebutuhan pangan masayarakat India terpenuhi. Oleh karena itu pemerintah India masih sangat membutuhkan subsidi untuk pertanian dalam rangka menambah lahan untuk pertanian dan mengurangi jumlah penduduk miskin di India.

4.1.3. Kecukupan nutrisi (*food utilization*)

Kriteria ketiga yang menjadi tolak ukur ketahanan pangan adalah pemanfaatan makanan. Pemanfaatan makanan ini mengacu pada bagaimana tubuh seseorang menyerap nutrisi dari makanan tersebut dan menjadikan makanan tersebut sebagai energi. Energi dan asupan nutrisi yang cukup adalah hasil dari perawatan yang baik, persiapan makanan yang baik, dan distribusi makanan yang baik. Pemanfaatan makanan oleh rumah tangga tergantung pada: (a) fasilitas yang dimiliki oleh rumah tangga untuk menyimpan dan mengolah makanan, (b) pengetahuan masyarakat dalam kaitannya dengan bagaimana memanfaatkan makanan dengan baik, (c) bagaimana

[101] The Times of India. 2014. "*India 55th on Global Hunger Index, lags behind Nepal and Lanka*", diakses dari http://timesofindia.indiatimes.com/india/India-55th-on-global-hunger-index-lags-behind-Nepal-Lanka/articleshow/44804457.cms pada tanggal 16 April 2015.

Digital Repository Universitas Jember

makanan itu didistribusikan, (d) serta apakah kondisi tubuh individu yang mungkin terganggu oleh penyakit, kebersihan air, dan lain-lain.[102]

Makanan yang umum dikonsumsi oleh masyarakat India adalah sereal, gandum, beras, biji-bijian, selain itu ada juga buah-buahan, susu, ikan, dan daging yang juga berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat India. Kebutuhan gizi yang harus dipenuhi sehari-hari adalah seperti mineral, zat besi, magnesium, sodium, kalium, dan juga vitamin A, B, C, D.

Menggambarkan bagaimana masyarakat India memenuhi kebutuhan pangan mereka sangat sulit. Hal ini berkaitan dengan kondisi geografis India, dan berbagai budaya yang membedakan kebutuhan pangan masyarakat India. Perbedaan ini juga terjadi di India selatan dan India utara, dimana makanan masyarakat India selatan terkenal dengan makanan basah (contohnya makanan yang berbahan dasar santan), sedangkan makanan masyarakat India utara lebih terkenal dengan masakan kering (makanan yang terbuat dari gandum seperti roti). Masyarakat India juga melakukan diet vegetarian, meskiput diet vegetarian ini tergantung dari kondisi geografi, religi, dan ketersediaan pangan. Misalnya, daging babi tetap dikonsumsi di wilayah India barat, domba dan sapi tetap dikonsumsi di wilayah India utara, serta ikan dan ungags tetap dikonsumsi di wilayah pesisir.[103]

Aspek penting lainnya yang mempengaruhi kebutuhan gizi masyarakat India adalah budaya praktek puasa dan pesta. Masyarakat yang beragama Hindu hampir setiap hari sepanjang tahun pasti mengadakan pesta. Pesta adalah sistem distribusi makanan bagi masyarakat yang beragama Hindu untuk mendapatkan makanan, terutama bagi masyarakat miskin. Secara keseluruhan makanan di India memenuhi seluruh kebutuhan gizi masyarakat India. Namun, berbeda keadaannya dengan yang terjadi di panti asuhan India. Makanan yang tersedia di panti asuhan seringkali tidak memenuhi kebutuhan gizi yang bisa menyebabkan kekurangan gizi dan pertumbuhan

---

[102] National Council of Applied Economic Research. Op. Cit.
[103]Adoption Nutrition. "India: General Diet/Summary", diakses dari http://adoptionnutrition.org/nutrition-by-country/india/ pada tanggal 6 Mei 2015.

Digital Repository Universitas Jember

yang tidak sempurna. Makanan yang tersedia di panti asuhan terdiri dari sereal dan kacang-kacangan dengan jumlah yang kecil. Oleh karena itu makanan yang tersedia tidak selamanya bisa memenuhi kebutuhan gizi terutama bagi masyarakat miskin.[104]

India juga menjadi negara di mana balita usia di bawah 5 tahun memiliki berat badan di bawah rata-rata. Sebanyak 46% dari anak-anak usia di bawah umur memiliki badan kurus atau kekurangan gizi. Serta kebanyakan wanita di India sebesar 55,3% mengalami anemia yang diakibatkan karena kekurangan pangan. Inflasi harga pangan yang tinggi, juga menjadi salah satu alasan meningkatnya gizi buruk.[105]

Hal tersebut menunjukkan bahwa India belum bisa memanfaatkan makanan dengan semaksimal mungkin. Pemanfaatan makanan ini seharusnya bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat dan tidak ada perbedaan makanan untuk laki-laki maupun perempuan, baik dari jumlah makanan maupun jenis makanan. Jika dilihat dari kenyataan tersebut, masih sangat sulit bagi India memenuhi ketahanan pangan negaranya. Tentu harus ada perbaikan di segala aspek untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat India dan mengurangi kerawanan pangan.

Alasan India bersedia meratifikasi Paket Bali sendiri adalah karena dalam KTM WTO ke-9 tersebut subsidi untuk pertanian tidak jadi dihapuskan. Pada awal pertemuan, negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Kanada menginginkan subsidi untuk pertanian dihapuskan, namun India menolak hal tersebut, dan mengancam tidak akan meratifikasi Paket Bali apabila subsidi untuk pertanian dihapuskan. India sendiri menginginkan subsidi untuk pertanian tidak dihapuskan, dan menginginkan penambahan subsidi dalm bidang pertanian. Akhirnya setelah terjadi *lobby* antara India dan negara-negara maju, kesepakatan yang dihasilkan adalah penambahan subsidi pertanian dari 10% menjadi 15% dari total produksi nasional selama 4 tahun. Pemerintah India menginginkan subsidi tersebut diberlakukan secara permanen, namun negara-negara maju keberatan, sehingga India

---

[104] *Ibid*.
[105] National Council of Applied Economic Research. Op. Cit.

Digital Repository Universitas Jember

hanya diberi batasan waktu selama 4 tahun. India sendiri melakukan hal tersebut dengan alasan ketahanan pangan, karena apabila petani di India tidak mendapatkan subsidi dikhawatirkan hal tersebut akan mempengaruhi ketahanan pangan negara India.

4.2. Keputusan India Bersedia Meratifikasi Paket Bali

Kebijakan luar negeri atau politik luar negeri merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara atau komunitas lainnya dalam hubungannya dengan negara dan aktor non-negara di dunia intrnasional. Kemudian politik luar negeri tersebut menjembatani batas wilayah dalam negeri dan lingkungan internasional. Politik luar negeri itu bisa berupa hubungan diplomatik, mengeluarkan doktrin, membuat aliansi, serta bisa berupa mencanangkan tujuan jangka panjang maupun jangka pendek.[106] Dalam membuat kebijakan luar negeri, negara atau non-negara sebagai aktor mengidentifikasi faktor-faktor dan komponen-komponen yang mempengaruhi lahirnya kebijakan luar negeri.

Pengambilan keputusan adalah proses kumulatif yang melibatkan sejumlah elemen dan prosedur yang rumit. Dalam setiap pengambilan keputusan proses yang dilalui tentu berbeda-beda, tergantung dari faktor-faktor yang tidak dapat diukur ketepatannya, seperti kepribadian pengambil keputusan, dan situasi yang bisa berubah kapan saja. Namun berbagai faktor tersebut tidak dapat diabaikan sebagai faktor yang mempengaruhi lahirnya kebijakan luar negeri. Untuk tujuan hubungan internasional, kebijakan luar negeri merupakan sebuah proses dari suatu negara untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Kebijakan luar negeri tersebut bisa dipengaruhi oleh situasi domestik suatu negara atau situasi eksternal, bisa juga dipengaruhi oleh

[106]K. J. Holsti dalam Abubakar Eby Hara. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri Dari Realisme sampai Konstruktivisme*, Bandung: Nuansa Cendekia. Hal. 13.

Digital Repository Universitas Jember

struktur internasional. Kebijakan luar negeri tersebut merupakan hasil dari masa lalu dan menentukan masa depan suatu negara.[107]

Kebijakan Pemerintah India yang bersedia meratifikasi Paket Bali adalah dengan alasan melihat faktor kondisi masyarakatnya. *Decision Making Process* ini disampaikan oleh JN Rosenau. Rosenau mencoba lebih disiplin dalam menganalisa proses keputusan yang dibuat oleh suatu negara. Di sini Rosenau mengatakan ada lima variabel yang bisa mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh negara, yaitu indiosinkrasi (*indiosyncratic*), peranan, pemerintahan, masyarakat, dan sistemik. Dari lima variabel tersebut, Rosenau mencoba lebih fokus dengan hanya menganalisa satu variabel yang dianggap paling mempengaruhi keputusan pemerintah. Dalam karya ilmiah ini penulis memilih variabel masyarakat yang dianggap paling mempengaruhi keputusan Pemerintah India bersedia meratifikasi Paket Bali dalam KTM WTO ke-9 di Bali tahun 2013.

India merupakan salah satu negara berkembang yang berada di kawasan Asia dan besarnya jumlah penduduk India menempati posisi kedua di dunia setelah China. Pada tahun 1966, Rosenau menempatkan India dalam kategori negara besar dan masuk dalam kategori *underdeveloped country*. Variabel-variabel yang paling mempengaruhi kebijakan luar negeri India pada saat itu adalah indiosinkrasi, perananan, masyarakat, sistem, dan pemerintah. India merupakan negara dengan sistem demokrasi liberal, di mana dalam pengambilan keputusan pemerintah mempertimbangkan kepentingan bersama. Berdasarkan hal tersebut, dalam penulisan skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan tingkatan variabel yang disampaikan oleh Rosenau pada saat itu, India termasuk dalam golongan negara berkembang terbuka. Jadi tingkatan variabel yang mempengaruhi kebijakan luar negerinya adalah peranan, masyarakat, pemerintah, sistem, dan indiosinkrasi.

---

[107]M. L. Sondi. *Implementation of India's Foreign Policy*, diakses dari http://mlsondhi.org/Indian%20Foreign%20Policy/IMPLEMENTATION%20OF%20INDIAs%20Foreign%20Policy.htm pada tanggal 19 April 2015.

Digital Repository Universitas Jember

Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang variabel yang menjadi pertimbangan Pemerintah India pada saat mengambil keputusan pada KTM WTO di Bali tahun 2013, yaitu variabel masyarakat, akan dijelaskan terlebih dahulu tentang tingkatan-tingkatan variabel yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Pemerintah India, yaitu yang pertama adalah peranan (*role*).[108] Peranan di sini berarti peranan-peranan yang ditempati oleh para pembuatan keputusan yang harus dilakukan, tidak memperdulikan faktor indiosinkrasi. Kaitannya dengan India adalah, peranan ini dipegang oleh Menteri Perdagangan dan Industri India saat itu, yaitu Anand Sharma. Anand Sharma menjadi Menteri Perdagangan dan Industri India sejak 22 Mei 2009.[109] Sebagai Menteri Perdagangan tentu Anand Sharma mempunyai kewajiban untuk mengedepankan kepentingan negaranya, di mana pada saat itu kepentingan India adalah meminta kepada WTO untuk menaikkan subsidi pertanian dari 10% menjadi 15% dari total produksi nasional. Selain itu, dalam kaitannya dengan proposal yang diajukan oleh India yang mengatasnamakan G33, India berperan sebagai negara yang mewakili negara-negara berkembang untuk mendesak WTO meningkatkan subsidi dari 10% menjadi 15%. Sehingga pernanan India di sini sangat diperhitungkan sebagai negara yang menyuarakan kepentingan negara berkembang lainnya

Tingkatan kedua yang mempengaruhi kebijakan luar negeri India adalah masyarakat. Rosenau tidak menjelaskan secara spesifik pengertian dari variabel masyarakat, namun Rosenau memberikan contoh aspek dalam variabel masyarakat, antara lain nilai dominan di masyarakat, tingkat kesatuan nasional, tingkat industrialisasi dan sistem ekonomi yang sedikit banyak menyumbang pada isi dari aspirasi dan kebijakan luar negeri suatu negara.[110] Nilai dominan dalam masyarakat

---

[108] Abubakar Eby Hara. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri Dari Realisme sampai Konstruktivisme*, Bandung: Nuansa Cendekia. hal.90.
[109] Web resmi Pemerintah India. *Government*, diakses dari http://www.archive.india.gov.in/govt/rajyasabhampbiodata.php?mpcode=431 pada tanggal 16 Juni 2015.
[110] Abubakar Eby Hara. *Loc. Cit*. Hal.90

Digital Repository Universitas Jember

India adalah beragamnya budaya dan agama yang dianut oleh masyarakatnya memberikan pengaruh yang cukup besar dalam gaya hidup masyarakat India, contohnya adalah bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Bahasa utama masyarakat India adalah bahasa Hindi. Keberagaman budaya yang dimiliki oleh India dan jumlah penduduk yang banyak, terkadang menimbulkan berbagai masalah, mulai dari masalah sosial, ekonomi, pendidikan, hingga lingkungan. Timbulnya berbagai masalah tersebut membuat pemerintah mengutamakan kepentingan masyarakat untuk selalu terpenuhi, baik dengan cara memperjuangkannya secara domestik maupun internasional. Kaitannya dengan keputusan India dalam meratifikasi Paket Bali adalah kondisi masyarakat India (khususnya petani) masih sangat membutuhkan subsidi dalam bidang pertanian. Subsidi tersebut akan sangat mempengaruhi produksi dari pertanian India, karena subsidi tersebut akan membantu petani-petani miskin di India untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam bidang pertanian. Para petani di India tidak bisa memenuhi semua kebutuhan mereka dalam bidang pertanian, karena petani di India masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Keberagaman budaya, agama serta masyarakat yang demokratis membuat masyarakat memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satunya adalah serikat petani. Para serikat petani di India meminta pemerintah untuk segera mengatasi permasalahan ketahanan pangan. Serikat petani India mendesak pemerintah untuk mengajukan subsidi pertanian dinaikkan dari 10% menjadi 15% dari total produksi. Permintaan serikat petani ini disampaikan langsung melalui surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Manmohan Singh. Serikat petani di India memiliki pengaruh yang cukup berpengaruh terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, terutama dalam kebijakan dalam bidang pertanian. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar masyarakat India yang bermatapencaharian sebagai petani, serta kebutuhan pangan mereka dipenuhi dari hasil produksi pertanian.[111] Oleh karena itu, kebutuhan

[111] Koran Jakarta. 2013. *WTO Gagal Atasi Perbedaan*, diakses dari http://www.koran-

Digital Repository Universitas Jember

masyarakat inilah yang mempengaruhi kebijakan luar negeri India dalam meratifikasi Paket Bali.

Tingkatan ketiga yang dianggap mempengaruhi kebijakan luar negeri India adalah variabel pemerintah. Hal ini berkaitan dengan struktur pemerintahan yang bisa membatasi ataupun meningkatkan pilihan-pilihan yang dibuat oleh para pembuat keputusan.[112] Struktur pemerintahan India dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, seperti yang terlihat pada gambar berikut:

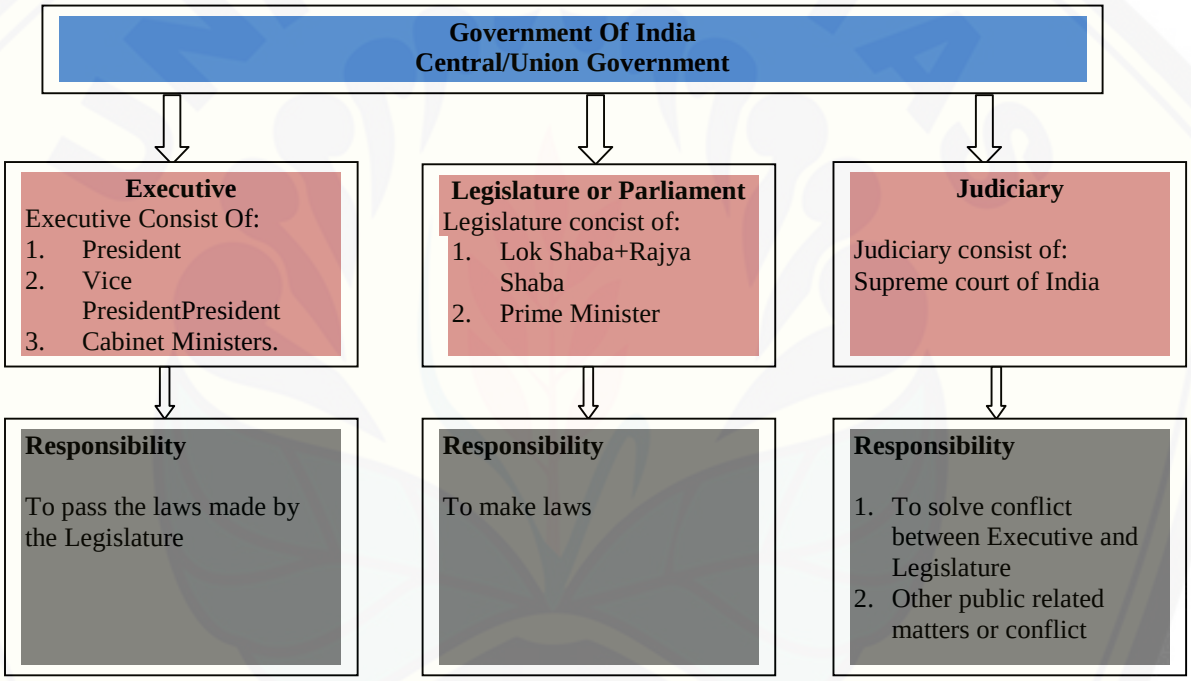

Gambar 4.2. Struktur Pemerintah India.

Sumber: Web resmi Pemerintah India, diakses dari http://www.elections.in/government/.

---

jakarta.com/?178-wto-gagal-atasi-perbedaan

[112] *Ibid*. Hal.90

Digital Repository Universitas Jember

Struktur pemerintahan tersebut bisa menjadi variabel yang mempengaruhi kebijakan luar negeri India. Di mana pemerintah India pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan berdasarkan kondisi masyarakat sebelum membuat keputusan.

Tingkatan keempat yang memiliki pengaruh dalam kebijakan luar negeri India adalah variabel sistem. Variabel sistem ini meliputi aspek-aspek non-human di lilngkungan eksternal suatu masyarakat suatu masyarakat atau tindakan-tindakan yang terjadi di luar negeri yang mengkondisikan atau mempengaruhi pilihan yang dibuat oleh para pembuat keputusan.[113] Dalam kaitannya dengan kasus di India ini adalah isu ketahanan pangan sudah menjadi isu yang mendapat banyak perhatian dunia internasional. Ketahanan pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia. Ditambah lagi dengan jumlah penduduk kelaparan di India yan masih cukup tinggi tentu harus segera ditangani, apabila kelaparan yan terjadi di India tidak mendapat perhatian, maka bukan tidak mungkin jika India akan mendapat protes keras dari dunia internasional dan dianggap sebagai negara yang tidak layak huni, karena tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Tingkatan terakhir yang mempengaruhi kebijakan luar negeri India adalah variabel indiosinkrasi. Indiosinkrasi yang kemudian juga disebut sebagai faktor individual dapat diartikan sebagai sifat yang unik dan spesial dari seorang pemimpin yang menentukan dan menerapkan kebijakan luar negeri. Jadi, variabel individual berkaitan dengan keunikan sikap pembuat keputusan yang berbeda dengan orang lain. Variabel indosinkrasi meliputi semua aspek yang ada pada para pembuat keputusan seperti nilai-nilai, keahlian, dan pengalamannya yang membedakan dengan para pembuat keputusan yang lain.[114] Kaitannya dengan keputusan India dalam meratifikasi Paket Bali yang pada saat itu diwakili oleh Anand Sharma, membuat keputusan berdasarkan kondisi masyarakat India. Anand Sharma sebagai seorang Menteri Perdagangan dan Industri mempunyai pengalaman sebagai pengacara, dan

---

[113] *Ibid*. Hal90
[114] *Ibid*.

Digital Repository Universitas Jember

juga pernah menjadi Menteri Luar Negeri India pada tahun 1985-1988.[115] Dari pengalaman-pengalaman tersebut Anand Sharma tentu mengerti bagaimana harus membuat keputusan yang benar dan tepat dalam meratifikasi Paket Bali dalam KTM WTO di Bali tahun 2013.

Variabel masyarakat dipilih karena pemerintah mempertimbangkan kondisi penduduk India yang masih banyak berada pada garis kemiskinan. India memiliki penduduk yang sangat besar, lebih dari 1,2 miliar. Kondisi ini menjadi menjadi tantangan bagi Pemerintah India untuk menjamin kebutuhan pangan dan kesejahteraan penduduknya. India merupakan negara berkembang yang memiliki berbagai permasalahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. India merupakan negara dengan jumlah penduduk miskin yang tertinggi di dunia dengan jumlah lebih dari 300 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Meskipun negara India berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin dari 55% pada tahun 1973 menjadi 27% di tahun 2004. Namun, hampir dari sepertiga penduduk India tetap hidup di bawah garis, dan sebagian besar penduduk miskin tersebut hidup di daerah pedesaan. Daerah tersebut antara lain Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Orissa, Chhattisgarh dan Bengal Barat.[116]

Selain kondisi masyarakat miskin yang menjadi alasan pemerintah India meratifikasi Paket Bali, subsidi di bidang pertanian juga menjadi alasan utama Pemerintah India bersedia meratifikasi Paket Bali. Hal ini berkaitan dengan sebagian besar penduduk India bermatapencaharian sebagai petani, dan memenuhi kebutuhan pangan mereka dari hasil pertanian mereka sendiri. Pertanian di India juga menyumbang sebagian besar PDB India. Hal tersebut seharusnya bisa memabantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat India, namun kanyataannya kebutuhan pangan masyarakat India belum sepenuhnya terpenuhi. Oleh karena itu, Pemerintah

---

[115] Web resmi Pemerintah India. *Detailed Profile: Shri Anand Sharma*, diakses dari http://www.archive.india.gov.in/govt/rajyasabhampbiodata.php?mpcode=431 pada tanggal 16 Juni 2015.

[116] Rural Poverty Portal. *Rural Poverty in India*, diakses dari http://www.ruralpovertyportal.org/country/home/tags/india pada tanggal 17 April 2015.

Digital Repository Universitas Jember

India terus melakukan berbagai cara untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat India untuk memenuhi keamanan pangan, yaitu salah satunya dengan cara memberikan subsidi untuk pertanian. Pemerintah India memberikan subsidi pertanian, karena jika pemberian subsidi tersebut diberhentikan maka dikhawatirkan hal tersebut akan membahayakan ketersediaan pangan di India.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab 2 tentang hubungan antara pertanian dan ketahanan pangan, yaitu ketahanan pangan sangat bergantung pada ketersediaan pangan. Dalam kasus/fenomena yang terjadi di India ini, sebagian besar kebutuhan pangan masyarakatnya dipenuhi melalui hasil dari pertanian. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah India untuk terus melakukan perlindungan dan perbaikan terhadap pertanian India dengan tujuan ketahanan pangan.

Dunia internasional secara keseluruhan telah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, namun masih ada sekitar 850 juta orang mengalami rawan pangan. Untuk mencapai ketahanan pangan membutuhkan ketersediaan pangan yang memadai dan akses yang mudah. Pertanian juga memainkan peran yang penting dalam hal memenuhi kebutuhan pangan, pertanian merupakan sumber ketersediaan pangan secara global (banyak negara yang berbasis pertanian), dan pertanian merupakan sumber penting pendapatan untuk membeli makanan, untuk mendapatkan makanan dengan status gizi yang tinggi.[117]

Pemerintah India memiliki peranan penting dalam bidang pembangunan pertanian. Beberapa alasan pentingnya peran pemerintah tersebut adalah untuk swasembada, menciptakan lapangan kerja, mendukung produsen skala kecil untuk mengembangkan teknologi yang lebih modern, mengurangi ketidakstabilan harga, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga petani. Peran penting ini bisa terwujud dalam bentuk kebijakan ekspor-impor dan kebijakan dalam negeri seperti program dukungan harga dan subsidi untuk mempengaruhi biaya dan ketersediaan untuk

---

[117] The World Bank. *What are the links between agricultural production and food security*, diakses dari http://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/477365-1327599046334/8394679-1327606607122/WDR08_07_Focus_C.pdf pada tanggal 18 April 2015.

Digital Repository Universitas Jember

pertanian seperti pupuk, bibit, air bersih, dan lain-lain. Dari semua instrumen dukungan domestik di bidang pertanian, subsidi dan dukungan harga produk merupakan dukungan yang paling umum. Menurut Bank Dunia (*World Bank*) pemberian subsidi dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Subsidi dalam bentuk pupuk, air irigasi dan listrik memiliki porsi yang cukup tinggi dalam sibsidi pertanian di India.[118]

Subsidi pertanian adalah dukungan berupa keuangan dari pemerintah yang dibayarkan kepada petani dan agribisnis untuk menambah penghasilan mereka, mengelola pasokan komoditas pertanian, dan mempengaruhi biaya dan pasokan tersebut. Subsidi sering dilihat sebagai kebalikan dari pajak, yaitu instrument dari kebijakan fiskal. Tujuan dari subsidi, dengan cara menciptakan batasan/irisan(*wedge*) antara harga konsumen dan harga produsen dan menyebabkan perubahan dalam keputusan permintaan/penawaran.[119]

Subsidi dalam bidang pertanian sangat penting bagi pertumbuhan petani di India. Pada awalnya, subsidi ini diberikan dalam bentuk subsidi untuk pupuk, irigasi, dan listrik di pedesaan (untuk keperluan memompa irigasi) pada tahun 1960 untuk mendukung kesuksesan Revolusi Hijau (*Green Revolution*). Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya produksi sereal, gandum, dan beras yang menjadi makanan pokok masyarakat India pada tahun 1967. Di awal 1980-an biaya subsidi untuk pertanian telah meningkat sekitar 15%-25%, lebih tinggi dari subsidi untuk pendidikan, padahal buta aksara orang dewasa di India masih cukup tinggi sekitar 61%. Namun pada pertengahan tahun 1990-an, produksi pertanian menurun karena kurangnya investasi dalam infrastruktur fisik, penelitian, dan penyuluhan.[120]

Subsidi pertanian di India terutama ditujukan untuk pupuk, irigasi, dan listrik. Seperti yang terlihat pada tabel berikut:

---

[118]Harsal A. Salunkhe & B. B. Deshmush. 2012. *The Overview of Government Subsidies to Agriculture Sector in India*. IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS). Volume 1. Issue 5.
[119] *Ibid*.
[120] *Ibid*.

Digital Repository Universitas Jember

Tabel 4.4. ***Distribution of Total Subsidies & Gross Cropped Area in India*** **(1980-81 to 2008-09)**

	Pupuk (dlm rupee)	**Listrik (dlm rupee)**	**Irigasi (dlm rupee)**	**Total subsidi (dlm rupee)**	**Gross Cropped Area (In 000 hectares)**
1980-81	471.88	357.56	399.10	1,228.54	1,73,324
1985-86	1,804.80	1,324.15	1,667.21	4,796.16	1,77,526
1990-91	4,638.56	4,621.00	3,917.41	13,176.97	1,85,403
1996-97	8,148.41	15,594.00	10,404.73	34,147.14	1,88,601
2000-01	13,724.05	26,904.00	14,711.71	55,339.76	1,86,565
2008-09	1,01,180.68	14,771.52	-	1,15,952.20	1,75,67

Sumber: Government of India, Fertilizers Association, Fertilizer Statistics, various issues.

Data pada tabel tersebut menunjukkan peningkatan subsidi untuk pupuk, irigasi, dan listrik dari tahun ke tahun. Namun, pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun juga semakin meningkat. Oleh karena itu, petani India membutuhkan subsidi untuk peningkatan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat India yang meningkat dari tahun ke tahun.

Dalam Agenda Pembangunan Doha (*Doha Development Agenda*), ada dua isu yang menjadi pembahasan penting, yaitu tentang fasilitas perdagangan (*trade facility*)

Digital Repository Universitas Jember

dan tentang subsidi pertanian yang nantinya dibahas dalam KTM WTO di Bali. Perjanjian WTO tentang pertanian (*Agreement on Agriculture*/AoA) berlaku sejak tahun 1995, sehingga pola perdagangan dunia telah mengalami perubahan, dan ada kekuatan yang mendistorsi perdagangan pangan yang tidak memadai. Beberapa perusahaan pertanian multinasional telah meningkatkan dominasi perdagangan global dan distribusi pangan mereka. Spekulasi dalam pasar komoditas telah menciptakan harga yang berubah-ubah dan tidak mencerminkan perubahan dalam permintaan dan penawaran. Hal ini memberi dampak yang buruk bagi produsen kecil karena tidak berdaya saat harga mengalami kenaikan, dan kalah dengan impor ketika harga turun. Hal ini juga berdampak buruk bagi konsumen kecil, karena mereka tidak mampu membeli pangan dengan harga yang tinggi. Di negara-negara berkembang, hal tersebut menimbulkan dua masalaha, yaitu kerawanan pangan karena melonjaknya harga pangan dan ketidakamanan mata pencaharian bagi produsen makanan karena meningkatnya biaya produksi dan pasokan yang tidak pasti.[121]

Oleh karena ketidakstabilan tersebut, negara-negara berkembang berusaha mencari solusi untuk memastikan ketahanan pangan masyarakatnya. Banyak negara berkembang memperkenalkan langkah untuk membuat harga pangan menjadi lebih terjangkau bagi konsumen berpenghasilan rendah atau dengan mendorong produksi dalam negeri. Cara tersebut biasanya dilakukan dengan cara mendukung petani dengan cara memberikan subsidi.

Dalam aturan WTO sendiri memiliki 3 macam subsidi untuk pertanian, yaitu:[122]

1. Kotak kuning: terkait dengan tingkat produksi. Negara-negara berkembang diperbolehkan memberikan subsidi sebesar 10% dari total produksi pertanian, sedangkan negara maju sebesar 5% dari total produksi pertanian.

[121]The Economic Times. 2014. I*ndia's farm subsidy well bellow WTO cap of 10%: Official*, diakses dari http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/indias-farm-subsidy-well-below-wto-cap-of-10-official/articleshow/42288827.cms pada tanggal 20 April 2015.
[122] *Ibid*.

Digital Repository Universitas Jember

2. Kotak biru: berkaitan dengan pembatasan produksi pertanian yang menganggu perdagangan.
3. Kotak hijau: berkaitan dengan subsidi yang tidak menganggu perdagangan. Subsidi ini boleh tanpa batas, asal memnuhi kriteria yang sudah ditetapkan.

Contoh dari subsidi kotak hijau adalah termasuk dukungan pendapatan langsung untuk petani, serta kebijakan untuk perlindungan lingkungan dan pembangunan daerah. Sebagian besar negara maju telah beralih pada subsidi kotak hijau, sehingga mereka terus memberikan dukungan yang sangat besar kepada petani mereka tanpa melanggar peraturan WTO. Tetapi, negara-negara berkembang berusaha untuk memastikan ketahanan pangan mereka dan memerlukan peraturan yang lebih fleksibel untuk memastikan ketahanan pangan negara-negara berkembang. Oleh karena itu, koalisi negara-negara berkembang G33 mengajukan proposal untuk memasukkan kebijakan seperti program reformasi tanah, penyediaan infrastruktur, dan inisiatif kerja di pedesaan.

Dalam KTM WTO ke-9 di Bali tahun 2013, pada awalnya India menolak untuk meratifikasi isi dari Paket Bali karena dianggap hanya akan menguntungkan negara-negara maju. India menginginkan subsidi untuk pertanian ditingkatkan dari 10% menjadi 15% dan tanpa batasan waktu. Alasan mengapa India mengajukan hal tersebut jelas karena terkait dengan kebutuhan subsidi pertanian oleh petani India dengan tujuan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat India. Banyak masyarakat India yang masih berada di bawah garis miskin dan tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka, karena kurangnya ketersediaan pangan, akses pangan yang sulit, dan pemanfaatan pangan yang belum sesuai. Kondisi masyarakat inilah yang menjadi alasan Pemerintah India untuk mengambil tindakan dengan cara menyampaikan aspirasi mereka dalam forum KTM WTO ke-9 di Bali tahun 2013. Meskipun pada awal penyampaian usulan India tersebut mendapat tentangan dari negara-negara maju, akhirnya negara-negara maju (seperti Amerika Serikat dan Kanada) menyetujui usulan dari India tersebut. Dengan catatan, subsidi untuk pertanian dari 10% menjadi

Digital Repository Universitas Jember

15% dari total produksi nasional, hanya diberikan dalam kurun waktu 4 tahun. Akhirnya dengan kesepakatan tersebut India bersedia meratifikasi Paket Bali. Namun, India tetap berharap dalam pertemuan berikutnya bisa menemukan solusi permanen untuk subsidi pertanian tersebut. India sangat membutuhkan subsidi pertanian tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya.

Ada dua alasan mengapa India tetap memberikan subsidi terhadap sektor pertanian. Pertama, subsidi pertanian di negara-negara maju bukan menjadi bahasan utama dalam setiap pertemuan WTO, jadi tidak ada alasan bagi negara maju untuk membatasi negara-negara berkembang dari subsidi. India menyerukan keadilan dan perlakuan yang sama di bawah perjanjian yang dibuat oleh WTO, serta hak-hak asasi manusia yang sama di dunia. Kedua, subsidi pertanian akan meningkatkan ketahanan pangan negara. Seperti yang kita ketahui bahwa India memiliki jumlah populasi yang banyak, namun tidak memiliki cukup persedaiaan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya.

Digital Repository Universitas Jember

BAB 5. KESIMPULAN

Ketahanan pangan merupakan aspek yang harus bisa dipenuhi oleh negara sebagai kebutuhan dasar masyarakatnya. Hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah India untuk terus bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Dalam KTM WTO ke-9 yang dilaksanakan di Bali, Indonesia, ketahanan pangan India dan kondisi masyarakat menjadi alasan mengapa akhirnya Pemerintah India bersedia meratifikasi Paket Bali.

Alasan pertama Pemerintah India bersedia meratifikasi Paket Bali dilandasi oleh kondisi masyarakat India yang sangat membutuhkan subsidi dalam bidang pertanian terkait dengan tujuan keamanan pangan. Keamanan pangan merupakan kebutuhan paling mendasar bagi manusia untuk terus bisa bertahan dan melanjutkan kehidupan mereka. Sebagian besar msayarakat India bermatapencaharian sebagai petani dan kebutuhan pangan masyarakat India sebagaian besar juga berasal dari produksi pertanian mereka. Meskipun pertanian di India menyumbangkan pemasukan dalam PDB India, namun keadaan tersebut belum bisa menjamin ketahanan pangan masyarakat India dengan jumlah penduduk yang sangat besar yaitu lebih dari 1,2 miliar. Jumlah masyarakat yang banyak tersebut pula yang menjadi alasan bagi Pemerintah India untuk bersedia meratifikasi paket Bali. Jumlah penduduk miskin di India juga masih sangat tinggi yaitu 350 juta penduduk masih berada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan membuat masyarakat India tidak bisa sepenuhnya mengakses makanan untuk kelangsungan hidup mereka.

Pemerintah India melihat kondisi masyarakat (khususnya petani) masih sangat membutuhkan subsidi dalam bidang pertanian. Subsidi dalam bidang pertanian di India merupakan salah satu subsidi yang paling tinggi. Subsidi dalam bidang pertanian ini diberikan dalam bentuk subsidi untuk pupuk, irigasi, dan listrik (sebagai tenaga untuk irigasi). Dalam KTM WTO ke-9 di Bali, India pada awal pertemuan menolak untuk meratifikasi Paket Bali karena isi dari Paket Bali hanya akan

Digital Repository Universitas Jember

menguntungkan negara-negara maju. Dalam KTM tersebut India mengajukan proposal yang biasa disebut dengan Proposal G33. Dalam proposal tersebut India menginginkan subsidi untuk bidang pertanian ditambah dari 10% menjadi 15% dan tanpa batasan waktu. Sedangkan negara-negara maju menginginkan subsidi untuk pertanian dihapuskan. Setelah mengalami *deadlock* karena tidak ada kesepakatan antara negara maju dan negara berkembang, akhirnya negara-negara maju bersedia menyetujui permintaan India untuk menaikkan subsidi dalam bidang pertanian menjadi 15%, namun hanya dalam kurun waktu 4 tahun.

Alasan kedua Pemerintah India bersedia meratifikasi Paket Bali adalah terkait dengan ketahanan pangan masyarakat India. Jumlah penduduk India yang banyak membuat Pemerintah India harus melakukan berbagai cara untuk bisa menjamin ketahanan pangan masyarakatnya, termasuk menyuarakan pendapat mereka di forum internasional. Ketahanan pangan di India sangat terkait dengan jumlah produksi pertanian mereka. Pertanian dan ketahanan pangan memiliki hubungan yang sangat erat. Karena dari hasil produksi pertanian tersebut, masyarakat India bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka. Oleh karena itu, para petani di India masih sangat membutuhkan subsidi dalam bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan petani di India. Apabila kebutuhan petani terpenuhi, maka produksi pertanian juga akan meningkat dan bisa menjamin ketahanan pangan masyarakat India.

Belajar dari fenomena yang dialami oleh India, dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kestabilan suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah sebagai badan yang mengatur segala kebutuhan negara, termasuk ketahanan pangan, harus berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Menyuarakan pendapat mereka di dunia internasional juga menjadi salah satu cara supaya pemerintah lokal bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Karena ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara secara domestik, namun juga menjadi tanggung jawab dunia internasional untuk berperan serta menjaga ketahanan pangan dunia.

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Acharya, K.C.S. 1983. *Food Security System of India: Evolution of the Buffer Stocking Policy and Its Evaluation*. New Delhi: Concept Publishing Company.

Buzan, Barry and Lene Hansen. 2009. *The Evolition of International Security Studies*. Cambridge. Cambridge University Press.

FAO. 2008. *An Introduction to The Basic Concept of Food Security*. Roma. EC - FAO Food Security Programme.

FAO. 2013. *FAO Statistical Year Book 2013*. Roma. Food and Agriculture Organization of The united Nation.

Gardner, Lauren. 2012. *India's Presistens Food Insecurity*. University Honors.

Hara, Abubakar Eby. 2011. *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri Dari Realisme sampai Konstruktivisme* Bandung: Nuansa Cendekia.

Hoekman, Bernard, Aaditya Mattoo, and Philip English. 2002. *Development, Trade, and The WTO: A Handbook*. Washington DC: The World Bank.

Human Security Unit. 2009. *Human Security in Theory and Practice*. New York. United Nation.

Mahendra Dev, S & Sharma, Alakh N. 2010. *Food Security in India: Performance, Challanges, and Policies*. India: Oxfam India.

Mas'oed, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.

Jurnal dan *Working Paper*

Ali, Mushir, Hifzur Rehman,dan S. Murshid Husain. 2012. "Status Of Food Insecurity at Household Level In Rural India: A Case Study of Uttar Pradesh". *International Journal of Physical and Social Sciences*. Vol.2 Issue.8.

Digital Repository Universitas Jember

Beri, Ruchita. 2007. "Traditional and Non-Traditional threats in a changing global order: an Indian Perspective". *Johannesburg, South Africa*. Vol. 20. No. 2.

Gahukar, R.T.. 2011. "Food Security in India: The challenge of Food Production and Distribution". *Journal of Agricultural & Food Information*, 12.

Ittyerah, Anil Chandy. 2013. "Food Security In India: Issues and Suggestions For Effectiveness". Indian Institute of Public Administration. *Working Paper no.57*

Ministry of Commerce, Govt. of India. 1999. "WTO Agreement on Agriculture and Its Implication". *Focus On Agriculture*. Vol.1 No. 5.

National Council of Applied Economic Research. "India's Food Securty Conundrum". *Parisila Bhawan*. 11, I.P Estate. New Delhi.

Remacle, Eric. 2008. "Approaches to Human Security: Japan, Canada, and Europe in Comparative Perspective". *An offprint of The Journal of Social Science*. No.66.

Saggi, Kamal. 2010. "India at The WTO: From Uruguay to Doha and Beyond". Stanford University. *Working Paper no. 425.*

Salunkhe, Harsal A. & B. B. Deshmush. 2012. "The Overview of Government Subsidies to Agriculture Sector in India". *IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS).* Volume 1. Issue 5.

Swaminathan, M.S, dan R.V. Bhavani. 2013. "Food Production and availability-Essential Prerequisites fo Sustainable Food Security". *Indian J Med Res*. 138(3): 383–391.

Tripathi, Amarnath & A.R. Prassad. 2009. "Agriculture Development in India since Independence: A Study on Progress, Performance, and Determinance". *Journal of Emerging Knowledge on Emerging Markets*.Vol. 1.Issue 1.

Tyagi, Vandana. 2012. "India's Agriculture: Challenges For Growth & Development In Present Scenario". *IJPSS*.Vol. 2.

Digital Repository Universitas Jember

Upadhay, R Prakash. dan Palanivel, C. 2011. "Challenges in Achieving Food Security in India". *Iranian J Publ Health*. Vol. 40, No.4.

Internet

Adoption Nutrition. Tanpa Tahun. *India: General Diet/Summary*, diakses dari http://adoptionnutrition.org/nutrition-by-country/india/ 6 Mei 2015.

Dept. of Food & Public Distribution of India. Tanpa Tahun. *Targeted Public Distribution System*, diakses dari http://dfpd.nic.in/?q=node/101 12 April 2015.

FAO. 2013. *G33 Proposal*: *Early Agreement on Elements of The Draft Doha Accord To Address Food Security*, diakses dari http://www.fao.org/fileadmin/templates/est/PUBLICATIONS/g33-proposal-early-agreement-on-elements-of-the-draft-doha-accord-to-address-food-security_1_.pdf. 11 Maret 2015.

Focus web. Tanpa Tahun. *India G-33 Proposal on Food Security: a wrong move can jeopardize India's food security forever*, diakses dari http://focusweb.org/content/india-g-33-proposal-food-security-wrong-move-can-jeopardize-india%E2%80%99s-food-security-forever pada tanggal 8 November 2014.

Food governance . 2013. *Food Security, G33 and The WTO: will food security move WTO trade talks*, diakses dari http://foodgovernance.com/2013/10/08/food-security-g33-and-the-wto-will-food-security-move-wto-trade-talks/ 8 November 2014.

Food Security News. Tanpa Tahun. *What is Food Securitty?*, diakses dari http://www.foodsecuritynews.com/What-is-food-security.htm 14 November 2014.

Global Sherpa. Tanpa Tahun. *India- Country Profile, Facts, News, and Original Artikel*, diakses dari: http://www.globalsherpa.org/india 5 November 2014.

Digital Repository Universitas Jember

Gomez, Oscar A and Des Gasper. Tanpa Tahun. *A Thematic Guidance Note for Regional and National Human Development Report Teams*, diakses dari http://hdr.undp.org/sites/default/files/human_security_guidance_note_r-nhdrs.pdf 18 November 2014

Gupta, R.K.. 2005. *WTO and implication for Indian Economy-A Review*, diakses dari http://www.indianmba.com/Faculty_Column/FC218/fc218.html 26 Februari 2015.

Human Security Initiative. 2011. *Definition of Human Security*, diakses dari http://www.humansecurityinitiative.org/definition-human-security 1 April 2015.

Indopos. 2013 *India Paling Keras Menolak Paket Bali*, diakses dari http://www.indopos.co.id/2013/12/india-paling-keras-menolak-paket-bali.html 9 Maret 2015.

Info Gateway to the Department of Agreeculture & Cooperation, Ministry of Agreeculture India . 2012. *State of Indian Agricultur 2011-12*. Diakses dari http://agricoop.nic.in/docs.htm 16 Januari 2015.

Kaczor, Jamie. 2006. *Food Security in India*. Diakses dari https://www.worldfoodprize.org/documents/filelibrary/images/youth_programs/research_papers/2006_papers/AnthonyWayneHS_8D92027302975.pdf 30 Januari 2015.

Maps of India. Tanpa Tahun. *Scenario of Agriculture in India*, diakses dari http://www.mapsofindia.com/indiaagriculture/ 16 January 2015.

NBR. 2014. *Feeding A Billion: Agriculture and food security in India*, diakses dari http://nbr.org/research/activity.aspx?id=402 22 Juni 2015.

Nurhayat, Wiji. 2013. *Isu Subsidi Pertanian di Pertemuan WTO Bali Masih Terganjal India*, diakses dari: http://finance.detik.com/read/2013/12/03/172527/2431486/4/isu-subsidi-pertanian-di-pertemuan-wto-bali-masih-terganjal-india 5 November 2014.

Digital Repository Universitas Jember

Pearson, Dan. 2014. *India's Dangerous Food Subsidies*, diakses dari: http://thediplomat.com/2014/08/indias-dangerous-food-subsidies/ 18 November 2014.

Rahman, Mustafizur. 2014. *What Does The Bali Package Mean For The LDCs?*, diakses dari http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges-africa/news/what-does-the-bali-package-mean-for-the-ldcs 22 Juni 2015.

Research Reference and Training Division, Ministry of Information dan Broadcasting, Government of India. Tanpa Tahun. *New Agriculture Policy*, diakses dari http://rrtd.nic.in/agriculture.html 26 Januari 2015.

Rural Poverty Portal. Tanpa Tahun. *Rural Poverty in India*, diakses dari http://www.ruralpovertyportal.org/country/home/tags/india 17 April 2015.

Sandiford, Wayne. Tanpa Tahun. *GATT and The Uruguay Round*, diakses dari http://www.eccb-centralbank.org/Rsch_Papers/Rpmar94.pdf 23 Maret 2015.

Sondi, M. L. Tanpa Tahun. *Implementation of India's Foreign Policy*, diakses dari http://mlsondhi.org/Indian%20Foreign%20Policy/IMPLEMENTATION%20OF%20INDIAs%20Foreign%20Policy.htm 19 April 2015.

The economic Times. 2003. *What's the agreement on agriculture*, diakses dari http://articles.economictimes.indiatimes.com/2003-09-08/news/27528002_1_amber-box-volume-of-export-subsidies-domestic-support 6 Januari 2015.

The Economic Times. 2014. *India hopeful of solution on food security issue at WTO*, diakses dari http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-09-10/news/53770541_1_wto-tfa-trade-facilitation-agreement-current-wto-norms 8 Januari 2015.

The Economic Times. 2014. *India's farm subsidy well bellow WTO cap of 10%: Official*, diakses dari

Digital Repository Universitas Jember

http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/finance/indias-farm-subsidy-well-below-wto-cap-of-10-official/articleshow/42288827.cms 20 April 2015.

The Japan Times. Tanpa Tahun. *Food Self-sufficiency rate fell below 40% in 2010*, diakses dari http://www.japantimes.co.jp/news/2011/08/12/news/food-self-sufficiency-rate-fell-below-40-in-2010/#.VSp1IfCElH0 12 April 2015.

The Times of India. 2014. *India 55th on Global Hunger Index, lags behind Nepal and Lanka*, diakses dari http://timesofindia.indiatimes.com/india/India-55th-on-global-hunger-index-lags-behind-Nepal-Lanka/articleshow/44804457.cms 16 April 2015.

The World Bank. Tanpa Tahun. *What are the links between agricultural production and food security*, diakses dari http://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/477365-1327599046334/8394679-1327606607122/WDR08_07_Focus_C.pdf 1 Februari 2015.

The World Bank. Tanpa Tahun. *What are the links between agricultural production and food security*, diakses dari http://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/477365-1327599046334/8394679-1327606607122/WDR08_07_Focus_C.pdf 18 April 2015.

UK Essay. Tanpa Tahun. *Agreement on Agriculture and It's Impact On India Economics*, diakses dari http://www.ukessays.com/essays/economics/agreement-on-agriculture-and-its-impact-on-india-economics-essay.php 23 Juni 2015.

UNTFHS. Tanpa Tahun. *Human Security Approach*, diakses dari http://www.unocha.org/humansecurity/human-security-unit/human-security-approach 18 Novembe 2014.

Digital Repository Universitas Jember

Upadhyay, R. Prakash & C. Palnivel. 2011. *Challanges in Achieving Food Security in India*, diakses dari http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3481742/ 30 januari 2015.

Web Global EDGE. 2013. *India's Farm Subsidies Effect on International Trade*, diakses dari http://globaledge.msu.edu/blog/post/1613/india%E2%80%99s-farm-subsidies-effect-on-international-trade 10 Maret 2015.

Web resmi Department of Food & Public Distribution India. Tanpa Tahun. *Targeted Public Distribution System*, diakses dari http://dfpd.nic.in/?q=node/101 13 Februari 2015.

Web resmi FAO. Tanpa Tahun. *Chapter 1 Food Security and Trade: an overview* , diakses dari http://www.fao.org/docrep/005/y4671e/y4671e05.htm 3 Desember 2014.

Web resmi FAO. Tanpa Tahun. *Part 1. Conceptual Approaches to Food Security and Trade*, diakses dari http://www.fao.org/docrep/005/y4671e/y4671e04.htm pada tanggal 3 Desember 2014.

Web resmi Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. Tanpa Tahun. *Ketahanan Pangan*, diakses dari http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=9&l=id 31 Januari 2015.

Web resmi Kementrian Perdagangan Indonesia. Tanpa Tahun. *Putaran Doha*, diakses dari http://www.kemendag.go.id/id/faq#g-1 7 Januari 2015.

Web resmi Pemerintah India. Tanpa Tahun *Profile*, diakses dari http://india.gov.in/india-glance/profile 16 Januari 2015.

Web Resmi Pemerintah India. Tanpa Tahun. *Agriculture*, diakses dari http://india.gov.in/topics/agriculture 5 November 2014.

Web resmi WHO. *Trade, Foreign Policy, Diplomacy and Health*, diakses dari http://www.who.int/trade/glossary/story028/en/ 3 Desember 2014.

Digital Repository Universitas Jember

Web resmi WTO. Tanpa Tahun. *Briefing note: trade facilitation – cutting "red cepe" at the border*, diakses dari https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/brief_tradfa_e.htm 17 Juni 2015.

Web resmi WTO. Tanpa Tahun. *Days 3, 4 and 5: Round-the-clock consultation produce Bao Package*, diakses dari http://www.wto.org/english/news_e/news13_e/mc9sum_07dec13_e.htm 4 November 2014 2014.

Web resmi WTO. Tanpa Tahun. *Miniaterial Conference*, diakses dari http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/minist_e.htm 4 November 2014

Web resmi WTO. Tanpa Tahun. *Publick Stockholding For Food Security Purposes*, diakses dari https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/desci38_e.htm 17 Juni 2015.

Web resmi WTO. Tanpa Tahun. *What Is The WTO?*, diakses dari http://wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm 4 November 2014.

Web Trade Chakra. Tanpa Tahun. *WTO*, diakses dari http://www.tradechakra.com/indian-economy/india-wto.html 19 Februari 2015.

WTO. Tanpa Tahun. 2014. *The World Trade Organization*. Diakses dari https://www.wto.org/ENGLISH/res_e/doload_e/inbr_e.pdf 26 Februari 2015.

WTO. Tanpa Tahun. *Ministerial Conference*, diakses dari https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/minist_e.htm 5 Maret 2015.

Digital Repository Universitas Jember

WTO. Tanpa Tahun. *Understanding WTO: Who We Are*, diakses dari http://wto.org/english/thewto_e/whatis_e/who_we_are_e.htm 17 Frebruari 2015.